

LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH  
KOTA SERANG TAHUN 2020



BAGIAN ORGANISASI  
SEKRETARIAT DAERAH KOTA SERANG  
TAHUN 2021



## KATA PENGANTAR



Segala Puji hanya milik Allah SWT, Shalawat dan Salam selalu tercurahkan kepada Rosululullah SAW karena berkat limpahan dan rahmatnya, Pemerintah Kota Serang dapat menyelesaikan penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Kota Serang Tahun 2020.

Kinerja Instansi Pemerintah ini dibuat dengan tujuan untuk menginformasikan secara rinci upaya yang telah dilakukan dan capaian yang telah diraih yaitu dengan mengukur hasil pencapaian indikator-indikator sasaran misi pada dokumen RPJMD Kota Serang Tahun 2018-2023 yang juga merupakan Indikator Kinerja Utama (IKU) Pemerintah Kota Serang yang dituangkan ke dalam dokumen Perjanjian Kinerja Pemerintah Kota Serang Tahun 2020. Penyusunan Laporan Kinerja Pemerintah merupakan kewajiban sebagaimana diamanatkan dalam Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah yang dijelaskan lebih lanjut dalam Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014.

Penyusunan laporan ini merupakan upaya kami untuk menginformasikan pertanggungjawaban kinerja yang telah dilakukan Pemerintah Daerah selama tahun 2020, sebagai konsistensi kami terhadap komitmen untuk menciptakan transparansi yang merupakan pilar terwujudnya tata pemerintahan yang baik. Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2020 memuat informasi tentang penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan kebijakan program dan kegiatan, serta pencapaian sasaran dalam mewujudkan tujuan, misi dan visi Pemerintah Kota Serang yaitu:



**“TERWUJUDNYA KOTA PERADABAN YANG BERDAYA DAN BERBUDAYA”**

sesuai yang telah ditetapkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Pemerintah Kota Serang dalam kurun waktu 1 sampai dengan 5 tahun.

Hasil pencapaian kinerja penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan Kota Serang tidak terlepas dari kerjasama dan kerja keras semua pihak yakni masyarakat, swasta dan aparat pemerintah daerah baik dalam perumusan kebijakan, maupun dalam implementasi serta pengawasannya.

Besar harapan kami bahwa penyajian Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Kota Serang ini dapat menjadi cermin dalam mengevaluasi kinerja Pemerintah Kota selama Tahun 2020, namun kami menyadari bahwa Laporan Kinerja ini masih terdapat kekurangan. Untuk itu Pemerintah Kota Serang mengharapkan kritik dan saran konstruktif guna perbaikan laporan di tahun yang akan datang. Akhir kata, kami sampaikan terima kasih kepada semua pihak yang telah memberikan dukungan, bantuan serta partisipasi dalam penyusunan LKjIP Kota Serang Tahun 2020. Semoga Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Kota Serang ini dapat memberikan manfaat bagi pihak-pihak yang berkepentingan baik sebagai informasi maupun evaluasi kinerja Pemerintah Kota Serang.

Serang, 30 Maret 2021

WALIKOTA SERANG



H. SYAFRUDIN, S.Sos.,M.Si



## IKHTISAR EKSEKUTIF

Pemerintah Kota Serang telah berupaya menyelenggarakan pemerintahan dengan berprinsip pada tata kelola pemerintahan yang baik dan berorientasi pada hasil sesuai dengan kewenangannya. Dalam mewujudkan *Good Governance*, akuntabilitas merupakan salah satu aspek penting yang harus diimplementasikan dalam manajemen pemerintahan. Akuntabilitas kinerja sekurang-kurangnya harus memuat visi, misi, tujuan dan sasaran yang memiliki arah dan tolok ukur yang jelas atas perumusan perencanaan strategis organisasi sehingga menggambarkan hasil yang ingin dicapai dalam bentuk sasaran dapat diukur, diuji dan diandalkan.

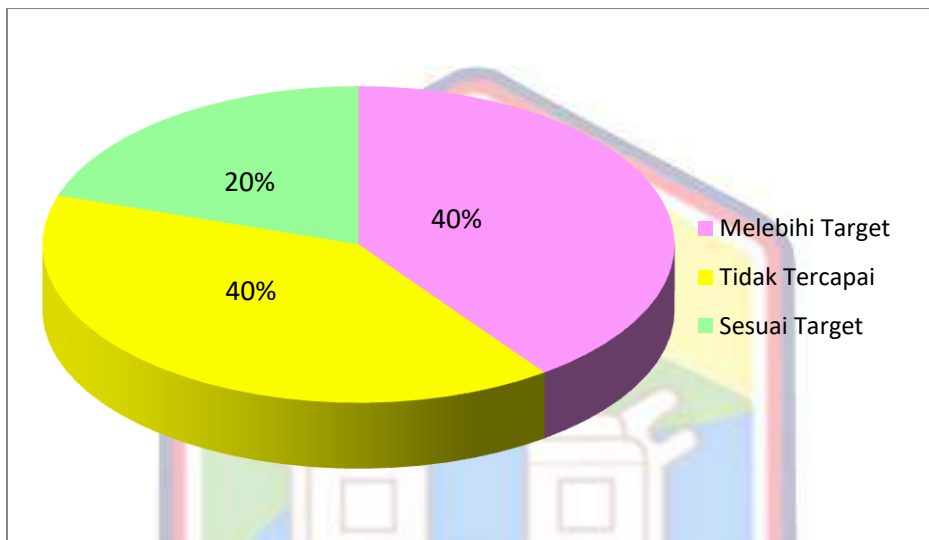
LKjIP tidak hanya sekedar alat akuntabilitas, tetapi juga sebagai sarana yang strategis untuk mengevaluasi diri dalam rangka peningkatan kinerja kedepan. Dengan langkah ini setiap OPD dapat senantiasa melakukan perbaikan dalam mewujudkan praktek-praktek penyelenggaraan pemerintahan yang baik dan meningkatkan kualitas pelayanan publik.

Tahun 2020 merupakan tahun pertama dalam upaya pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD Kota Serang Tahun 2018-2023, secara umum pencapaian sasaran melalui indikator-indikator sasaran menunjukkan keberhasilan untuk mewujudkan misi dan tujuan sebagaimana yang tertuang dalam Peraturan Daerah Kota Serang Nomor 3 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Serang Tahun 2018 – 2023, dan Keputusan Walikota Serang Nomor 060/Kep.49-Huk/2020 tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Pemerintah Kota Serang Tahun 2019-2023.



Hasil pengukuran Indikator Kinerja Utama pada 5 Tujuan Daerah dan 21 Sasaran Strategis Kota Serang yang telah ditetapkan pada tahun 2020, sebagai berikut:

- ✓ 2 indikator atau 40% melebihi target dengan kategori sangat baik
- ✓ 2 indikator atau 40% tidak mencapai target kategori baik
- ✓ 1 indikator atau 20% belum ada nilai



Secara rinci pencapaian sasaran dapat dijelaskan sebagai berikut:

- a. Sasaran 1 terdiri dari 2 indikator dengan nilai capaian 101,04%, melebihi target dengan interpretasi Sangat Tinggi
- b. Sasaran 2 terdiri dari 1 indikator dengan nilai capaian 99,95%, melebihi target dengan interpretasi Sangat Tinggi
- c. Sasaran 3 terdiri dari 1 indikator dengan nilai capaian 60,23%, tidak tercapai target dengan interpretasi Rendah
- d. Sasaran 4 terdiri dari 1 indikator dengan nilai capaian 94,71%, melebihi target dengan interpretasi Sangat Tinggi
- e. Sasaran 5 terdiri dari 1 indikator dengan nilai capaian 30,77%, tidak tercapai target dengan interpretasi Sangat rendah
- f. Sasaran 6 terdiri dari 1 indikator dengan nilai capaian 64,00%, tidak mencapai target dengan interpretasi rendah

- g. Sasaran 7 terdiri dari 3 indikator dengan nilai capaian 135,06%, tidak mencapai target dengan interpretasi Sangat Tinggi
- h. Sasaran 8 terdiri dari 1 indikator dengan nilai capaian 100%, mencapai target dengan interpretasi Sangat Tinggi
- i. Sasaran 9 terdiri dari 6 indikator dengan nilai capaian 90,18%, tidak mencapai target dengan interpretasi Sangat Tinggi
- j. Sasaran 10 terdiri dari 4 indikator dengan nilai capaian 115,03%, (1 indikator IKM) mencapai target dengan interpretasi Sangat Tinggi, 3 indikator belum ada hasil evaluasi ( n/a)



Pada tahun 2020 Pemerintah Kota Serang melalui Peraturan Daerah Kota Serang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Serang Tahun Anggaran 2020, telah menetapkan Program dan Kegiatan serta anggaran yang dilaksanakan dalam rangka mendukung pencapaian sasaran kinerja yang telah ditetapkan. Secara umum capaian kinerja sasaran yang telah dilakukan pengukuran telah berhasil dicapai dengan maksimal namun masih ada capaian yang masih rendah atau tidak mencapai target karena adanya kondisi pandemi covid 19.



Anggaran yang digunakan dalam mencapai keberhasilan tersebut sebesar **Rp. 1.322.123.502.156** dari pagu anggaran **Rp. 1.384.644.172.872** mencapai **95,48 %** sehingga terdapat efisiensi anggaran sebanyak **4,52 %**.

Keberhasilan capaian kinerja Pemerintah Kota Serang dapat terwujud berkat dukungan semua elemen masyarakat Kota Serang, yang akan terus dipelihara dan pencapaian yang masih rendah akan ditingkatkan guna mencapai sasaran kinerja yang lebih baik.





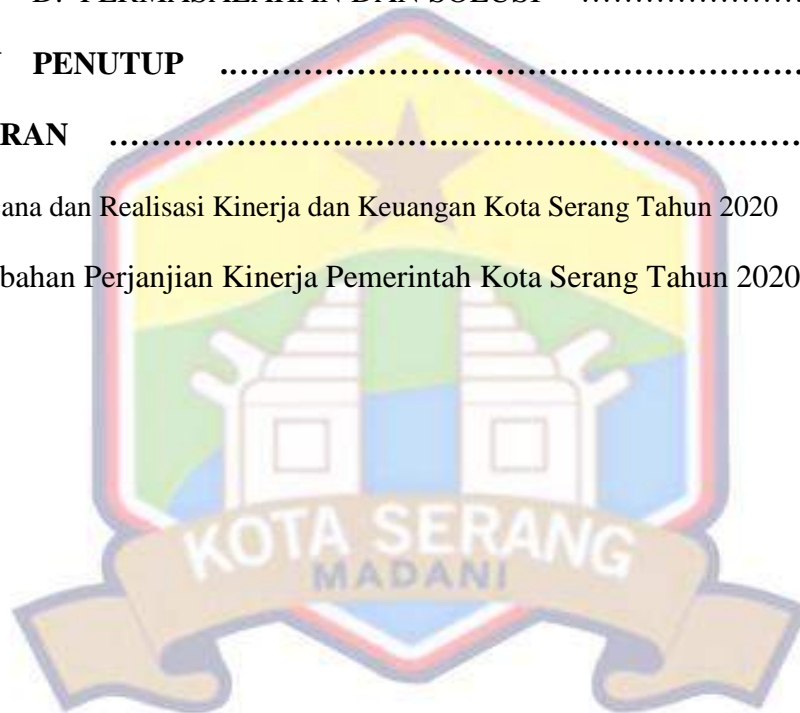
## DAFTAR ISI

	Hal
<b>KATA PENGANTAR</b> .....	i
<b>PERNYATAAN TELAH DI REVIEW</b> .....	iii
<b>IKHTISAR EKSEKUTIF</b> .....	iv
<b>DAFTAR ISI</b> .....	vii
<b>DAFTAR TABEL</b> .....	ix
<b>DAFTAR GRAFIK</b> .....	xiii
<b>BAB I PENDAHULUAN</b> .....	1
A. LATAR BELAKANG .....	1
B. MAKSUD DAN TUJUAN .....	2
C. DASAR HUKUM .....	3
D. GAMBARAN UMUM KOTA SERANG .....	5
E. PERTUMBUHAN EKONOMI .....	14
F. SUSUNAN PERANGKAT DAERAH .....	20
G. SUMBER DAYA APARATUR .....	22
H. ISU STRATEGIS KOTA SERANG .....	23
<b>BAB II PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA</b> .....	26
A. RENCANA STRATEGIS TAHUN 2018 - 2023 .....	26
B. INDIKATOR KINERJA UTAMA .....	46
C. PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2020 .....	48
D. RENCANA ANGGARAN TAHUN 2020 .....	51





<b>BAB III AKUNTABILITAS KINERJA</b> .....	<b>54</b>
A. CAPAIAN INDIKATOR KINERJA UTAMA .....	55
B. PENGUKURAN, EVALUASI DAN ANALISIS	
KINERJA SASARAN STRATEGIS .....	56
C. AKUNTABILITAS KEUANGAN .....	114
D. PERMASALAHAN DAN SOLUSI .....	125
<b>BAB IV PENUTUP</b> .....	<b>130</b>
<b>LAMPIRAN</b> .....	<b>135</b>
A. Rencana dan Realisasi Kinerja dan Keuangan Kota Serang Tahun 2020	135
B. Perubahan Perjanjian Kinerja Pemerintah Kota Serang Tahun 2020	147





## DAFTAR TABEL

	Hal
Tabel 1.1 Luas Wilayah Kota Serang Berdasarkan Kecamatan .....	11
Tabel 1.2 Tingkat Kepadatan Penduduk Kota Serang Tahun 2016-2020..	11
Tabel 1.3 Komposisi Penduduk Kota Serang Menurut Jenis Kelamin Tahun 2016-2020 .....	12
Tabel 1.4 Komposisi Penduduk Kota Serang Menurut Kelompok Umur Tahun 2016-2020 .....	12
Tabel 1.5 Jumlah Penduduk Kota Serang yang Memiliki KTP sampai Tahun 2020 .....	13
Tabel 1.6 Komposisi Penduduk Pemeluk Agama di Kota Serang Tahun 2016-2020.....	14
Tabel 1.7 Nilai & Kontribusi PDRB Kota Serang Tahun 2019-2020.....	16
Tabel 1.8 Luas Panen (Ha) dan Produksi (Ton) Tanaman Padi Tahun 2020.....	17
Tabel 1.9 Perkembangan Investasi/Penanaman Modal Kota Serang 2016-2020.....	20
Tabel 1.10 Jumlah Pegawai Negeri Sipil Berdasarkan Jenis Kelamin Tahun 2020 .....	22
Tabel 1.11 Jumlah Pegawai Negeri Sipil Berdasarkan Tingkat Pendidikan Tahun 2020.....	23
Tabel 2.1 Matriks Hubungan antara Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran Pembangunan Kota Serang .....	35
Tabel 2.2 Matriks Hubungan antara Misi, Tujuan, Sasaran dan Strategi	40



	Pembangunan Kota Serang .....	
Tabel 2.3	Indikator Kinerja Utama Pemerintah Kota Serang Tahun 2019-2023 .....	46
Tabel 2.4	Rencana Belanja Pemerintah Kota Serang Tahun 2020 .....	51
Tabel 2.5	Alokasi Per Sasaran Strategis Tahun 2020 .....	52
Tabel 3.1	Capaian Indikator Kinerja Utama Pemerintah Kota Serang Tahun 2020 .....	54
Tabel 3.2	Pengukuran Kinerja Pemerintah Kota Serang Tahun 2020 .....	57
Tabel 3.3	Pencapaian Indikator Kinerja Sasaran Strategis Pemerintah Kota Serang Tahun 2020 .....	59
Tabel 3.4	Capaian Kinerja Sasaran Meningkatnya Derajat Pendidikan Masyarakat Tahun 2020 .....	61
Tabel 3.5	Capaian Kinerja Sasaran Meningkatnya Derajat Pendidikan Masyarakat Tahun 2020 Terhadap Kondisi Akhir RPJMD.....	61
Tabel 3.6	Capaian Kinerja Sasaran Meningkatnya Derajat Kesehatan Masyarakat Tahun 2020 .....	64
Tabel 3.7	Capaian Kinerja Sasaran Meningkatnya Derajat Kesehatan Masyarakat Tahun 2020 Terhadap Kondisi Akhir RPJMD.....	64
Tabel 3.8	Capaian Kinerja Sasaran Terkendalinya Kuantitas, Kualitas dan Mobilitas Pertumbuhan Penduduk Tahun 2020 .....	66
Tabel 3.9	Capaian Kinerja Sasaran Terkendalinya Kuantitas, Kualitas dan Mobilitas Pertumbuhan Penduduk Tahun 2020 Terhadap Kondisi Akhir RPJMD.....	66
Tabel 3.10	Nilai IKLI Kecamatan se-Kota Serang Tahun 2020 .....	69
Tabel 3.11	Capaian Kinerja Sasaran Meningkatnya Ketersediaan dan Kualitas Infrastruktur Wilayah Tahun 2020 .....	70
Tabel 3.12	Capaian Kinerja Sasaran Meningkatnya Ketersediaan dan Kualitas Infrastruktur Wilayah Tahun 2020 Terhadap Kondisi Akhir RPJMD .....	71



Tabel 3.13	Capaian Kinerja Sasaran Menurunnya Luasan Kawasan Kumuh Tahun 2020 .....	71
Tabel 3.14	Capaian Kinerja Sasaran Menurunnya Luasan Kawasan Kumuh Tahun 2020 Terhadap Kondisi Akhir RPJMD.....	72
Tabel 3.15	Capaian Kinerja Sasaran Menurunnya Kemacetan Lalu Lintas Tahun 2020 .....	79
Tabel 3.16	Capaian Kinerja Sasaran Menurunnya Kemacetan Lalu Lintas Tahun 2020 Terhadap Kondisi Akhir RPJMD.....	80
Tabel 3.17	Capaian Kinerja Meningkatnya Kualitas Pengelolaan Lingkungan Hidup Tahun 2020 .....	82
Tabel 3.18	Capaian Kinerja Meningkatnya Kualitas Pengelolaan Lingkungan Hidup Tahun 2020 Terhadap Kondisi Akhir RPJMD.....	83
Tabel 3.19	Capaian Kinerja Meningkatnya Mitigasi dan Penanggulangan Bencana Tahun 2020 .....	90
Tabel 3.20	Capaian Kinerja Meningkatnya Mitigasi dan Penanggulangan Bencana Tahun 2020 Terhadap Kondisi Akhir RPJMD.....	91
Tabel 3.21	Capaian Kinerja Meningkatnya Perekonomian Daerah dan Daya Beli Masyarakat Tahun 2020 .....	93
Tabel 3.22	Capaian Kinerja Meningkatnya Perekonomian Daerah dan Daya Beli Masyarakat Tahun 2019 Terhadap Kondisi Akhir RPJMD.....	97
Tabel 3.23	Hasil Evaluasi Reformasi Birokrasi Kota Serang Tahun 2017-2019 .....	99
Tabel 3.24	Capaian Kinerja Meningkatnya Kualitas dan Akuntabilitas Pelayanan Publik dan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Tahun 2019 .....	103
Tabel 3.25	Capaian Kinerja Meningkatnya Kualitas dan Akuntabilitas Pelayanan Publik dan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Tahun 2020 Terhadap Kondisi Akhir RPJMD.....	103



Tabel 3.26	Nilai Persepsi, Interval IKM, Interval Konversi IKM, Mutu Pelayanan dan Kinerja Unit Pelayanan .....	104
Tabel 3.27	IKM Kota Serang Berdasar Indikator Komposit Tahun 2019 ..	108
Tabel 3.28	Hasil Capaian Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Kota Serang Tahun 2016-2020 .....	110
Tabel 3.29	Hasil Evaluasi AKIP Kota Serang 2017 – 2019 .....	112
Tabel 3.30	Komposisi Belanja Pemerintah Kota Serang Tahun Anggaran 2020 .....	114
Tabel 3.31	Pagu dan Realisasi Anggaran Pemerintah Kota Serang Per Sasaran Strategis Tahun 2020 .....	115
Tabel 3.32	Efektifitas Anggaran Terhadap Capaian Tujuan dan Sasaran Pemerintah Kota Serang Tahun 2020 .....	117
Tabel 3.33	Tingkat Efisiensi Penggunaan Sumber Daya .....	123





## DAFTAR GRAFIK

	Hal
Grafik 3.1	Capaian IKU Pemerintah Kota Serang Tahun 2020 ..... 55
Grafik 3.2	Capaian Indikator Kinerja Sasaran Strategis Pemerintah Kota Serang Tahun 2020 ..... 59
Grafik 3.3	Capaian Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Tahun 2016–2020..... 60
Grafik 3.4	Rata-rata Lama Sekolah Kota Serang Tahun 2016–2020 ..... 62
Grafik 3.5	Harapan Lama Sekolah Kota Serang Tahun 2016–2020 ..... 62
Grafik 3.6	Usia Harapan Hidup Kota Serang Tahun 2016–2020 ..... 65
Grafik 3.7	Laju Pertumbuhan Penduduk Kota Serang Tahun 2016–2020. 67
Grafik 3.8	Luasan Kawasan Kumuh Kota Serang Tahun 2017–2020..... 72
Grafik 3.9	Persentase Potensi Titik Kemacetan Tahun 2016–2020 ..... 80
Grafik 3.10	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup Kota Serang Tahun 2016–2019..... 82
Grafik 3.11	Indeks Kualitas Udara Kota Serang Tahun 2016–2019..... 84
Grafik 3.12	Indeks Kualitas Air Kota Serang Tahun 2016–2019 ..... 84
Grafik 3.13	Indeks Kualitas Tutupan Lahan Kota Serang Tahun 2016–2020..... 85
Grafik 3.14	Cakupan Penanggulangan Bencana Tahun 2016–2020 ..... 90
Grafik 3.15	Laju Pertumbuhan Ekonomi Kota Serang Tahun 2016–2020 .. 92
Grafik 3.16	Laju Inflasi Kota Serang Tahun 2016-2020 ..... 94
Grafik 3.17	Persentase Penduduk Miskin Tahun 2016-2020 ..... 96
Grafik 3.18	Tingkat Pengangguran Terbuka 2016-2020 ..... 97
Grafik 3.19	IKM Kota Serang berdasar Unsur Tahun 2019 – 2020 ..... 105
Grafik 3.20	Perbandingan IKM berdasarkan Unit Pelayanan Tahun 2018-2020..... 106
Grafik 3.21	Capaian Nilai AKIP Kota Serang Tahun 2017–2019 ..... 111



**BAB  
01**

**PENDAHULUAN**

**A. LATAR BELAKANG**

**A** kuntabilitas didefinisikan sebagai suatu perwujudan kewajiban untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan atau kegagalan misi organisasi dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan melalui media pertanggungjawaban yang dilaksanakan secara periodik. Dalam dunia birokrasi, akuntabilitas pemerintah merupakan perwujudan kewajiban instansi pemerintah untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan misi instansi yang bersangkutan. Sejalan dengan hal tersebut pelaporan kinerja merupakan amanat Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah, Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Instruksi Presiden Nomor 5 Tahun 2004 tentang Percepatan Pemberantasan Korupsi.

Sesuai dengan Pasal 22 Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 dinyatakan bahwa Walikota menyusun dan menyampaikan Laporan Kinerja Tahunan Pemerintah Kota kepada Presiden melalui Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi paling lambat 3 (tiga) bulan setelah tahun anggaran berakhir.

Bertitik tolak dari RPJMD Kota Serang Tahun 2018 - 2023, Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Kota Serang Tahun 2020 dan Perjanjian Kinerja Pemerintah Kota Serang Tahun 2020, serta mengacu pada Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja Dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, maka penyusunan LKjIP Tahun 2020 berisi ikhtisar pencapaian sasaran sebagaimana ditetapkan dalam dokumen perjanjian kinerja dan dokumen perencanaan. Pencapaian sasaran tersebut disajikan berupa informasi



mengenai pencapaian sasaran RPJMD, realisasi pencapaian indicator sasaran disertai dengan penjelasan yang memadai atas pencapaian kinerja dan perbandingan capaian indicator sasaran, dengan demikian LKjIP Serang Tahun 2020 menjadi laporan kemajuan penyelenggaraan pemerintah oleh Walikota kepada Presiden ini disusun dan dikembangkan sesuai peraturan yang berlaku. Realisasi yang dilaporkan dalam LKjIP ini merupakan hasil kegiatan Tahun 2020 yaitu tahun kedua RPJMD Kota Serang Tahun 2018-2023.

## **B. MAKSUD DAN TUJUAN**

Penyusunan Laporan Kinerja Pemerintah Kota Serang Tahun 2020 memiliki maksud sebagai upaya pengembangan dan penerapan system pertanggungjawaban penyelenggaraan pemerintahan dan pelaksanaan pembangunan yang tepat, jelas, terukur dan akuntabel. Sedangkan tujuan dari Penyusunan Laporan Kinerja Pemerintah Kota Serang Tahun 2020 memiliki tujuan:

1. Mewujudkan akuntabilitas instansi pemerintah Kota Serang dan sebagai bentuk pertanggungjawaban dari unit yang lebih rendah kepada unit kerja yang lebih tinggi, dalam hal ini adalah Pemerintah Kota Serang kepada Pemerintah Provinsi Banten dan Pemerintah Pusat.
2. Memberikan informasi umum terkait dengan capaian kinerja keseluruhan Pemerintah Kota Serang sepanjang pelaksanaan RKPd Kota Serang pada tahun anggaran 2020.
3. Memberikan informasi capaian kinerja berupa angka capaian indikator-indikator misi yang terukur serta dapat memrepresentasikan kinerja Pemerintah Kota Serang yang sesungguhnya.
4. Memberikan berbagai informasi dan rekomendasi terkait capaian indikator kinerja sebagai bahan evaluasi dan pengambilan keputusan serta pelaksanaan perubahan kearah perbaikan, dalam mencapai efisiensi dan efektivitas pelaksanaan tugas pokok dan fungsi, serta ketaatan terhadap



peraturan perundang - undangan yang berlaku, dalam rangka mewujudkan pelaksanaan misi RPJMD Kota Serang Tahun 2018 - 2023;

5. Sebagai salah satu proses perbaikan dalam system perencanaan, khususnya Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan rencana kerja tahunan yang dituangkan dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah.

### C. DASAR HUKUM

Pelaksanaan penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Pemerintah Kota Serang Tahun 2020 dengan memperhatikan kepada peraturan perundang-undangan yang melandasi pelaksanaan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, yaitu :

1. Undang – Undang Nomor 28 tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Kolusi, Korupsi dan Nepotisme;
2. Undang – Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi;
3. Undang – Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah;
4. Undang - Undang Nomor 32 Tahun 2007, tentang Pembentukan Kota Serang di Provinsi Banten;
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;
6. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah sebagai pengganti Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;





7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
8. Keputusan Kepala Lembaga Administrasi Negara Nomor 239/IX/6/8/2003 tentang Perbaikan Pedoman Penyusunan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
9. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;
10. Peraturan Daerah Kota Serang Nomor 3 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Serang Tahun 2018 - 2023;
11. Peraturan Daerah Kota Serang Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Serang;
12. Peraturan Daerah Kota Serang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Kota Serang Tahun Anggaran 2020;
13. Peraturan Walikota Serang Nomor 39 Tahun 2019 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kota Serang Tahun 2020
14. Peraturan Walikota Serang Nomor 20 Tahun 2020 tentang Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kota Serang Tahun 2020
15. Peraturan Walikota Serang Nomor 29 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kota Serang.



## D. GAMBARAN UMUM KOTA SERANG

### 1. Kondisi Geografis

Gambar 1.1.  
Peta Administrasi Kota Serang



Kota Serang memiliki luas 26.670 Ha yang secara astronomis terbentang di antara  $5^{\circ} 99' - 6^{\circ} 22'$  Lintang Selatan serta di sepanjang  $106^{\circ} 07' - 106^{\circ} 25'$  Bujur Timur. Berdasarkan sistem koordinat UTM (*Universal Transfer Mercator*) Zona 48E wilayah Kota Serang terletak pada koordinat 618.000 m sampai dengan 638.600 m dari Barat ke Timur, serta pada 9.337.725 m sampai dengan 9.312.475 m dari Utara ke Selatan. Jika ditarik garis lurus dari utara ke selatan, maka jarak terpanjang yang didapat adalah sekitar 21,7 Km. Sementara itu jarak terpanjang dari Barat ke Timur adalah sekitar 20 km. Letak wilayah Kota Serang secara geografis berbatasan dengan Laut Jawa di sebelah utara, sementara di bagian yang lain berbatasan dengan Kabupaten Serang. Relief topografi Kota Serang di dominasi dataran rendah dengan ketinggian kurang dari 500 mdpl.

Kota Serang merupakan wilayah baru hasil pemekaran dari Kabupaten Serang sebagai kabupaten induk sebelumnya, sebagaimana dijelaskan oleh pasal 3 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2007 bahwa Kota Serang berasal dari sebagian wilayah Kabupaten Serang yang cakupan wilayahnya terdiri dari :



- a. Kecamatan Serang,
- b. Kecamatan Kasemen,
- c. Kecamatan Walantaka,
- d. Kecamatan Curug,
- e. Kecamatan Cipocok Jaya, dan
- f. Kecamatan Taktakan.

Berdasarkan Pasal 5 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kota Serang di Provinsi Banten, Kota Serang mempunyai batas-batas wilayah :

- 1) Sebelah utara berbatasan dengan Teluk Banten;
- 2) Sebelah timur berbatasan dengan Kecamatan Pontang, Kecamatan Ciruas, Kecamatan Kragilan Kabupaten Serang;
- 3) Sebelah selatan berbatasan dengan Kecamatan Cikuesal, Kecamatan Petir, Kecamatan Baros Kabupaten Serang; dan
- 4) Sebelah barat berbatasan dengan Kecamatan Pabuaran, Kecamatan Waringin Kurung, Kecamatan Kramat Watu Kabupaten Serang.

Pada awal terbentuknya pada tahun 2007, Kota Serang terdiri dari 6 kecamatan, 46 desa dan 20 kelurahan. Perkembangan kota yang cukup pesat serta tuntutan pelayanan publik yang lebih baik mendorong perubahan status 16 (enam belas) desa menjadi kelurahan pada Tahun 2011 melalui Peraturan Daerah Kota Serang Nomor 10 Tahun 2011, sehingga jumlah kelurahan bertambah menjadi 36 (tiga puluh enam) kelurahan dan 30 (tiga puluh) desa. Pada tahun 2012 dilakukan kembali perubahan status 15 (lima belas) desa menjadi kelurahan melalui Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2012, sehingga jumlah kelurahan bertambah menjadi 51 (lima puluh satu) kelurahan dan 15 (lima belas) desa. Selanjutnya setahun kemudian, kelima belas desa yang tersisa juga mengalami perubahan status menjadi kelurahan melalui Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2013 jumlah kelurahan di Kota Serang adalah sebanyak 66 (enam puluh enam) kelurahan dan pada tahun 2017 melalui Peraturan



Daerah Nomor 1 Tahun 2017 tentang Pembentukan Kelurahan, berupa pemekaran Kelurahan Cilowong menjadi 2 (dua) Kelurahan yaitu menjadi Kelurahan Cilowong dan Kelurahan Cibendung.

Wilayah Kota Serang secara astronomis terbentang di antara  $5^{\circ} 99' - 6^{\circ} 22'$  Lintang Selatan serta di sepanjang  $106^{\circ} 07' - 106^{\circ} 25'$  Bujur Timur. Berdasarkan sistem koordinat UTM (*Universal Transfer Mercator*) Zona 48E wilayah Kota Serang terletak pada koordinat 618.000 m sampai dengan 638.600 m dari Barat ke Timur, serta pada 9.337.725 m sampai dengan 9.312.475 m dari Utara ke Selatan. Jika ditarik garis lurus dari utara ke selatan, maka jarak terpanjang yang didapat adalah sekitar 21,7 Km. Sementara itu jarak terpanjang dari Barat ke Timur adalah sekitar 20 Km. Letak wilayah Kota Serang secara geografis berbatasan dengan Laut Jawa di sebelah utara, sementara di bagian yang lain berbatasan dengan Kabupaten Serang.

Relief topografi Kota Serang didominasi dataran rendah dengan ketinggian kurang dari 500 mdpl. Pengaruh iklim tropis menghasilkan variasi temperatur dengan amplitudo yang tidak terlalu ekstrem. Suhu minimum sepanjang 2018 adalah  $31,40^{\circ}\text{C}$  terjadi di bulan Januari, sedangkan suhu maksimum tercatat pada bulan Oktober, sebesar  $33,40^{\circ}\text{C}$  harian tertinggi tercatat pada bulan Oktober yaitu  $34^{\circ}\text{C}$  dan Suhu rata-rata harian terendah pada bulan Juli sebesar  $22,20^{\circ}\text{C}$ .

Kelembaban relatif terendah di Kota Serang pada tahun 2020 sebesar 41% terjadi pada bulan Agustus. Kelembaban relatif tertinggi tercatat pada bulan Januari, yaitu 99%. Kelembaban relatif rata-rata terendah tercatat pada bulan September, yaitu 76,10%. Sedangkan kelembaban relatif rata-rata tertinggi tercatat pada bulan Februari, yaitu 84,40%. Tekanan udara rata-rata sekitar 1.005,66mb ; serta tingkat penyinaran matahari berkisar antara 43,55%-78,6% per tahun. Tekanan udara terendah di Kota Serang pada tahun 2020 tercatat pada bulan Mei, yaitu 1.000,50 mb. Tekanan udara tertinggi, tercatat di bulan November, yaitu 1.012,00



mb. Curah hujan terendah tercatat pada bulan Agustus yaitu 28,80 mm<sup>3</sup>. Sementara curah hujan tertinggi tercatat pada bulan Januari yaitu 368,10 mm<sup>3</sup>.

Kota Serang memiliki peranan yang fundamental, selain merupakan pusat pemerintahan provinsi Banten, jarak dari Kota Jakarta yang hanya sekitar 70 km, menjadikan Kota Serang juga sebagai daerah alternatif dan penyangga (*hinterland*) Ibukota Negara. Relief topografi Kota Serang didominasi dataran rendah dengan ketinggian kurang dari 500 mdpl. Pengaruh iklim tropis menghasilkan variasi temperatur dengan amplitudo yang tidak terlalu ekstrem. Suhu minimum sepanjang 2020 adalah 20,80<sup>0</sup>C, terjadi di bulan Agustus, sedangkan suhu maksimum tercatat pada bulan Maret dan September, sebesar 35,00<sup>0</sup>C. Suhu rata-rata harian tertinggi tercatat pada bulan Mei yaitu 28,21<sup>0</sup>C dan Suhu rata-rata harian terendah pada bulan Desember sebesar 27,14<sup>0</sup>C.

Pengembangan potensi wilayah Kota Serang tak dapat dipisahkan sebagai bagian integral Provinsi Banten, sesuai dengan kondisi dan potensi wilayah serta sosial ekonomi masyarakat yang menekankan pada pengembangan pembangunan pada bidang pertanian, industri, pariwisata, perdagangan dan jasa. Kota Serang mempunyai kekuatan sumber daya alam dan sumber daya manusia sebagai modal dasar untuk membangun wilayah secara optimal guna mencapai kesejahteraan sebesar-besarnya bagi masyarakat.

Peluang dan potensi wilayah di Kota Serang dapat digambarkan sebagai berikut :

1. Pengembangan Wilayah Wisata Ziarah

Pengembangan wilayah wisata ziarah berada di wilayah Kecamatan Kasemen dengan luas wilayah 63,36 Ha berjarak 4 Km dari pusat Kota Serang, Jenis industri yang potensial untuk di kembangkan antara lain : Industri makanan, industri jasa angkutan, wisata religi, industri pertanian, industri kerajinan gerabah. Untuk memacu perkembangan kawasan Wisata Ziarah ini Pemerintah Kota





Serang sudah melakukan pembangunan fisik yaitu meliputi pembangunan infrastruktur dalam kawasan dan pemugaran kawasan ziarah, penerangan jalan, jalur hijau dan penataan parkir.

2. Pengembangan Pelabuhan Karangantu

Pertumbuhan ekonomi Kota sedikit banyak dipengaruhi oleh perkembangan hasil perikanan laut dan budidaya perikanan tambak. Pengembangan pelabuhan yang layak merupakan hal yang dibutuhkan oleh masyarakat Kota Serang, khususnya di wilayah pesisir pantai utara Kota Serang. Jenis usaha yang potensial untuk dikembangkan antara lain adalah wisata kuliner, industri pengolahan hasil laut.

3. Pengembangan Pusat Perbelanjaan dan Peremajaan Pasar

Beberapa pusat perbelanjaan milik pemerintah Kota sudah perlu di remajakan antara lain Pasar Rau, Pasar Royal, Pasar Lama, Pasar Taman Sari, Pasar Kalodran dan Pasar Karangantu. Saat ini peran swasta untuk ikut serta dalam kegiatan membangun pusat perbelanjaan sangat diperlukan dan menjadi salah satu sektor usaha pada bidang perdagangan yang sangat potensial.

4. Pengembangan Industri Perumahan

Peluang pengembangan kawasan dibidang perumahan, rumah susun, rumah sederhana serta RSS, masih sangat potensial untuk dikembangkan di wilayah Kota Serang

5. Pengembangan Investasi Kota Serang terpusat pada kawasan-kawasan yang mempunyai nilai strategis, sesuai dengan rencana tata ruang wilayah, yaitu:

- a. Pengembangan potensi pariwisata di kawasan cagar budaya Banten Lama.
- b. Pengembangan potensi cagar alam di kawasan margasatwa Pulau Dua.
- c. Pengembangan potensi perumahan, perkantoran, wisata belanja, dan kawasan sport center atau pusat perkotaan olahraga di kota satelit Curug dan Kemanisan Curug





- d. Pengembangan potensi perdagangan dan jasa serta pendidikan di koridor kawasan cepat tumbuh Cipocok Jaya dan Curug
- e. Pengembangan Kawasan Agropolitan di Taktakan
- f. Pengembangan potensi kawasan Agrowisata buatan di Kecamatan Curug dan Cipocok Jaya.

Dalam rangka memberikan arah pemanfaatan ruang wilayah secara berdaya guna, berhasil guna, serasi, selaras, seimbang, dan berkelanjutan dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat di Kota Serang, sesuai dengan Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Serang Tahun 2010-2030 yang tertuang dalam Peraturan Daerah Kota Serang Nomor 6 Tahun 2011, ditetapkan 3 (tiga) Kawasan Strategis yaitu :

- a. Kawasan Strategis Ekonomi :
  - Kawasan Pelabuhan Karangantu
  - Kawasan Pusat Perdagangan Kota
  - Kawasan Cepat Tumbuh Kota Serang
- b. Kawasan Strategis Sosial dan Budaya :
  - Kawasan Banten Lama
- c. Kawasan Strategis Fungsi Daya Dukung Lingkungan :
  - Kawasan Cagar Alam Pulau Dua.

Dengan luas wilayah mencapai 266,74 km<sup>2</sup>, Kota Serang dibagi atas

6. Kecamatan dan 67 Kelurahan sebagaimana tabel 1.1 berikut:



**Tabel 1.1**  
**Luas Wilayah Kota Serang Berdasarkan Kecamatan**

No.	Kecamatan	Jumlah Kelurahan	Luas Wilayah (Km <sup>2</sup> )	% tase terhadap Luas Kota
1.	Serang	12	25,88	9,7
2.	Cipocok Jaya	8	31,54	11,82
3.	Kasemen	10	63,36	23,75
4.	Taktakan	13	47,88	17,95
5.	Walantaka	14	48,48	18,18
6.	Curug	10	49,60	18,59
<b>Jumlah</b>		<b>67</b>	<b>266,74</b>	<b>266,18</b>

Sumber: Bagian Pemerintahan Setda Kota Serang

## 2. Kondisi Demografis

Jumlah penduduk Kota Serang Tahun 2020 berjumlah 681.012 jiwa. Dari jumlah tersebut 346.829 jiwa (100,00%) adalah penduduk laki-laki dan 334.183 jiwa (100,00%) adalah penduduk perempuan, dengan kepadatan penduduk sebesar 2.558 jiwa/km<sup>2</sup> terlihat pada Tabel 1.2 dan tabel 1.3 berikut:

**Tabel 1.2**  
**Tingkat Kepadatan Penduduk Kota Serang Tahun 2016 - 2020**

No	Kecamatan	Luas (km <sup>2</sup> )	Tingkat Kepadatan Penduduk (Jiwa/km <sup>2</sup> )				
			2016	2017	2018	2019	2020
1.	Cipocok Jaya	31,1	2.725	2.797	2.860	2.898	2.831
2.	Curug	49,60	1.073	1.078	1.077	1.078	1.461
3.	Kasemen	63,36	1.489	1.509	1.494	1.534	1.487
4.	Serang	25,88	8.517	8.524	8.618	8.667	8.659
5.	Taktakan	61,16	1.846	1.875	1.890	1.912	1.590
6.	Walantaka	36,56	1.774	1.811	1.870	1.879	2.681
<b>Rata-rata &amp; Jumlah</b>		<b>266,74</b>	<b>2.337</b>	<b>2.355</b>	<b>2.382</b>	<b>2.433</b>	<b>2.558</b>

Sumber: Disdukcapil Kota Serang, Tahun 2020



**Tabel 1.3**  
**Komposisi Penduduk Kota Serang Menurut Jenis Kelamin**  
**Tahun 2016-2020**

Tahun	Laki-Laki	Perempuan	Jumlah	Rasio
2016	323.286	305.148	628.434	1,06
2017	325.997	309.635	635.632	1,05
2018	328.797	313.789	642.586	1,05
2019	332.912	319.280	652.192	1,04
2020	346.829	334.183	681.012	1,04

Sumber: Disdukcapil Kota Serang, Tahun 2020

Dilihat dari komposisinya, pada tahun 2020 proporsi penduduk Kota Serang lebih banyak berjenis kelamin laki-laki dibandingkan perempuan, terlihat pada Tabel 1.3.

Komposisi penduduk Kota Serang menurut kelompok umur pada tahun 2020 terlihat pada Tabel 1.4

**Tabel 1.4**  
**Komposisi Penduduk Kota Serang Menurut Kelompok Umur**  
**Tahun 2016-2020**

Kelompok Umur	Tahun				
	2016	2017	2018	2019	2020
0 – 4	49,863	44,793	53.622	54.994	58.410
5 – 9	59,090	59,738	55.796	63.247	68.557
10 – 14	60,713	60,417	53.549	56.459	63.757
15 – 19	60,925	62,072	59.733	41.716	48.873
20 – 24	62,416	62,943	63.091	62.151	63.260
25 – 29	59,518	60,944	60.168	62.172	63.833
30 – 34	57,840	57,920	57.481	59.870	60.675
35 – 39	50,990	53,903	54.199	55.534	56.105
40 – 44	47,507	48,115	49.228	50.984	51.328
45 – 49	39,068	41,386	42.869	74.023	44.500



Kelompok Umur	Tahun				
	2016	2017	2018	2019	2020
50 – 54	29,434	30,537	33.175	35.814	36.582
55 – 59	21,226	22,292	24.186	25.846	25.654
60 – 64	13,820	14,196	16.097	17.191	18.463
65 – 69	7,723	8,185	9.564	11.118	10.339
70 -74	4,640	4,296	4.927	5.514	5.553
75+	3,661	3,895	4.901	5.559	5.123
<b>Jumlah</b>	<b>628,434</b>	<b>635,632</b>	<b>642.586</b>	<b>652.192</b>	<b>681.012</b>

Sumber: Disdukcapil Kota Serang, Tahun 2020

Jumlah penduduk Kota Serang yang wajib KTP sebanyak 465.794 jiwa, sebanyak 465.224 jiwa atau 99.88% sudah memiliki KTP. Sisanya sebanyak 570 jiwa belum memiliki KTP, jumlah tersebut tersebar pada setiap kecamatan, terlihat pada Tabel 1.5

**Tabel 1.5**  
**Jumlah Penduduk Kota Serang yang Memiliki KTP**  
**sampai Tahun 2020**

No.	Kecamatan	Wajib KTP	Memiliki KTP	%
1.	Cipocok Jaya	65,153	65.077	99.88
2.	Curug	39,349	39,290	99.85
3.	Kasemen	68,753	68,682	99,90
4.	Serang	160,233	160,060	99.87
5.	Taktakan	65,841	65.776	99.90
6.	Walantaka	66,466	66,379	99.87
	<b>Kota Serang</b>	<b>465.794</b>	<b>465.224</b>	<b>99.88</b>

Sumber: Disdukcapil Kota Serang, 2020

Perkembangan Kota Serang sebagai Ibukota Provinsi Banten berdampak pada heterogenitas jenis penduduknya, walaupun Kota Serang memiliki landasan paradigma dan perspektif agamis dalam menjalankan

visi dan misinya, namun tetap menghargai agama dan keyakinan lain yang diakui oleh negara. Toleransi dari keberagaman kehidupan beragama telah tumbuh di Kota Serang, hal ini ditandai dengan berdampingannya mayoritas pemeluk Islam di Kota Serang dengan pemeluk-pemeluk agama lain, komposisi penduduk pemeluk agama di Kota Serang pada tahun 2016-2020 terlihat pada Tabel 1.6

**Tabel 1.6**  
**Komposisi Penduduk Pemeluk Agama di Kota Serang**  
**Tahun 2016-2020**

No	Agama	2016	2017	2018	2019	2020
1.	Islam	615.956	622.666	629.291	638.474	666.611
2.	Kristen Protestan	6.781	7.203	7.651	8.003	8.530
3.	Kristen Katolik	2.939	2.999	2.930	2.934	3.045
4.	Hindu	256	257	261	246	273
5.	Budha	2.498	2.504	2.449	2.532	2.541
6.	Konghucu	-	-	-	2	11
7.	Kepercayaan	4	3	4	1	1
<b>JUMLAH</b>		<b>628.434</b>	<b>635.632</b>	<b>642.586</b>	<b>652.192</b>	<b>652.192</b>

Sumber: Disdukcapil Kota Serang, Tahun 2020

## E. PERTUMBUHAN EKONOMI

Pembangunan perekonomian Kota Serang telah dilakukan secara optimal yang ditunjukkan antara lain oleh indikator Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) dan capaian Laju Pertumbuhan Ekonomi (LPE). PDRB merupakan jumlah nilai tambah yang dihasilkan oleh seluruh unit usaha dalam suatu daerah tertentu atau merupakan jumlah nilai barang dan jasa akhir (neto) yang dihasilkan oleh seluruh unit ekonomi. Salah satu pendekatan dalam menghitung PDRB adalah menggunakan pendekatan produksi yang merupakan jumlah nilai tambah atas barang dan jasa yang dihasilkan oleh berbagai unit produksi di wilayah suatu daerah dalam jangka waktu tertentu. Unit-unit produksi tersebut dalam penyajiannya dikelompokkan menjadi 17 kategori sektor lapangan usaha.





Pengklasifikasian PDRB terbagi menjadi dua, yaitu PDRB atas dasar harga berlaku (ADHB) dan PDRB atas dasar harga konstan (ADHK). PDRB atas dasar harga berlaku menunjukkan kemampuan sumber daya ekonomi yang dihasilkan oleh suatu wilayah. Distribusi PDRB atas dasar harga berlaku menurut kategori atau sektor menunjukkan struktur perekonomian atau peranan setiap sektor ekonomi dalam suatu daerah. Sektor-sektor ekonomi yang mempunyai peranan besar menunjukkan basis perekonomian suatu daerah. Sedangkan PDRB atas dasar harga konstan berguna untuk menunjukkan Laju Pertumbuhan Ekonomi (LPE) secara keseluruhan maupun sektoral dari tahun ke tahun. Nilai PDRB yang besar juga menunjukkan kemampuan sumber daya ekonomi yang besar.

Berdasarkan data BPS 2020 pertumbuhan ekonomi Kota Serang menunjukkan angka yang fluktuatif sepanjang tahun 2016–2020. LPE pada tahun 2016 senilai 6,28%. Selanjutnya terjadi peningkatan di tahun 2017 dan pada tahun 2018 LPE Kota Serang senilai 6,59%. LPE pada tahun 2019 sedikit melambat (6,20%) dari tahun 2018 namun masih berhasil mencapai pertumbuhan di atas rata-rata pertumbuhan ekonomi provinsi yang hanya pada kisaran 5-6%. Tahun 2020 akibat pandemi Covid 19 yang mengakibatkan hampir semua sub sektor perekonomian mengalami penurunan sehingga LPE mengalami perlambatan yang sangat signifikan, bahkan nilai LPE Provinsi Banten dan Nasional pun mengalami kontraksi sangat tajam di triwulan 2 tahun 2020 hingga akhir tahun hanya mengalami sedikit perbaikan.

Tahun 2020 walaupun mengalami kontraksi, nilai laju pertumbuhan ekonomi Kota Serang lebih tinggi dibandingkan nilai LPE Provinsi Banten dan Nasional hal ini dipengaruhi oleh kontribusi dari sektor informasi dan komunikasi serta sektor pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang yang mengalami pertumbuhan sangat signifikan. Pada 4 triwulan Tahun 2020, dari 17 sub sektor PDRB hanya 3 sub sektor yang tidak mengalami kontraksi dan selalu bernilai positif pertumbuhannya yaitu :

pertanian, kehutanan dan perikanan, pengadaan air, serta informasi dan komunikasi.

Pembangunan perekonomian Kota Serang telah dilakukan secara optimal yang ditunjukkan antara lain oleh indikator Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) dan capaian Laju Pertumbuhan Ekonomi (LPE). Capaian PDRB atas dasar harga konstan (PDRB ADHK) Kota Serang pada Tahun 2020 sebesar Rp.22,52 triliun sedangkan nilai PDRB atas dasar harga berlaku (PDRB ADHB) pada Tahun 2020 sebesar Rp.31,58 triliun. Perkembangan nilai PDRB ADHB dan PDRB ADHK menurut kategori atau sektor lapangan usaha Kota Serang Tahun 2019-2020 terlihat pada (Tabel 1.7)

**Tabel 1.7**  
**Nilai & Kontribusi PDRB Kota Serang Tahun 2019-2020**  
**(dalam Juta Rupiah)**

SEKTOR	ADHK		ADHB	
	2019	2020	2019	2020
Pertanian, Kehutanan dan Perikanan	1.064.639,07	1.077.640.14	1.681.054.50	1.724.981.57
Pertambangan & Penggalian	1.394.68	1.339.73	1.990.31	1.951,46
Industri Pengolahan	1.065,416.91	1.064,608.62	1.394,817.01	1.415,284.54
Pengadaan Listrik dan Gas	30,108.59	26,555.77	55,226.65	48,480.97
Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	6,341.90	6,879.69	7,309.35	7,979.93
Konstruksi	3,944,657.63	3,792,788.31	6,116,457.44	5,901,557.24
Perdagangan Besar dan eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	6,738,754.08	6,531,138.37	8,875,586.20	8,764,930.91
Transportasi dan Pergudangan	1,084,331.32	1,025,946.66	1,531,925.10	1,480,452.40
Penyediaan akomodasi dan Makan Minum	1,444,101.13	1,388,108.94	1,981,057.41	1,919,477.45
Informasi dan Komunikasi	1,358,032.36	1,479,712.06	1,202,492.11	1,295,429.74
Jasa Keuangan dan Asuransi	661,028.37	701,210.04	946,893.68	1,025,760.75

SEKTOR	ADHK		ADHB	
	2019	2020	2019	2020
Real Estate	2,330,972.59	2,351,485.15	2,847,048.45	2,908,003.75
Jasa Perusahaan	200,837.80	190,916.42	299,573.40	289,160.00
Administrasi Pemerintahan, Pertanahan Dan Jaminan sosial Wajib	1,102,619,77	1,086,631.79	1,940,101.46	1,991,507.94
Jasa Pendidikan	872,187.51	880,822,17	1,411,049.98	1,458,792.34
Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	480,182.86	506,304.81	668,978.67	718,420.47
Jasa Lainnya	427,489.79	406,115.30	641,652.69	627,918.11
<b>Jumlah</b>	<b>22,813,096.37</b>	<b>22,518,203.96</b>	<b>31,604,214.39</b>	<b>31,580,089.58</b>

Sumber : BPS Kota Serang, Tahun 2020

Perekonomian Kota Serang ditunjang dari berbagai sektor, diantaranya perdagangan, jasa dan pariwisata. Laju Pertumbuhan Ekonomi (LPE) Kota Serang pada Tahun 2020 terkontraksi sebesar -1,29% dimana pencapaian tersebut sangat rendah dibandingkan Tahun 2019 yang mencapai 6,20%.

Kegiatan pertanian di Kota Serang Tahun 2020 meliputi produksi tanaman pangan, perikanan, peternakan, dan komoditi perkebunan. Banyaknya lahan pertanian produktif yang berada di daerah Kecamatan Kasemen merupakan salah satu bukti bahwa Kota Serang memiliki potensi pengembangan dalam bidang pertanian. Tahun 2020 tercatat bahwa produksi tanaman padi mencapai sebanyak 49.147 ton Gabah Kering Giling (GKG) dengan luas panen 8177 Ha, terlihat pada Tabel 1.8

**Tabel 1.8**  
**Luas Panen (Ha) dan Produksi (Ton) Tanaman Padi Tahun 2020**

No	Kecamatan	Luas Panen (Ha)	Produksi (Ton GKG)
1.	Cipocok Jaya	895	4.418
2.	Curug	1440	9.064
3.	Kasemen	605	3.177



4.	Serang	396	2.145
5.	Taktakan	716	3.408
6.	Walantaka	4.125.00	26.936
<b>Jumlah</b>		<b>8177</b>	<b>49.147</b>

Sumber : Dinas Pertanian Kota Serang, Tahun 2020

Selain dari itu, sektor perikanan di Kota Serang pada Tahun 2020 masih menghasilkan produksi ikan sebesar 2.147,93 ton dengan rincian untuk perikanan tangkapan sebesar 1.419,02 ton dan budidaya perikanan 728,91 ton. Pada sektor perkebunan, potensi yang masih dapat dikembangkan yaitu komoditi kelapa, kopi, cengkeh, lada, aren dan coklat untuk tanaman perkebunan, sedangkan untuk jenis buah-buahan diantaranya menghasilkan durian, pisang, sawo, mangga, pepaya, jambu air dan melon. Adapun pada sektor peternakan potensi yang ada adalah sapi potong, kerbau, kambing, dan domba untuk memenuhi kebutuhan konsumsi.

Tahun 2020 tidak banyak pembangunan sentra ekonomi di Kota Serang seperti tahun-tahun sebelumnya. Pemberlakuan PSBB selama pandemi menyebabkan banyaknya pusat perdagangan dan jasa baik dalam skala kecil ataupun besar dibatasi jam beroperasi bahkan ada pula yang tutup. Bisnis jasa perhotelan, restoran dan rumah makan di Kota Serang yang merupakan salah satu indikator terkait potensi pengembangan perdagangan dan jasa juga mengalami hal yang sama.

Pada awal diberlakukannya SFH dan WFH (pertengahan Maret 2020) oleh Pemerintah Kota Serang ternyata langsung berpengaruh pada tingkat okupansi kamar, sewa ruang rapat dan pendapatan usaha restoran/rumah makan. Okupansi hotel pada saat itu di kisaran 15-20% dan makin turun ketika di bulan ramadhan. Jika biasanya pada awal tahun banyak kegiatan OPD dilakukan di meeting room hotel atau restoran tiba-tiba berhenti total pada minggu ketiga bulan Maret. Minggu kedua Maret walaupun sudah ditetapkan WFH tetapi masih ada beberapa meeting yang tetap diadakan, aktifitas hotel dan restoran seperti tidak berpengaruh pandemi. Hal ini karena undangan kegiatan sudah terlanjur tersebar. Namun begitu meeting telah dilakukan dengan protokol kesehatan yang sangat ketat.





Tercatat bahwa hingga saat ini terdapat delapan pusat perdagangan modern/mall, serta sembilan pasar tradisional yang tersebar di Kota Serang. Keberadaan pasar/perdagangan modern tidak mengalahkan eksistensi dari keberadaan pasar-pasar tradisional yang ada di Kota Serang apalagi saat pandemi aktifitas jual beli masih tetap berjalan.

Usaha hotel dan restoran kembali menggeliat di masa new normal setelah dicabutnya kebijakan WFH dan OPD kembali diijinkan untuk melakukan kegiatan di luar kantor. Perekonomian akan mulai membaik ketika 25 hotel/penginapan dan restoran (baik dalam kategori restoran besar, sedang dan kecil) yang ada di Kota Serang dapat beroperasi seperti semula. Namun tentu dengan menjalankan protocol kesehatan yang ketat. Tumbuhnya usaha hotel dan restoran akan menjadi bukti perkembangan dan pertumbuhan ekonomi di Kota Serang pada *trend* yang positif. Dengan melihat pada kenyataan dan potensi yang ada, maka pengembangan perdagangan dan jasa di Kota Serang merupakan hal yang dapat ditingkatkan dan dioptimalkan kembali di masa mendatang.

Pengaruh iklim perekonomian nasional dan regional cukup terasa dampaknya terhadap perekonomian Kota Serang. Posisi Kota Serang yang menjadi salah satu titik pusat perekonomian wilayah di Provinsi Banten memiliki dampak positif bagi kemajuan ekonomi sekaligus juga memiliki dampak negatif berupa potensi inflasi yang mempengaruhi daya beli masyarakat. Fakta ini tampak dari tingkat inflasi di Kota Serang yang cenderung fluktuatif, yang menggambarkan besarnya pengaruh faktor eksternal ekonomi pada satu sisi serta lemahnya penyesuaian perekonomian daerah terhadap akibat faktor-faktor eksternal tersebut.

Pemerintah Kota Serang optimis para investor akan tertarik untuk menanamkan modalnya di Kota Serang. Data dari DPMPTSP Kota Serang mencantumkan nilai investasi di Kota Serang pada Tahun 2020 mencapai Rp.3.121,08 Milyar dengan jumlah proyek sebanyak 617 proyek dan mampu menyerap tenaga kerja sebanyak 3.800 orang seperti terlihat pada tabel 1.9 sebagai berikut:





**Tabel 1.9**  
**Perkembangan Investasi/Penanaman Modal Kota Serang**  
**Tahun 2016 -2020**

Uraian	Satuan	2016	2017	2018	2019	2020
Nilai Investasi	Milyar Rp	3.664,7	4.643,78	5.204,48	3.899,08	3.121,08
Jumlah Investor	Proyek	1.837	1.260	891	1.797	617
Daya Serap Tenaga Kerja	Orang	5.869	12.197	6.335	10.448	3.800

Sumber : DPMPTSP Kota Serang, Tahun 2020

## F. SUSUNAN PERANGKAT DAERAH

Susunan Perangkat Daerah Pemerintah Kota Serang berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah yang telah ditindaklanjuti dengan Peraturan Daerah Kota Serang Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Serang, sebagai berikut:

1. **Sekretariat Daerah**, terdiri dari unit kerja, yaitu :
  - a. Asisten Pemerintahan
  - b. Asisten Ekonomi Pembangunan dan Kesejahteraan Rakyat
  - c. Asisten Administrasi Umum
2. **Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah**
3. **Inspektorat**
4. **Dinas Daerah**, yaitu:
  - a. Dinas Kesehatan
  - b. Dinas Komunikasi dan Informatika
  - c. Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
  - d. Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
  - e. Dinas Sosial
  - f. Dinas Perhubungan
  - g. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
  - h. Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kota Serang;
  - i. Dinas Perdagangan, Industri dan Koperasi Usaha Kecil dan Menengah
  - j. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan





- k. Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi
  - l. Dinas Pariwisata, Kepemudaan dan Olah raga
  - m. Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana
  - n. Dinas Pertanian
  - o. Dinas Lingkungan Hidup Kota Serang;
  - p. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
- 5. Badan Daerah, yaitu:**
- a. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
  - b. Badan Pelayanan Pengadaan Barang/Jasa Kota Serang
  - c. Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah
  - d. Badan Penanggulangan Bencana Daerah
  - e. Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
- 6. Satuan Polisi Pamong Praja**
- 7. Sekretariat Korpri.**
- 8. Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik**
- 9. Kecamatan, yaitu :**
- a. *Kecamatan Serang*, mencakup Serang, Kelurahan Cipare, Kota Baru, Lontar Baru, Kagungan, Lopang, Unyur, Kali Gandu, Sumur Pecung, Cimuncang, Sukawana, Terondol dan Kelurahan Serang;
  - b. *Kecamatan Cipocok Jaya*, mencakup Kelurahan Dalung, Tembong, Karundang, Cipocok Jaya, Penancangan, Gelam, Banjar Sari dan Kelurahan Banjar Agung;
  - c. *Kecamatan Kasemen*, mencakup Kelurahan Kasunyatan, Margaluyu, Kasemen, Banten, Warung Jaud, Mesjid Priayi, Bendung, Sawah Luhur, Kilasah dan Kelurahan Terumbu;
  - d. *Kecamatan Curug*, mencakup Kelurahan Cilaku, Sukajaya, Kamanisan, Curug, Suka Laksana, Cipete, Sukawana, Curug Manis Tinggar dan Kelurahan Pancalaksana
  - e. *Kecamatan Walantaka*, mencakup Kelurahan Walantaka, Kepuren, Kalodran, Kiara, Nyapah, Tegal Sari, Pabuaran, Pagar Agung,

Pengampelan, Pipitan, Teritih, Pasuluhan, Cigoong dan Kelurahan Lebak Wangi;

- f. *Kecamatan Taktakan*, mencakup Kelurahan Taman Baru, Drangong, Panggungjati, Kuranji, Sepang, Sayar, Cilowong, Pancur, Kalanganyar, Taktakan, Umbul Tengah, Lialang dan Cibendung

## G. SUMBER DAYA APARATUR

Salah satu instrument penunjang pelaksanaan tugas dan fungsi Perangkat Daerah dalam penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan pemberdayaan masyarakat adalah aparatur dengan kuantitas dan kualitas yang memadai. Jumlah Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Kota Serang berdasarkan data dari Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Kota Serang Tahun 2020 sebanyak 4.224 orang yang terdiri dari laki-laki sebanyak 1.434 orang dan perempuan sebanyak 2.790 orang, sebagaimana table 1.10 berikut:

**Tabel 1.10**  
**Jumlah Pegawai Negeri Sipil**  
**Berdasarkan Jenis Kelamin Tahun 2020**

Ruang	Jenis Kelamin									
	Gol. I		Gol. II		Gol. III		Gol. IV		Jumlah	
	L	P	L	P	L	P	L	P	L	P
A	0	0	13	5	131	352	224	397	368	754
B	0	0	18	11	150	305	229	574	397	890
C	1	0	50	43	275	482	34	16	360	541
D	2	0	18	19	287	586	2	0	309	605
E							0	0	0	0
<b>Jumlah</b>	<b>3</b>	<b>0</b>	<b>99</b>	<b>78</b>	<b>853</b>	<b>1725</b>	<b>489</b>	<b>982</b>	<b>1.434</b>	<b>2.790</b>
<b>TOTAL</b>									<b>4.224</b>	

Sumber : BKPSDM Kota Serang, Tahun 2020

Sedangkan jumlah Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Kota Serang berdasarkan tingkat pendidikan sebagaimana tabel 1.11 berikut:

**Tabel 1.11**  
**Jumlah Pegawai Negeri Sipil**  
**Berdasarkan Tingkat Pendidikan Tahun 2020**

No.	Tingkat Pendidikan	Jumlah		%
		L	P	
1.	SD / Sederajat	2	0	0,05
2.	SLTP / Sederajat	15	0	0,36
3.	SLTA / Sederajat	79	58	3,24
4.	SLTA Kejuruan	10	12	0,52
5.	Diploma I	2	4	0,14
6.	Diploma II	35	54	2,11
7.	Diploma III	51	146	4,66
8.	Diploma IV	11	85	2,27
9.	Strata I	871	2088	70,05
10.	Strata II	351	342	16,41
11.	Strata III	7	1	0,19
<b>TOTAL</b>		<b>1434</b>	<b>2790</b>	<b>100</b>

Sumber : BKPSDM Kota Serang, Tahun 2020

Berdasarkan tabel di atas tingkat pendidikan Pegawai Negeri Sipil Kota Serang yang memperoleh pendidikan Strata 1 menduduki peringkat pertama dengan 70,05%, disusul pendidikan Strata II sebesar 16,41%.

## H. ISU STRATEGIS KOTA SERANG

Permasalahan dan isu-isu strategis daerah merupakan salah satu bagian terpenting dokumen pelaporan, karena menjadi dasar utama pada perumusan arah perencanaan yang akan menentukan kinerja pembangunan dalam tahun-tahun mendatang. Untuk menjamin konsistensi dan sinergitas pembangunan maka dalam perumusan permasalahan dan isu strategis Kota Serang perlu memperhatikan permasalahan dan isu strategis pemerintah pusat maupun Provinsi Banten.

Suatu analisis isu-isu strategis menghasilkan rumusan kebijakan yang bersifat antisipatif dan solutif atas berbagai kondisi yang tidak ideal di masa depan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dalam jangka menengah

dan panjang. Sedangkan pada sisi lain, permasalahan pembangunan daerah menggambarkan kinerja daerah atau kondisi masyarakat yang belum ideal. Dengan demikian, rumusan tentang permasalahan pembangunan dan isu strategis merupakan bagian penting dalam penentuan kebijakan rencana pembangunan Kota Serang.

Atas dasar penelaahan terhadap dokumen-dokumen perencanaan nasional, Provinsi Banten dan Kota Serang, maka isu strategis Kota Serang adalah sebagai berikut :

1. Perkembangan demografi dan letak geografis Kota Serang

Sebagai ibu kota Provinsi Banten serta berada pada lintasan antar kota di wilayah Provinsi Banten dan lintasan antar Jawa-Sumatera, Kota Serang berpotensi menarik minat pendatang untuk tinggal di Kota Serang yang akan berpengaruh tidak hanya terhadap pertumbuhan penduduk, namun juga mempengaruhi kehidupan social ekonomidan lingkungan, khususnya dalam peningkatan perekonomian masyarakat dan daerah, serta upaya penyediaan infrastruktur dasar.

2. Kota Metropolitan Serang

Pembangunan Kota Metropolitan Serang menjadi bagian dari kebijakan Pemerintah Provinsi Banten Tahun 2017-2022 yang akan menjadikan Kota Serang yang lebih maju, cerdas dan berkelanjutan. Untuk membangun Kota Metropolitan Serang perlu upaya pembangunan menyeluruh yaitu pembangunan sumber daya manusia, tata kelola pemerintahan, dan pemenuhan infrastruktur wilayah, hal ini diperlukan dalam upaya mengurangi dampak yang kurang baik dari pembangunan Kota Metropolitan Serang. Namun demikian diyakini apabila pembangunan Kota Metropolitan Serang nantinya dapat meningkatkan daya saing Kota Serang di segala sektor pembangunan.

3. Kualitas sumberdaya manusia dan kesejahteraan masyarakat

Peningkatan kualitas sumberdaya manusia dan kesejahteraan masyarakat berfokus pada pembangunan pendidikan dan kesehatan, pengurangan kemiskinan dan pengangguran, dan penanggulangan



permasalahan sosial yang masih menjadi permasalahan pembangunan di Kota Serang.

4. Daya saing perekonomian daerah

Peningkatan daya saing perekonomian daerah Kota Serang dimaksudkan untuk menjadikan Kota Serang memiliki keunggulan kompetitif dan keunggulan komparatif dengan daerah lain ataupun dalam menghadapi tantangan perekonomian regional, nasional dan global. Upaya peningkatan daya saing perekonomian daerah Kota Serang dilakukan melalui optimalisasi pemanfaatan sektor potensial, yaitu Pariwisata, Budaya, Perdagangan dan Jasa, UKM dan Koperasi, Pertanian, Ketahanan Pangan, Ekonomi kreatif, dan Investasi dengan peningkatan pengelolaan BUMD untuk pelayanan publik dan peningkatan potensi PAD. Selain itu, peningkatan daya saing perekonomian daerah dapat dicapai dengan penguatan fungsi kelitbangan dan sistem inovasi daerah yang berdaya guna dan berhasil guna.

5. Infrastruktur wilayah

Peningkatan infrastruktur wilayah untuk memenuhi kebutuhan dasar dan kenyamanan masyarakat Kota Serang, yaitu peningkatan konektivitas wilayah (jalan dan jembatan), penanganan sampah, kemacetan, titik banjir dan/atau genangan air, drainase dan irigasi serta sarana prasarana perumahan dan permukiman.

6. Pengelolaan tata ruang, lingkungan hidup dan mitigasi bencana

Pengelolaan tata ruang, lingkungan hidup dan mitigasi bencana dalam kerangka penataan Kota Serang yang berkelanjutan serta antisipasi terhadap potensi bencana dan perkembangan pengelolaan tata ruang wilayah.

7. Tata kelola pemerintahan dan reformasi birokrasi

Tata kelola pemerintahan dan reformasi birokrasi diarahkan pada rangka peningkatan pelayanan publik dan *e-government* dalam upaya memenuhi harapan dan ekspektasi masyarakat atas pelayanan publik serta pemerintahan yang baik dan bersih.



**BAB  
02**

**PERENCANAAN DAN  
PERJANJIAN KINERJA**

**A. RENCANA STRATEGIS TAHUN 2018 – 2023**

**R**encana Pembangunan Jangka Menengah daerah (RPJMD) Kota Serang Tahun 2018-2023 telah ditetapkan melalui Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2019 sebagai dokumen perencanaan 5 (lima) tahun. Dokumen RPJMD merupakan hasil dari perencanaan yang dibahas secara bersama oleh Kepala Daerah, Wakil Kepala Daerah, Pemangku kepentingan, tokoh agama, tokoh masyarakat dan warga Kota Serang secara umum, serta merupakan penjabaran dari visi dan misi pimpinan daerah terpilih, tujuan, sasaran, strategi dan kebijakan, program dan kegiatan pembangunan daerah.

Perencanaan pembangunan daerah yang dirumuskan secara terarah, efektif dan berkesinambungan dan diimplementasikan secara bertahap sesuai dengan skala prioritas dan kemampuan anggaran daerah. Perumusan perencanaan sebagai penjabaran RPJMD tertuang dalam dokumen Rencana Strategis (Renstra) yang disusun untuk 5 (lima) tahun. Renstra merupakan proses perencanaan yang berorientasi pada hasil yang ingin dicapai selama kurun waktu tertentu berisi visi, misi, tujuan, sasaran, dan strategi yang dilaksanakan melalui kebijakan dan program Kepala Daerah.

Sesuai dengan RPJMD Tahun 2018-2023, Kota Serang memiliki visi, yaitu :

**1. VISI**

Berdasarkan kondisi Kota Serang, serta peluang, tantangan dan isu strategis yang akan dihadapi dalam 5 (lima) tahun mendatang, Walikota dan Wakil Walikota membuat Visi Kota Serang Tahun 2018 – 2023, sebagaimana tertuang dalam Peraturan Daerah Kota Serang Nomor 3 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Serang Tahun 2018 – 2023 sebagai berikut:



## ”TERWUJUDNYA KOTA PERADABAN YANG BERDAYA DAN BERBUDAYA”

Visi tersebut menggambarkan bahwa Kota Serang sebagai Kota **Peradaban** (*Civil Society*) yaitu kondisi pemerintahan dan masyarakat Kota Serang yang berciri:

1. Adanya toleransi (tenggang rasa) untuk tujuan kerukunan dan kedamaian;
2. Adanya pluralism yaitu sikap yang mau menerima dengan tulus ikhlas suatu kondisi warga Kota Serang yang majemuk.
3. Adanya keadilan sosial, bermakna setiap warga negara mendapatkan hak dan kewajibannya secara seimbang dalam kehidupan sosial, terjamin keadilan untuk memperoleh pendidikan, kesehatan dan penghidupan yang layak;
4. Adanya partisipasi sosial, yaitu setiap warga negara berhak dan berkewajiban untuk ikut serta dalam berpolitik dengan rasa tanggung jawab secara bersih tanpa adanya paksaan atau intimidasi dari pihak manapun;
5. Adanya demokratisasi yaitu sebuah proses dalam menegakkan prinsip-prinsip demokrasi demi terciptanya warga Kota Serang yang menjunjung tinggi azas-azas demokrasi;
6. Adanya supremasi hukum, ditandai penegakan hukum yang seadil-adilnya terhadap warga Kota Serang tanpa pandang bulu, tidak tumpul ke atas tajam ke bawah;
7. Tersedianya ruang bebas publik, sebagai tempat bagi warga Kota Serang untuk melakukan aktivitas publiknya secara bebas dan bertanggung jawab seperti dalam hal berorganisasi, berserikat, berkumpul dan menyatakan pendapat termasuk mempublikasikannya kepada publik tanpa adanya tekanan dari pihak manapun.

Kota Berdaya, mengandung arti bahwa Kota Serang mampu menunjukkan keunggulan berkomparasi dan berkompetisi diberbagai bidang kehidupan. Kota Serang akan menjadi Kota Peradaban yang didukung oleh kondisi perkotaan yang kondusif dan modern dengan tetap memperhatikan lingkungan berkelanjutan demi kemajuan Kota Serang.



Kota **Berbudaya**, mempunyai arti bahwa setiap perilaku kehidupan masyarakat yang dilandasi oleh etos kerja, tata cara, adat istiadat, tradisi, kearifan lokal, norma yang hidup dan berkembang dalam masyarakat serta diyakini sebagai nilai-nilai budi pekerti yang luhur yang diwujudkan dalam perilaku interaksi sosial sebagai identitas penyelenggaraan pemerintahan dan pelaksanaan pembangunan.

Kota Serang sebagai ibukota Provinsi Banten diharapkan menjadi kota peradaban yang berdaya, baik sektor sumber daya manusia, pemerintahan, dan pembangunannya. Kota yang memiliki kehandalan daya saing dan maju dalam pendidikan, perdagangan dan jasa, dengan dukungan infrastuktur yang memadai serta tetap menjadi daerah yang kondusif untuk meningkatkan kesejahteraan warganya dengan dukungan pengembangan politik, keamanan, sosial, ekonomi, dan budaya. Harapan kedepan masyarakat Kota Serang senantiasa menjunjung tinggi nilai-nilai agama, etos kerja, tata cara, adat istiadat, tradisi, norma kearifan lokal yang hidup dan berkembang yang diyakini sebagai nilai-nilai yang luhur yang diwujudkan dalam perilaku interaksi sosial serta sadar menggunakan hak dan kewajibannya sesuai dengan peraturan perundangan.

Harapan kedepan Kota Serang dapat mewujudkan kehidupan pemerintahan dan kemasyarakatan yang teratur, sejahtera dan didukung oleh aktivitas ekonomi utama berupa perdagangan, jasa, industri pengolahan, pertanian, perikanan dan pariwisata serta ditunjang oleh standar pelayanan kota menuju kondisi lingkungan yang aman, tentram, nyaman, lancar, asri, sehat dan berkelanjutan.

Untuk memberikan arahan dalam pencapaian visi, maka visi dijabarkan ke dalam fokus kerja yang disebut dengan **Peradaban**, yang merupakan akronim dari:

- 1) Kota Serang yang **Partisipatif** adalah kondisi terwujudnya kesatuan pola pikir dan pola tindak dilandasi sikap kebersamaan untuk menyelenggarakan tugas pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan Kota Serang secara baik, benar, dan bertanggung jawab oleh Pemerintah Kota Serang, dunia





usaha, dan warga Kota Serang sehingga terwujud pemerintahan yang baik dan Pemerintah yang Bersih (*Good Governance dan Clean Government*).

- 2) Kota Serang yang **Edukatif** dimaknai sebagai peningkatan kualitas kehidupan pendidikan dan kependidikan warga Kota Serang secara lebih adil dan merata sehingga memiliki kecerdasan yang memadai, mampu mengatasi masalah pribadi dan sosial dan menggambarkan kemajuan yang tercermin dalam keseluruhan aspek kehidupan, dalam kelembagaan, pranata-pranata, dan nilai-nilai yang mendasari kehidupan politik, ekonomi, sosial, budaya dan pertahanan dan keamanan.
- 3) Kota Serang yang **Religius** dimaknai sebagai kondisi warga Kota Serang yang konsisten mematuhi pesan nabi dan pemimpin yang taat pada nilai ketauhidan, yaitu mematuhi pesan agama dan berpegang teguh pada nilai-nilai moral Bangsa Indonesia sehingga dapat dicapai kemakmuran dunia dan akhirat yang hakiki.
- 4) Kota Serang yang **Akuntabel** adalah kondisi kebudayaan pemerintahan dan warga Kota Serang yang bertanggung jawab terhadap apa yang harus dan akan dilakukan sesuai peran masing-masing serta siap menerima resiko atas perbuatannya sehingga terwujud karakter setiap warga masyarakat Kota Serang, aparatur sipil negara, aparatur pemerintahan negara Republik Indonesia di Kota Serang yang lainnya bertanggung jawab terhadap diri sendiri, lingkungan alam dan sosial, serta terhadap Tuhan Yang Maha Kuasa.
- 5) Kota Serang yang **berDaya** saing adalah suatu kondisi lingkungan institusi dan masyarakat Kota Serang yang memiliki keunggulan comparative (*comparative advantage*) dan keunggulan kompetitif (*competitive advantage*) dalam adaptasi menghadapi tantangan dan memanfaatkan peluang perkembangan dunia global, pemberlakuan Masyarakat Ekonomi Asean (MEA), dan Nasional.
- 6) Kota Serang yang **berBudaya** adalah kondisi lingkungan fisik kota dan lingkungan warga Kota Serang yang tertata, teratur, rapih, indah, taat azas dan tata aturan berdasarkan kesadaran akal sehat sehingga tercipta budaya dan kebudayaan yang melekat pada setiap warga negara dan tercipta





hubungan harmonis dalam bermasyarakat, berbangsa, bernegara dan beragama.

- 7) Kota Serang yang **Aman** dimaknai sebagai kondisi warga Kota Serang yang tidak terganggu oleh sikap dan perbuatan yang dapat merugikan secara fisik dan psikis sehingga bebas untuk beraktifitas memenuhi kebutuhan dalam berbagai aspek (*self-help*) secara bertanggung jawab, mampu mengambil keputusan dan tindakan dalam penanganan masalahnya, dan mampu merespon dan berkontribusi terhadap upaya pembangunan dan tantangan zaman secara otonom dengan mengandalkan potensi dan sumber daya yang dimiliki.
- 8) Kota Serang yang **Nyaman** adalah suatu keadaan kehidupan warga Kota Serang telah terpenuhinya kebutuhan dasar manusia meliputi ketentraman (suatu kepuasan yang meningkatkan penampilan sehari-hari) dan kelegaan (karena terpenuhinya kebutuhan sehari-hari) serta *transcendental* (keadaan yang melampaui pengalaman biasa dan penjelasan ilmiah).

## 2. MISI

Untuk mewujudkan Visi Walikota dan Wakil Walikota ditetapkan 4 (empat) Misi Pembangunan Daerah sebagai berikut:

- 1) **Menguatkan peradaban berbasis nilai nilai kemanusiaan**, dengan meningkatkan kualitas sumber daya manusia melalui pembangunan bidang pendidikan, kesehatan dan kebudayaan dalam rangka mewujudkan sumber daya manusia yang sehat, cerdas, dan berbudaya.
- 2) **Meningkatkan Sarana Prasarana Daerah yang berwawasan Lingkungan**, dengan memantapkan penataan kota, membangun infrastruktur dasar wilayah, melalui manajemen perencanaan ruang kota yang memperhatikan daya dukung, daya tampung lingkungan hidup dan kelestariannya.
- 3) **Meningkatkan perekonomian daerah dan pemberdayaan masyarakat yang berdaya saing**, dengan menciptakan pertumbuhan ekonomi yang berkualitas dan inklusif berbasis potensi keunggulan lokal daerah yang



ditandai dengan pertumbuhan ekonomi yang tinggi dan merata, meningkatkan produktivitas, mengurangi tingkat kemiskinan, mengurangi ketimpangan pendapatan, menurunkan tingkat pengangguran dan memperluas lapangan kerja, melalui peningkatan daya saing daerah.

- 4) **Meningkatnya tata kelola pemerintahan yang baik**, dengan menghadirkan pemerintahan yang merakyat dan memiliki semangat perubahan yang didukung oleh teknologi informasi komunikasi (TIK) sebagai penggerak birokrasi yang efektif, efisien, bersih dan bertanggungjawab, membangkitkan partisipasi warga kota serang, dalam upaya meningkatkan pelayanan publik yang prima.

Fokus kerja tersebut memberi arahan kepada Perangkat Daerah agar melaksanakan program dan kegiatan untuk mendukung ketercapaian visi dan misi. Pencapaian visi dan misi selanjutnya juga didasarkan pada pola berpikir dan bekerja dengan konsep *Think Globally Act Locally*, dimana seluruh pelaku kepentingan pembangunan di Kota Serang diharapkan akan berpikir dan bertindak secara kreatif dan berkelanjutan dengan tetap memperhatikan ciri khas, nilai-nilai luhur dan potensi sumber daya lokal yang dimiliki oleh masyarakat Kota Serang namun dengan orientasi hasil yang berskala regional, nasional atau internasional

Dalam rangka mewujudkan visi dan misi tersebut diatas, Walikota dan Wakil Walikota Serang menumbuhkan semangat baru dalam pelaksanaan pembangunan yang berlandaskan nilai dasar Bangsa Indonesia dan masyarakat Kota Serang khususnya, yakni kegotongroyongan. Semangat baru tersebut tertuang dalam slogan:

### **”Aje Kendor Membangun Serang”**

Makna slogan **Aje Kendor Membangun Serang** diartikan satu sikap yang terwujud dalam bentuk inisiatif dan penuh semangat untuk menyumbangkan tenaga dan pikiran dalam rangka membangun Kota Serang. Aje kendor juga dimaknai sebagai sikap untuk menumbuhkan kesadaran dan kecintaan aparatur negara dan masyarakat dalam membangun Kota Serang.



Melalui pernyataan ini akan timbul sikap kepeloporan, sinergi dan kolaborasi untuk menjaga dan melakukan inovasi serta kreativitas dalam membangun kota dengan tidak meninggalkan budaya dan karakter lokal.

Slogan ini memberikan motivasi kepada aparatur atau pegawai dilingkungan Kota Serang untuk selalu mengedepankan pelayanan secara optimal kepada masyarakat, sehingga masyarakat dapat merasakan kenyamanan, kecepatan dan kepuasan pelayanan dan peningkatan pembangunan dan dalam menjalankan kehidupan sehari-hari terutama berkaitan dengan pelayanan langsung yang dilaksanakan oleh pemerintah daerah di segala bidang.

### 3. TUJUAN DAN SASARAN

Berdasarkan Visi dan Misi Pembangunan Daerah Kota Serang Tahun 2018 – 2023 ditetapkan 5 (lima) tujuan dan 10 (sepuluh) sasaran, yaitu sebagai berikut:

Tujuan 1 : Terwujudnya sumber daya manusia yang sehat, cerdas dan berbudaya, dengan indikator Indeks Pembangunan Manusia dengan target 73,92 poin

Sasaran 1:

Meningkatnya derajat pendidikan masyarakat, dengan indikator:

- a. Rata-rata Lama Sekolah dengan target 8,68 tahun
- b. Harapan Lama Sekolah dengan target 12,77 tahun

Sasaran 2:

Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat, dengan indikator Usia Harapan Hidup dengan target 68,75 tahun

Sasaran 3:

Terkendalinya kuantitas, kualitas dan mobilitas pertumbuhan penduduk dengan indikator Laju Pertumbuhan Penduduk dengan target 1,00 %

Tujuan 2 : Terpenuhinya infrastruktur daerah yang berorientasi pada peningkatan pembangunan wilayah, dengan indikator Indeks Kepuasan Layanan Infrastruktur (IKLI) Daerah, dengan target 70,00 poin



Sasaran 4:

Meningkatnya ketersediaan dan kualitas infrastruktur wilayah, dengan indikator Tingkat Kemantapan Infrastruktur wilayah dengan target 83 %

Sasaran 5:

Menurunnya luasan kawasan kumuh, dengan indikator Persentase Kawasan Kumuh dengan target 1,07 %

Sasaran 6:

Menurunnya kemacetan lalu lintas, dengan indikator Persentase Potensi Titik Kemacetan dengan target 12 %

Tujuan 3 : Terwujudnya kualitas lingkungan hidup dalam menjamin pembangunan berkelanjutan, dengan indikator Indeks Kualitas Lingkungan Hidup dengan target 51,30 poin

Sasaran 7:

Meningkatnya kualitas pengelolaan lingkungan hidup, dengan indikator:

- a. Indeks Kualitas Mutu Udara dengan target 48 poin
- b. Indeks Kualitas Mutu Air dengan target 71 poin
- c. Indeks Kualitas Mutu Tutupan Lahan dengan target 39 poin

Sasaran 8:

Meningkatnya mitigasi dan penanggulangan bencana, dengan indikator cakupan penanggulangan bencana dengan target 100 %

Tujuan 4 : Tercapainya pertumbuhan ekonomi daerah yang berkualitas dan inklusif berbasis potensi keunggulan lokal daerah, dengan indikator Laju Pertumbuhan Ekonomi dengan target 6,91 %

Sasaran 9:

Meningkatnya perekonomian daerah dan daya beli masyarakat, dengan indikator:

- a. Tingkat inflasi daerah, dengan target 3 – 5 %



- b. Indeks daya beli, dengan target 83,61 poin
- c. PDRB per Kapita, dengan target 52,50 juta rupiah
- d. Indeks Ketimpangan Regional Wiliamson, dengan target 0,50 poin
- e. Angka kemiskinan, dengan target 4,86 %
- f. Tingkat Pengangguran Terbuka, dengan target 7,93 %

Tujuan 5 : Terwujudnya tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih serta layanan publik yang prima berbasis teknologi informasi, dengan indikator Indeks Reformasi Birokrasi Daerah dengan target 80,00 poin

Sasaran 10:

Meningkatnya kualitas dan akuntabilitas pelayanan publik dan penyelenggaraan pemerintahan daerah, dengan indikator:

- a. Indeks Kepuasan Masyarakat, dengan target 81 poin
- b. Nilai LPPD Kota, dengan target Sangat Tinggi
- c. Hasil Evaluasi AKIP, dengan target BB
- d. Hasil LKPD, dengan target WTP



**Tabel 2.1**  
**Matriks Hubungan antara Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran**  
**Pembangunan Kota Serang**

<b>Visi: TERWUJUDNYA KOTA PERADABAN YANG BERDAYA DAN BERBUDAYA</b>			
<b>Tujuan</b>		<b>Sasaran</b>	
<b>Uraian</b>	<b>Indikator Kinerja</b>	<b>Uraian</b>	<b>Indikator Kinerja</b>
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>
<b>Misi 1 : Memperkuat Peradaban yang Berbasis Nilai-Nilai Kemanusiaan</b>			
Terwujudnya sumber daya manusia yang sehat, cerdas dan berbudaya	Indeks Pembangunan Manusia	a. Meningkatnya derajat pendidikan masyarakat	Rata-rata Lama Sekolah
			Harapan Lama Sekolah
		b. Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat	Usia Harapan Hidup
		c. Terkendalinya kuantitas, kualitas dan mobilitas pertumbuhan penduduk	Laju Pertumbuhan Penduduk
<b>Misi 2 : Meningkatkan Sarana Prasarana Daerah Yang Berwawasan Lingkungan</b>			
1. Tenuhinya infrastruktur daerah yang berorientasi pada peningkatan pembangunan wilayah	Indeks Kepuasan Layanan Infrastruktur (IKLI) Daerah	a. Meningkatnya ketersediaan dan kualitas infrastruktur wilayah	Tingkat Kemantapan Infrastruktur wilayah
		b. Menurunnya luasan kawasan kumuh	Persentase kawasan kumuh



Tujuan		Sasaran	
Uraian	Indikator Kinerja	Uraian	Indikator Kinerja
1	2	3	4
		c. Menurunnya kemacetan lalu lintas	Persentase potensi titik kemacetan
2. Terwujudnya kualitas lingkungan hidup dalam menjamin pembangunan berkelanjutan	Indeks kualitas lingkungan hidup	a. Meningkatnya kualitas pengelolaan lingkungan hidup	a. Indeks kualitas mutu udara
			b. Indeks kualitas mutu air
			c. Indeks kualitas mutu tutupan lahan
		b. Meningkatnya mitigasi dan penanggulangan bencana	Cakupan penanggulangan bencana
<b>Misi 3 : Meningkatkan Perekonomian Daerah Dan Pemberdayaan Masyarakat Yang Berdaya Saing</b>			
Tercapainya pertumbuhan ekonomi daerah yang berkualitas dan inklusif berbasis potensi keunggulan lokal daerah	Laju Pertumbuhan Ekonomi	Meningkatnya perekonomian daerah dan daya beli masyarakat	a. Tingkat Inflasi Daerah
			b. Indeks daya beli
			c. PDRB per kapita
			d. Indeks Ketimpangan Regional Williamson
			e. Angka Kemiskinan



Tujuan		Sasaran	
Uraian	Indikator Kinerja	Uraian	Indikator Kinerja
1	2	3	4
			f. Tingkat Pengangguran Terbuka
<b>Misi 4 : Meningkatkan Tata Pemerintahan yang Baik</b>			
Terwujudnya tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih serta layanan publik yang prima berbasis teknologi informasi	Indeks Reformasi Birokrasi Daerah	Meningkatnya kualitas dan akuntabilitas pelayanan publik dan penyelenggaraan pemerintahan daerah	a. Indeks Kepuasan Masyarakat
			b. Nilai LPPD Kota
			c. Hasil Evaluasi AKIP
			d. Hasil LKPD

#### 4. STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

Untuk mencapai Visi Pemerintah Kota Serang Tahun 2018 – 2023, digunakan 38 (tiga puluh delapan) strategi sebagai berikut:

- 1) Peningkatan akses dan kualitas pendidikan melalui penyelenggaraan pendidikan dasar, pendidikan usia dini dan pendidikan kesetaraan
- 2) Peningkatan pembinaan kepemudaan dan keolahragaan masyarakat
- 3) Peningkatan akses dan kualitas pengelolaan perpustakaan
- 4) Peningkatan kualitas dan implementasi seni budaya lokal
- 5) Pengembangan wawasan kebangsaan dan pendidikan politik masyarakat
- 6) Peningkatan akses dan mutu pelayanan kesehatan masyarakat
- 7) Penyelenggaraan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak
- 8) Pengendalian pertumbuhan penduduk serta pelayanan keluarga berencana dan ketahanan keluarga



- 9) Peningkatan infrastruktur bidang pekerjaan umum berupa peningkatan fasilitas umum dan gedung pemerintahan, jalan dan jembatan, saluran drainase/gorong-gorong, jaringan irigasi dan jaringan pengairan lainnya
- 10) Peningkatan infrastruktur dan layanan teknologi informasi komunikasi penunjang implementasi smart city Kota Serang
- 11) Peningkatan pengelolaan, pembangunan, pemeliharaan dan pengendalian perumahan dan permukiman
- 12) Peningkatan pengendalian lalu lintas, pelayanan angkutan dan pembangunan prasarana dan fasilitas perhubungan
- 13) Penataan dan peneraan perlindungan pengelolaan lingkungan hidup, pengendalian pencemaran, dan pengelolaan persampahan
- 14) Peningkatan penataan dan pengendalian ruang sesuai rencana tata ruang
- 15) Peningkatan pencegahan dan kesiapsiagaan bencana, darurat bencana, serta perencanaan pemulihan pasca bencana
- 16) Peningkatan fasilitasi kebijakan untuk mendorong peningkatan daya saing perekonomian daerah melalui optimalisasi potensi ekonomi daerah
- 17) Peningkatan kualitas kelembagaan koperasi, pemberdayaan dan pengembangan UMKM
- 18) Peningkatan pertumbuhan perdagangan, stabilitas harga dan pasokan, serta pengelolaan pasar
- 19) Pengembangan dan pembinaan usaha, peningkatan kuantitas dan kualitas produksi, serta penguatan jaringan cluster industri
- 20) Peningkatan produksi, bina usaha dan pemasaran hasil pertanian, perkebunan, peternakan dan perikanan
- 21) Peningkatan pemantapan ketahanan pangan daerah
- 22) Pengembangan destinasi, sumber daya dan promosi pariwisata
- 23) Peningkatan investasi daerah melalui peningkatan daya saing, pengendalian dan pengawasan penanaman modal
- 24) Peningkatan penanganan dan pemberdayaan sosial bagi PMKS, serta penguatan kelembagaan kesejahteraan sosial



- 25) Peningkatan perluasan kesempatan kerja dengan peningkatan kualitas dan produktivitas tenaga kerja, penempatan tenaga kerja, dan pembinaan hubungan industrial dan peningkatan jaminan sosial
- 26) Peningkatan fasilitasi kebijakan untuk mendorong kualitas administrasi dan kelembagaan pemerintahan daerah
- 27) Peningkatan pelayanan e-government, informasi publik dan penyediaan data statistik melalui pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi
- 28) Peningkatan sistem layanan pengadaan barang dan jasa melalui pembinaan, penyediaan data dan informasi pengadaan barang dan jasa pemerintah
- 29) Peningkatan pelayanan pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil, pengelolaan informasi administrasi kependudukan, pemanfaatan data dan inovasi pelayanan kependudukan
- 30) Peningkatan cakupan dan kualitas pelayanan perijinan yang prima dan responsif
- 31) Peningkatan pelayanan dan kapasitas lembaga perwakilan rakyat daerah untuk mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD
- 32) Peningkatan kapasitas dan kompetensi aparatur, dan kualitas pelayanan administrasi kepegawaian
- 33) Peningkatan sistem pengawasan internal dan pengendalian pelaksanaan kebijakan kepala daerah
- 34) Pengelolaan perencanaan dan pengendalian pembangunan yang berkualitas
- 35) Optimalisasi penelitian dan pengembangan kebijakan strategi dan inovasi daerah guna mencapai perencanaan pembangunan yang berkualitas
- 36) Peningkatan akuntabilitas penyusunan dan pengelolaan keuangan dan barang milik daerah
- 37) Penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum, serta peningkatan kesiagaan dan pencegahan bahaya kebakaran
- 38) Penyelenggaraan pemerintahan umum kecamatan, pelayanan publik, pemberdayaan masyarakat dan penyediaan sarana dan prasarana infrastruktur kecamatan dan kelurahan



Adapun hubungan antara Misi, Tujuan, Sasaran dan Strategi Pembangunan Kota Serang dapat dilihat dalam matriks sebagai berikut:

**Tabel 2.2**  
**Matriks Hubungan antara Misi, Tujuan, Sasaran dan Strategi**  
**Pembangunan Kota Serang**

Tujuan	Sasaran	Strategi
1	2	3
<b>Misi 1 : Menguatkan Peradaban yang Berbasis Nilai-Nilai Kemanusiaan</b>		
Terwujudnya sumber daya manusia yang sehat, cerdas dan berbudaya	1. Meningkatnya derajat pendidikan masyarakat	a. Peningkatan akses dan kualitas pendidikan melalui penyelenggaraan pendidikan dasar, pendidikan usia dini dan pendidikan kesetaraan
		b. Peningkatan pembinaan kepemudaan dan keolahragaan masyarakat
		c. Peningkatan akses dan kualitas pengelolaan perpustakaan
		d. Peningkatan kualitas dan implementasi seni budaya local
		e. Pengembangan wawasan kebangsaan dan pendidikan politik masyarakat
	2. Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat	a. Peningkatan akses dan mutu pelayanan kesehatan masyarakat
		b. Penyelenggaraan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak
	3. Terkendalinya kuantitas, kualitas dan mobilitas pertumbuhan penduduk	Pengendalian pertumbuhan penduduk serta pelayanan keluarga berencana dan ketahanan keluarga



Tujuan	Sasaran	Strategi
1	2	3
<b>Misi 2 : Meningkatkan Sarana Prasarana Daerah Yang Berwawasan Lingkungan</b>		
1. Tepenuhinya infrastruktur daerah yang berorientasi pada peningkatan pembangunan wilayah	1. Meningkatnya ketersediaan dan kualitas infrastruktur wilayah	a. Peningkatan infrastruktur bidang pekerjaan umum berupa peningkatan fasilitas umum dan gedung pemerintahan, jalan dan jembatan, saluran drainase/gorong-gorong, jaringan irigasi dan jaringan pengairan lainnya b. Peningkatan infrastruktur dan layanan teknologi informasi komunikasi penunjang implementasi smart city Kota Serang
	2. Menurunnya luasan kawasan kumuh	Peningkatan pengelolaan, pembangunan, pemeliharaan dan pengendalian perumahan dan permukiman
	3. Menurunnya kemacetan lalu lintas	Peningkatan pengendalian lalu lintas, pelayanan angkutan dan pembangunan prasarana dan fasilitas perhubungan
2. Terwujudnya kualitas lingkungan hidup dalam menjamin pembangunan berkelanjutan	1. Meningkatnya kualitas pengelolaan lingkungan hidup	a. Penataan dan penataan perlindungan pengelolaan lingkungan hidup, pengendalian pencemaran, dan pengelolaan persampahan b. Peningkatan penataan dan pengendalian ruang sesuai rencana tata ruang
	2. Meningkatnya mitigasi dan penanggulangan bencana	Peningkatan pencegahan dan kesiapsiagaan bencana, darurat bencana, serta perencanaan pemulihan pasca bencana
<b>Misi 3 : Meningkatkan Perekonomian Daerah Dan Pemberdayaan Masyarakat Yang Berdaya Saing</b>		
Tercapainya pertumbuhan ekonomi daerah yang berkualitas dan inklusif berbasis potensi keunggulan lokal daerah	Meningkatnya perekonomian daerah dan daya beli masyarakat	a. Peningkatan fasilitasi kebijakan untuk mendorong peningkatan daya saing perekonomian daerah melalui optimalisasi potensi ekonomi daerah
		b. Peningkatan kualitas kelembagaan koperasi, pemberdayaan dan pengembangan UMKM



Tujuan	Sasaran	Strategi
1	2	3
		<p>c. Peningkatan pertumbuhan perdagangan, stabilitas harga dan pasokan, serta pengelolaan pasar</p> <p>d. Pengembangan dan pembinaan usaha, peningkatan kuantitas dan kualitas produksi, serta penguatan jaringan cluster industry</p> <p>e. Peningkatan produksi, bina usaha dan pemasaran hasil pertanian, perkebunan, peternakan dan perikanan</p> <p>f. Peningkatan pemantapan ketahanan pangan daerah</p> <p>g. Pengembangan destinasi, sumber daya dan promosi pariwisata</p> <p>h. Peningkatan investasi daerah melalui peningkatan daya saing, pengendalian dan pengawasan penanaman modal</p> <p>i. Peningkatan penanganan dan pemberdayaan sosial bagi PMKS, serta penguatan kelembagaan kesejahteraan sosial</p> <p>j. Peningkatan perluasan kesempatan kerja dengan peningkatan kualitas dan produktivitas tenaga kerja, penempatan tenaga kerja, dan pembinaan hubungan industrial dan peningkatan jaminan social</p>
<b>Misi 4 : Meningkatkan Tata Pemerintahan yang Baik</b>		
Terwujudnya tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih serta layanan publik yang prima berbasis teknologi informasi	Meningkatnya kualitas dan akuntabilitas pelayanan publik dan penyelenggaraan pemerintahan daerah	<p>a. Peningkatan fasilitasi kebijakan untuk mendorong kualitas administrasi dan kelembagaan pemerintahan daerah</p> <p>b. Peningkatan pelayanan e-government, informasi publik dan penyediaan data statistik melalui pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi</p> <p>c. Peningkatan sistem layanan pengadaan barang dan jasa melalui pembinaan, penyediaan data dan informasi pengadaan barang dan</p>



Tujuan	Sasaran	Strategi
1	2	3
		jasa pemerintah
		d. Peningkatan pelayanan pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil, pengelolaan informasi administrasi kependudukan, pemanfaatan data dan inovasi pelayanan kependudukan
		e. Peningkatan cakupan dan kualitas pelayanan perijinan yang prima dan responsive
		f. Peningkatan pelayanan dan kapasitas lembaga perwakilan rakyat daerah untuk mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD
		g. Peningkatan kapasitas dan kompetensi aparatur, dan kualitas pelayanan administrasi kepegawaian
		h. Peningkatan sistem pengawasan internal dan pengendalian pelaksanaan kebijakan kepala daerah
		i. Pengelolaan perencanaan dan pengendalian pembangunan yang berkualitas
		j. Optimalisasi penelitian dan pengembangan kebijakan strategi dan inovasi daerah guna mencapai perencanaan pembangunan yang berkualitas
		k. Peningkatan akuntabilitas penyusunan dan pengelolaan keuangan dan barang milik daerah
		l. Penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum, serta peningkatan kesiagaan dan pencegahan bahaya kebakaran
		m. Penyelenggaraan pemerintahan umum kecamatan, pelayanan publik, pemberdayaan masyarakat dan penyediaan sarana dan



Tujuan	Sasaran	Strategi
1	2	3
		prasarana infrastruktur kecamatan dan kelurahan

Arah kebijakan pembangunan Kota Serang menitikberatkan pada upaya meningkatkan kualitas sumber daya manusia melalui peningkatan perekonomian masyarakat dan infrastruktur serta pendayagunaan kondisi dan potensi yang dimiliki secara optimal guna peningkatan kesejahteraan masyarakat menuju Kota Serang sebagai kota peradaban dengan prioritas pembangunan RPJMD Kota Serang Tahun 2018-2023, yaitu :

1. Peningkatan kualitas sumber daya manusia
2. Peningkatan aksesibilitas infrastruktur wilayah
3. Peningkatan mutu lingkungan hidup, pengelolaan penataan ruang dan mitigasi bencana
4. Peningkatan kualitas dan daya saing perekonomian daerah
5. Peningkatan tata kelola pemerintahan yang baik melalui reformasi birokrasi

Arah kebijakan pembangunan Kota Serang 2018-2023, beserta keterkaitannya dengan rumusan Misi, Tujuan, Sasaran, dan Strategi yang dipilih sebagaimana tercantum dalam BAB VI lampiran Peraturan Daerah Kota Serang Nomor 3 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Serang Tahun 2018-2023.

## 5. PRIORITAS PEMBANGUNAN TAHUN 2020

Prioritas Pembangunan Kota Serang pada kurun waktu 5 (lima) tahun berdasarkan Peraturan Daerah Kota Serang Nomor 03 Tahun 2019 tentang RPJMD Kota Serang Tahun 2018-2023 yaitu :

- 1) Peningkatan kualitas sumber daya manusia;
- 2) Peningkatan aksesibilitas infrastruktur wilayah;
- 3) Peningkatan mutu lingkungan hidup, pengelolaan penataan ruang dan mitigasi bencana;





- 4) Peningkatan kualitas dan daya saing perekonomian daerah;
- 5) Peningkatan tata kelola pemerintahan yang baik melalui reformasi birokrasi.

Arah kebijakan perencanaan pembangunan tahun 2020 ditetapkan dalam Peraturan Walikota Serang Nomor 39 Tahun 2019 tentang Rencana Kerja Pembangunan Daerah Kota Serang Tahun 2020 merupakan pedoman pelaksanaan program dan kegiatan pembangunan pada Tahun 2020. Prioritas pembangunan tahun 2020 yaitu :

- 1) Peningkatan akses dan kualitas kesehatan, pendidikan dasar, pengarusutamaan gender dan perlindungan anak, serta pelestarian nilai-nilai budaya lokal;
- 2) Peningkatan kualitas pembangunan infrastruktur dan konektivitas wilayah;
- 3) Peningkatan kualitas lingkungan hidup, pengelolaan tata ruang dan mitigasi bencana;
- 4) Peningkatan daya saing ekonomi melalui pengembangan sektor potensial;
- 5) Penurunan kemiskinan, penganggaran dan permasalahan sosial;
- 6) Reformasi birokrasi dan pelayanan publik.

## **6. KEBIJAKAN PEMBANGUNAN TAHUN 2020**

Arah kebijakan pembangunan Kota Serang tahun 2020 diarahkan pada program prioritas, program mendesak, dan program unggulan dengan beratkan pada upaya meningkatkan kualitas sumber daya manusia melalui peningkatan perekonomian masyarakat dan infrastruktur serta pendayagunaan kondisi dan potensi yang dimiliki secara optimal guna peningkatan kesejahteraan masyarakat menuju Kota Serang sebagai kota peradaban. Kebijakan pada dasarnya merupakan ketentuan-ketentuan yang telah disepakati pihak-pihak terkait dan ditetapkan oleh yang berwenang untuk dijadikan pedoman, pegangan atau petunjuk bagi setiap program dan kegiatan agar tercapai kelancaran dan keterpaduan dalam upaya mencapai sasaran yang telah ditentukan.

Program adalah kumpulan kegiatan-kegiatan nyata, sistematis dan terpadu dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan.

Kegiatan merupakan penjabaran lebih lanjut dari suatu program sebagai arah dari pencapaian sasaran kinerja yang memberikan kontribusi bagi pencapaian tugas pokok dan fungsi.

## B. INDIKATOR KINERJA UTAMA

Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor: PER/09/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah, peraturan ini terbit sebagai salah satu upaya untuk memperkuat akuntabilitas dalam penerapan tata pemerintahan yang baik di Indonesia. Diterbitkannya Indikator Kinerja Utama merupakan ukuran keberhasilan dari suatu tujuan dan sasaran strategis instansi pemerintah.

Indikator Kinerja Utama Pemerintah Kota Serang ditetapkan dalam Keputusan Walikota Serang Nomor 060/Kep.49-Huk/2020 tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Pemerintah Kota Serang.

Adapun IKU Pemerintah Kota Serang sebagaimana tercantum pada tabel dibawah ini:

**Tabel 2.3**  
**Indikator Kinerja Utama Pemerintah Kota Serang Tahun 2019 – 2023**

<b>Tujuan</b>	<b>Sasaran Strategis</b>	<b>Indikator Kinerja Utama</b>
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>
1. Terwujudnya sumber daya manusia yang sehat, cerdas dan berbudaya	1. Meningkatnya derajat pendidikan masyarakat	<b>Indeks Pembangunan Manusia</b> Rata-rata Lama Sekolah Harapan Lama Sekolah
	2. Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat	Usia Harapan Hidup
	3. Terkendalinya kuantitas, kualitas dan mobilitas pertumbuhan penduduk	Laju Pertumbuhan Penduduk
	2. Terpenuhi infrastruktur daerah yang berorientasi pada peningkatan	



<b>Tujuan</b>	<b>Sasaran Strategis</b>	<b>Indikator Kinerja Utama</b>
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>
pembangunan wilayah	1. Meningkatnya ketersediaan dan kualitas infrastruktur wilayah	Tingkat Kemantapan Infrastruktur wilayah
	2. Menurunnya luasan kawasan kumuh	Persentase kawasan kumuh
	3. Menurunnya kemacetan lalu lintas	Persentase potensi titik kemacetan
3. Terwujudnya kualitas lingkungan hidup dalam menjamin pembangunan berkelanjutan	1. Meningkatnya kualitas pengelolaan lingkungan hidup	<b>Indeks kualitas lingkungan hidup</b>
		a. Indeks kualitas mutu udara
		b. Indeks kualitas mutu air
	c. Indeks kualitas mutu tutupan lahan	
2. Meningkatnya mitigasi dan penanggulangan bencana	Cakupan penanggulangan bencana	
4. Tercapainya pertumbuhan ekonomi daerah yang berkualitas dan inklusif berbasis potensi keunggulan lokal daerah	Meningkatnya perekonomian daerah dan daya beli masyarakat	<b>Laju Pertumbuhan Ekonomi</b>
		a. Tingkat Inflasi Daerah
		b. Indeks daya beli
		c. PDRB per kapita
		d. Indeks Ketimpangan Regional Wiliamson
		e. Angka Kemiskinan
		f. Tingkat Pengangguran Terbuka
5. Terwujudnya tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih serta layanan publik yang prima berbasis teknologi informasi	Meningkatnya kualitas dan akuntabilitas pelayanan publik dan penyelenggaraan pemerintahan daerah	<b>Indeks Reformasi Birokrasi Daerah</b>
		a. Indeks Kepuasan Masyarakat
		b. Nilai LPPD Kota

Tujuan	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama
1	2	3
		c. Hasil Evaluasi AKIP
		d. Hasil LKPD

### C. PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2020

Perjanjian Kinerja merupakan tekad dan janji kinerja tahunan sangat penting yang perlu dilakukan oleh pimpinan instansi di lingkungan Pemerintahan karena merupakan wahana proses yang akan memberikan perspektif mengenai apa yang diinginkan untuk dihasilkan. Perencanaan kinerja yang dilakukan oleh instansi akan dapat berguna untuk menyusun prioritas kegiatan yang dibiayai dari sumber dana yang terbatas. Dengan perencanaan kinerja tersebut diharapkan fokus dalam mengarahkan dan mengelola program atau kegiatan instansi akan lebih baik, sehingga diharapkan tidak ada kegiatan instansi yang tidak terarah.

Penyusunan Perjanjian Kinerja Perubahan Pemerintah Kota Serang Tahun 2020 mengacu pada dokumen RPJMD Kota Serang Tahun 2018-2023, dokumen Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Perubahan Tahun 2020, dan dokumen Anggaran Pembangunan dan Belanja Daerah (APBD) Perubahan Tahun 2020. Pemerintah Kota Serang telah menyusun Perjanjian Kinerja Perubahan Tahun 2020 dengan uraian sebagai berikut:

#### Misi 1 : Memperkuat Peradaban Yang Berbasis Nilai-Nilai Kemanusiaan

No.	Tujuan & Sasaran Strategis	Indikator kinerja	Satuan	Target 2020
1	2	3	4	5
1.	Terwujudnya Sumber Daya Manusia yang Sehat, Cerdas dan Berbudaya	Indeks Pembangunan Manusia	Poin	72,47
	a. Meningkatnya derajat pendidikan masyarakat	Rata-rata Lama Sekolah	Tahun	8,64



No.	Tujuan & Sasaran Strategis	Indikator kinerja	Satuan	Target 2020
1	2	3	4	5
		Harapan Lama Sekolah	Tahun	12,69
	b. Meningkatnya derajat Kesehatan masyarakat	Usia Harapan Hidup	Tahun	68,03
	c. Terkendalinya kuantitas, kualitas dan mobilitas pertumbuhan penduduk	Laju Pertumbuhan Penduduk	%	1,06

**Misi 2 : Meningkatkan Sarana Prasarana Daerah Yang Berwawasan Lingkungan**

No.	Tujuan & Sasaran Strategis	Indikator kinerja	Satuan	Target 2020
1	2	3	4	5
1.	<b>Terpenuhinya infrastruktur daerah yang berorientasi pada peningkatan pembangunan wilayah</b>	<b>Indeks Kepuasan Layanan Infrastruktur (IKLI) Daerah</b>	<b>Poin</b>	<b>60,70</b>
	a. Meningkatnya ketersediaan dan kualitas infrastruktur wilayah	Tingkat Kemantapan Infrastruktur Wilayah	%	74
	b. Menurunnya luasan kawasan kumuh	Persentase Kawasan Kumuh	%	2,00
	c. Menurunnya kemacetan lalu lintas	Persentase Potensi Titik Kemacetan	%	32
2.	<b>Terwujudnya kualitas lingkungan hidup dalam menjamin pembangunan berkelanjutan</b>	<b>Indeks Kualitas Lingkungan Hidup</b>	<b>Poin</b>	<b>50,35</b>
	a. Meningkatnya kualitas pengelolaan lingkungan hidup	Indeks Kualitas Mutu Udara	Poin	51
		Indeks kualitas mutu air	Poin	67,50





No.	Tujuan & Sasaran Strategis	Indikator kinerja	Satuan	Target 2020
1	2	3	4	5
		Indeks kualitas mutuutupan lahan	Poin	37
	b. Meningkatnya mitigasi dan penanggulangan bencana	Cakupan penanggulangan bencana	%	100

**Misi 3 : Meningkatkan Perekonomian Daerah Dan Pemberdayaan Masyarakat Yang Berdaya Saing**

No.	Tujuan & Sasaran Strategis	Indikator kinerja	Satuan	Target 2020
1	2	3	4	5
1.	<b>Tercapainya pertumbuhan ekonomi daerah yang berkualitas dan inklusif berbasis potensi keunggulan local daerah</b>	<b>Laju Pertumbuhan Ekonomi</b>	%	<b>6,61</b>
	a. Meningkatnya perekonomian daerah dan daya beli masyarakat	Tingkat inflasi daerah	%	3-5
		Indeks daya beli	Poin	80,44
		PDRB Per kapita	Juta (Rp)	46,50
		Indeks ketimpangan regional Williamson	Poin	0,53
		Angka Kemiskinan	%	5,16
		Tingkat pengangguran terbuka	%	8,05

**Misi 4 : Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik**

No.	Tujuan & Sasaran Strategis	Indikator kinerja	Satuan	Target 2020
1	2	3	4	5
1.	Terwujudnya tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih serta layanan publik yang prima berbasis teknologi informasi	Indeks Reformasi Birokrasi Daerah	Poin	72,50
	a. Meningkatnya kualitas dan akuntabilitas pelayanan publik dan penyelenggaraan pemerintah daerah	Indeks kepuasan masyarakat (IKM)	Poin	75,00
		Nilai LPPD Kota	Kategori	Sangat tinggi
		Hasil Evaluasi AKIP	Kategori	B
		Hasil Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD)	Kategori	WTP

**D. RENCANA ANGGARAN TAHUN 2020**

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) merupakan pengejawantahan dari Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) dimana program dan kegiatan diterjemahkan dalam kebijakan Umum Anggaran dan Prioritas Plafon Anggaran Tahun Anggaran 2020. Pada APBD Kota Serang Tahun Anggaran 2020, komposisi belanja Kota Serang sebagai penunjang program dan kegiatan sebagai berikut:

**Tabel 2.4**  
**Rencana Belanja Pemerintah Kota Serang Tahun 2020**

No.	Uraian	Rencana (Rp)	%
1.	Belanja Tidak Langsung	672.950.092.966,00	48,60
2.	Belanja Langsung	711.694.079.906,00	51,40
<b>Jumlah</b>		<b>1.384.644.172.872,00</b>	<b>100</b>

Sumber : Perda Kota Serang Nomor 6 Tahun 2020

Alokasi anggaran belanja langsung tahun 2020 yang dialokasikan untuk membiayai program-program prioritas yang langsung mendukung pencapaian sasaran pembangunan adalah sebagai berikut:

**Tabel 2.5**  
**Alokasi Per Sasaran Strategis Tahun 2020**

No.	Sasaran Strategis	Rencana Anggaran (Rp)	%
1.	Meningkatnya derajat pendidikan masyarakat	135.348.298.396	19,02
2.	Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat	85.830.702.252	12,06
3.	Terkendalinya kuantitas, kualitas dan mobilitas pertumbuhan penduduk	3.812.684.700	0,54
4.	Meningkatnya ketersediaan dan kualitas infrastruktur wilayah	72.490.300.125	10,19
5.	Menurunnya luasan kawasan kumuh	39.085.997.234	5,49
6.	Menurunnya kemacetan lalu lintas	12.277.214.800	1,73
7.	Meningkatnya kualitas pengelolaan lingkungan hidup	33.867.420.371	4,76
8.	Meningkatnya mitigasi dan penanggulangan bencana	1.564.465.000	0,22
9.	Meningkatnya perekonomian daerah dan daya beli masyarakat	22.102.972.279	3,11
10.	Meningkatnya kualitas dan akuntabilitas pelayanan publik dan penyelenggaraan pemerintahan daerah	305.314.024.749	42,90
<b>Jumlah</b>		<b>711.694.079.906</b>	<b>100</b>

Sumber : Bagian Organisasi Setda Kota Serang Tahun 2020 (diolah)

**BAB  
03**

**AKUNTABILITAS KINERJA**

**A**kuntabilitas kinerja adalah perwujudan kewajiban suatu instansi pemerintah untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan/kegagalan pelaksanaan program dan kegiatan yang telah diamanatkan para pemangku kepentingan dalam rangka mencapai misi organisasi secara terukur dengan sasaran/target kinerja yang telah ditetapkan melalui laporan Kinerja Instansi Pemerintah yang disusun secara periodik sebagaimana amanat dalam Perpres Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, dan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja Dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Laporan tersebut memberikan gambaran penilaian tingkat pencapaian target masing-masing indikator sasaran strategis yang ditetapkan dalam Dokumen RPJMD Tahun 2018-2023.

Pengukuran Kinerja dilakukan dengan cara membandingkan target setiap indikator dengan realisasinya. Setelah dilakukan penghitungan akan diketahui selisih atau celah kinerja (*performance gap*). Selanjutnya berdasarkan selisih kinerja tersebut dilakukan evaluasi guna mendapatkan strategi yang tepat untuk peningkatan kinerja di masa yang akan datang (*performance improvement*).

Predikat nilai capaian kinerjanya dikelompokkan dalam skala pengukuran ordinal dengan pendekatan Permendagri 86 Tahun 2017, sebagai berikut :

No	Nilai Interval	Kinerja Pelayanan
1	91 % ≤ 100 %	Sangat Tinggi
2	76 % ≤ 90 %	Tinggi
3	66 % ≤ 75 %	Sedang
4	51 % ≤ 65 %	Rendah
5	≤ 50 %	Sangat Rendah

## A. CAPAIAN INDIKATOR KINERJA UTAMA

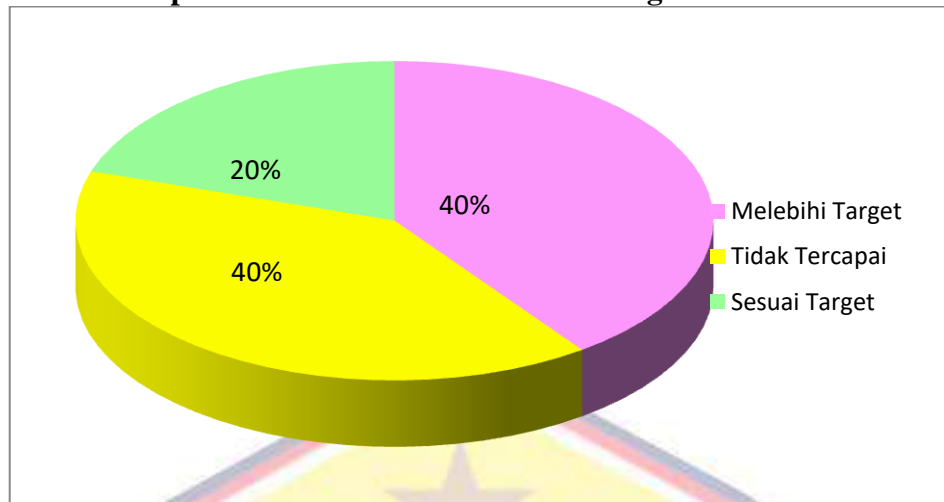
Dalam rangka mengukur dan peningkatan kinerja serta lebih meningkatnya akuntabilitas kinerja pemerintah, maka setiap instansi pemerintah perlu menetapkan Indikator Kinerja Utama (IKU). Untuk itu yang perlu dilakukan instansi pemerintah adalah menentukan apa yang menjadi kinerja utama dari instansi pemerintah yang bersangkutan. Dengan demikian kinerja utama terkandung dalam tujuan dan sasaran strategis instansi pemerintah, sehingga IKU adalah merupakan ukuran keberhasilan dari suatu tujuan dan sasaran strategis instansi pemerintah. Pemerintah Kota Serang telah menetapkan Indikator Kinerja Utama untuk Tingkat Kota Serang melalui Keputusan Walikota Serang Nomor: 060/Kep.49-Huk/2020 tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Pemerintah Kota Serang Tahun 2019-2023. Dalam upaya untuk meningkatkan akuntabilitas kinerja Pemerintah Kota Serang perlu memperhatikan capaian kinerja, permasalahan dan isu-isu strategis yang sangat mempengaruhi keberhasilan suatu organisasi. Hasil pengukuran atas Indikator Kinerja Utama Pemerintah Kota Serang tahun 2020 menunjukkan hasil sebagai berikut:

**Tabel 3.1**  
**Capaian Indikator Kinerja Utama Pemerintah Kota Serang Tahun 2020**

No.	Indikator Kinerja Utama	Satuan	Target	Realisasi	Capaian (%)
Misi 1 : Memperkuat peradaban yang berbasis nilai-nilai kemanusiaan					
1.	Indeks Pembangunan Manusia	Poin	72,47	72,16	99,57
Misi 2 : Meningkatkan sarana prasarana daerah yang berwawasan lingkungan					
1.	Indeks Kepuasan Layanan Infrastruktur (IKLI) Daerah	Poin	60,70	61,87	101,92
2.	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	Poin	50,35	54,34	107,92
Misi 3 : Meningkatkan perekonomian daerah dan pemberdayaan masyarakat yang berdaya saing					
1.	Laju Pertumbuhan Ekonomi	Persen	6,61	-1,29	-19,51
Misi 4 : Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang baik					
1.	Indeks Reformasi Birokrasi Daerah	Poin	72,50	n/a	-



**Grafik 3.1**  
**Capaian IKU Pemerintah Kota Serang Tahun 2020**



Sumber : Bagian Organisasi dan RB Setda Kota Serang, Tahun 2020 (diolah)

Hasil dari capaian tersebut didukung pula dengan program prioritas daerah di Kota Serang yang telah ditetapkan dan merupakan kesinambungan substansi program-program yang sudah berjalan pada periode sebelumnya serta mempertimbangkan janji kampanye Walikota dan Wakil Walikota Serang. Program-program pembangunan lima tahunan sebagaimana tertuang dalam RPJMD Kota Serang 2018-2023, yang disusun berdasarkan ketentuan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah.

Pencapaian kinerja terhadap Janji Walikota dan Wakil Walikota diuraikan dalam sub bab pengukuran, evaluasi dan analisis capaian kinerja sasaran strategis yang relevan.

## **B. PENGUKURAN, EVALUASI DAN ANALISIS KINERJA SASARAN STRATEGIS**

Pengukuran kinerja adalah proses sistematis dan berkesinambungan untuk menilai keberhasilan sesuai dengan program, kebijakan, sasaran dan tujuan dalam mewujudkan visi, misi dan strategi instansi pemerintah, sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan



Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014, yang telah ditindaklanjuti dengan Peraturan Walikota Serang Nomor 58 Tahun 2017. Proses ini dimaksudkan untuk menilai pencapaian setiap indikator kinerja guna memberikan gambaran tentang keberhasilan dan kegagalan pencapaian tujuan dan sasaran. Selanjutnya dilakukan pula analisis akuntabilitas kinerja yang menggambarkan keterkaitan pencapaian kinerja dengan program dan kebijakan dalam rangka mewujudkan visi, misi, tujuan, dan sasaran sebagaimana ditetapkan dalam RPJMD.

Pengukuran kinerja digunakan sebagai dasar untuk menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan program dan kegiatan sesuai dengan sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan dalam rangka mewujudkan visi dan misi instansi pemerintah.

Dalam laporan ini, Pemerintah Kota Serang dapat memberikan gambaran penilaian tingkat pencapaian target sasaran dari masing-masing indikator kinerja sasaran yang ditetapkan dalam dokumen RPJMD 2018-2023 maupun RKPD Tahun 2020. Sesuai ketentuan tersebut, pengukuran kinerja digunakan untuk menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan program, sasaran yang telah ditetapkan dalam mewujudkan misi dan visi instansi pemerintah. Pelaporan Kinerja ini didasarkan pada Perjanjian Kinerja Perubahan Kota Serang Tahun 2020 dan Indikator Kinerja Utama dalam RPJMD 2018-2023, telah ditetapkan 10 (sepuluh) sasaran dengan 21 (dua puluh satu) indikator kinerja dengan rincian sebagai berikut :

1.	Sasaran 1	Meningkatnya derajat pendidikan masyarakat	:	2 indikator
2.	Sasaran 2	Meningkatnya derajat Kesehatan masyarakat	:	1 indikator
3.	Sasaran 3	Terkendalinya kuantitas, kualitas dan mobilitas pertumbuhan penduduk	:	1 indikator
4.	Sasaran 4	Meningkatnya ketersediaan dan kualitas infrastruktur wilayah	:	1 indikator
5.	Sasaran 5	Menurunnya luasan kawasan kumuh	:	1 indikator
6.	Sasaran 6	Menurunnya kemacetan lalu lintas	:	1 indikator



7.	Sasaran 7	Meningkatnya kualitas pengelolaan lingkungan hidup	:	3 indikator
8.	Sasaran 8	Meningkatnya mitigasi dan penanggulangan bencana	:	1 indikator
9.	Sasaran 9	Meningkatnya perekonomian daerah dan daya beli masyarakat	:	6 indikator
10.	Sasaran 10	Meningkatnya kualitas dan akuntabilitas pelayanan publik dan penyelenggaraan pemerintah daerah	:	4 indikator

Secara umum Pemerintah Kota Serang telah dapat melaksanakan tugas dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam RPJMD Kota Serang Tahun 2018-2023 dan Perjanjian Kinerja Perubahan Tahun 2020 sebagai berikut:

**Tabel 3.2**  
**Pengukuran Kinerja Pemerintah Kota Serang Tahun 2020**

No	Sasaran	No.	Indikator Kinerja	Satuan	Tahun 2020		
					Target	Realisasi	Capaian
1.	Meningkatnya derajat pendidikan masyarakat	1.	Rata-rata Lama Sekolah	Tahun	8,64	8,76	101,38
		2.	Harapan Lama Sekolah	Tahun	12,69	12,78	100,70
2.	Meningkatnya derajat Kesehatan masyarakat	3.	Usia Harapan Hidup	Tahun	68,03	68,00	99,95
3.	Terkendalinya kuantitas, kualitas dan mobilitas pertumbuhan penduduk	4.	Laju Pertumbuhan Penduduk	%	1,06	1,76	60,23
4.	Meningkatnya ketersediaan dan kualitas infrastruktur wilayah	5.	Tingkat Kemantapan Infrastruktur Wilayah	%	74	70,09	94,71
5.	Menurunnya luasan kawasan kumuh	6.	Persentase Kawasan Kumuh	%	2,00	6,50	30,77



No	Sasaran	No.	Indikator Kinerja	Satuan	Tahun 2020		
					Target	Realisasi	Capaian
6.	Menurunnya kemacetan lalu lintas	7.	Persentase Potensi Titik Kemacetan	%	32	50	64
7.	Meningkatnya kualitas pengelolaan lingkungan hidup	8.	Indeks Kualitas Mutu Udara	Poin	51	72,46	142,08
		9.	Indeks kualitas mutu air	Poin	67,50	43,33	155,78
		10.	Indeks kualitas mutu tutupan lahan	Poin	37	39,71	107,32
8.	Meningkatnya mitigasi dan penanggulangan bencana	11.	Cakupan penanggulangan bencana	%	100	100	100
9.	Meningkatnya perekonomian daerah dan daya beli masyarakat	12.	Tingkat inflasi daerah	%	3 – 5	1,91	63,67
		13.	Indeks daya beli	Poin	80,44	78,65	97,77
		14.	PDRB Per kapita	Juta (Rp)	46,50	45,17	97,14
		15.	Indeks ketimpangan regional Williamson	Poin	0,53	0,48	110,42
		16.	Angka Kemiskinan	%	5,16	6,06	85,14
		17.	Tingkat pengangguran terbuka	%	8,05	9,26	86,93
10.	Meningkatnya kualitas dan akuntabilitas pelayanan publik dan penyelenggaraan pemerintah daerah	18.	Indeks kepuasan masyarakat (IKM)	Poin	75,00	77,74	115,03
		19.	Nilai LPPD Kota	Kategori	Sangat Tinggi	n/a	n/a
		20.	Hasil Evaluasi AKIP	Kategori	B	n/a	n/a

No	Sasaran	No.	Indikator Kinerja	Satuan	Tahun 2020		
					Target	Realisasi	Capaian
		21.	Hasil Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD)	Kategori	WTP	n/a	n/a

Keterangan: 3 indikator tidak tersedia data (n/a) yaitu nilai LPPD Kota, Hasil Evaluasi AKIP, Hasil Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD)

Berdasarkan hasil pengukuran indikator kinerja sasaran di atas dapat digambarkan Pencapaian Indikator Kinerja Sasaran strategis Pemerintah Kota Serang tahun 2020 sebagaimana grafik 3.2 dan tabel 3.3 berikut:

**Grafik 3.2**  
**Capaian Indikator Kinerja Sasaran Strategis**  
**Pemerintah Kota Serang Tahun 2020**



Sumber : Bagian Organisasi dan RB Setda Kota Serang, Tahun 2020 (diolah)

**Tabel 3.3**  
**Pencapaian Indikator Kinerja Sasaran**  
**Pemerintah Kota Serang Tahun 2020**

No	Predikat	Rata-rata % Capaian	Jumlah Indikator
1	Sangat Tinggi	91 % ≤ 100 %	12
2	Tinggi	76 % ≤ 90 %	2
3	Sedang	66 % ≤ 75 %	-
4	Rendah	51 % ≤ 65 %	3





5	Sangat Rendah	$\leq 50\%$	1
<b>Jumlah</b>			<b>18</b>

Beberapa hal yang kami sajikan dalam pencapaian misi Kota Serang tercermin dalam beberapa tujuan, yaitu:

**1. Tujuan Terwujudnya sumber daya manusia yang sehat, cerdas dan berbudaya**

Tujuan Daerah terwujudnya sumber daya manusia yang sehat, cerdas dan berbudaya dicapai dengan meningkatkan Indeks Pembangunan Manusia (IPM). Walaupun dalam kondisi pandemi covid 19 Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Kota Serang tahun 2020 tercapai sebesar 72,16 meningkat 0.6% dibandingkan tahun 2019 sebesar 72,10. sedangkan IPM Provinsi Banten tahun 2020 sebesar 72,45. lebih tinggi dari IPM Nasional sebesar 71,94 seperti terlihat dalam grafik 3.3 berikut:

**Grafik 3.3**  
**Capaian Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Tahun 2016-2020**



Tujuan daerah tersebut ditunjang dengan sasaran strategis pembangunan Kota Serang sebagai berikut:

**a. Sasaran meningkatnya derajat pendidikan masyarakat**

Untuk mewujudkan pembangunan dalam suatu daerah tentunya perlu didukung oleh segenap potensi yang ada, baik sumber daya alam maupun sumber daya manusia. Pendidikan merupakan salah satu cara untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia yang dimiliki daerah tersebut.

Sasaran meningkatnya derajat pendidikan masyarakat di Kota Serang diukur dengan indikator rata-rata lama sekolah dan harapan lama sekolah dengan capaian sebagai berikut:

**Tabel 3.4**  
**Capaian Kinerja Sasaran Meningkatnya Derajat Pendidikan Masyarakat Tahun 2020**

No	Indikator Kinerja	Satuan	Kondisi Awal Tahun 2018	Tahun 2020		
				Target	Realisasi	%
1.	Rata-rata Lama Sekolah	Tahun	8,62	8,64	8,76	101,38
2.	Harapan Lama Sekolah	Tahun	12,65	12,69	12,78	100,70
<b>Rata-rata Capaian Kinerja Sasaran</b>						<b>101,04</b>

Capaian Kinerja Sasaran meningkatnya derajat pendidikan masyarakat melalui 2 indikator kinerja Tahun 2020 adalah sebesar 101,04%, meningkat dibandingkan kondisi awal tahun 2018 di mana rata-rata lama sekolah meningkat sebesar 0,14 dan harapan lama sekolah meningkat sebesar 0,13. Peningkatan tersebut diantaranya karena Pemerintah Kota Serang telah membebaskan biaya pendidikan untuk sekolah dasar dan sekolah menengah pertama melalui biaya operasional sekolah, meskipun pelaksanaan pendidikan melalui daring.

**Tabel 3.5**  
**Capaian Kinerja Sasaran Meningkatnya Derajat Pendidikan Masyarakat Tahun 2020 Terhadap Kondisi Akhir RPJMD**

No	Indikator Kinerja	Satuan	Kondisi Akhir RPJMD	Tahun 2020	
				Realisasi	%
1.	Rata-rata Lama Sekolah	Tahun	8,68	8,76	100,92

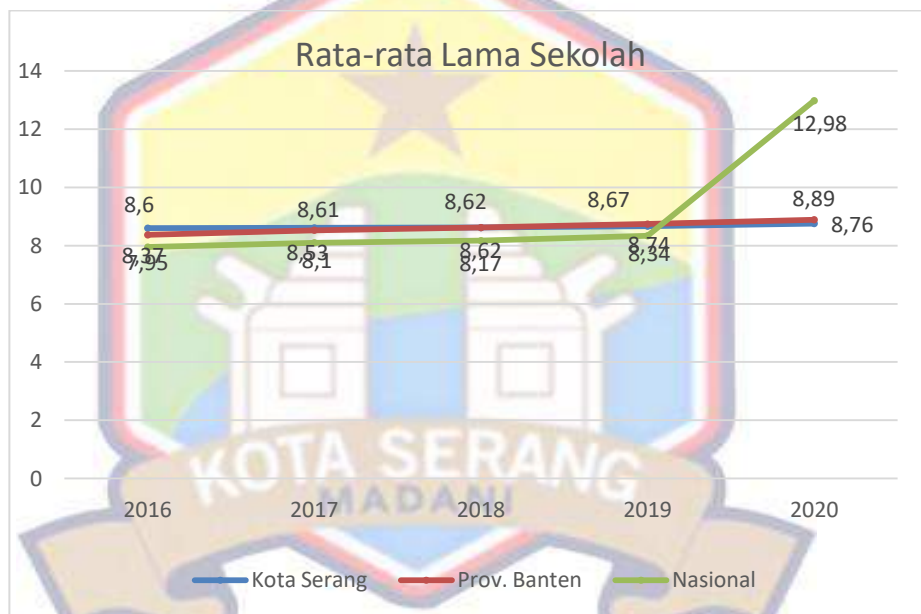


2.	Harapan Lama Sekolah	Tahun	12,77	12,78	100,07
<b>Rata-rata terhadap RPJMD</b>					<b>100,49</b>

Capaian terhadap target akhir RPJMD untuk rata-rata lama sekolah adalah 100,49% dari target akhir RPJMD 8,68 dan harapan lama sekolah sebesar 10,07% dari target akhir RPJMD 12,77. Adapun grafik capaian selama lima tahun sebagai berikut:

**Grafik 3.4**

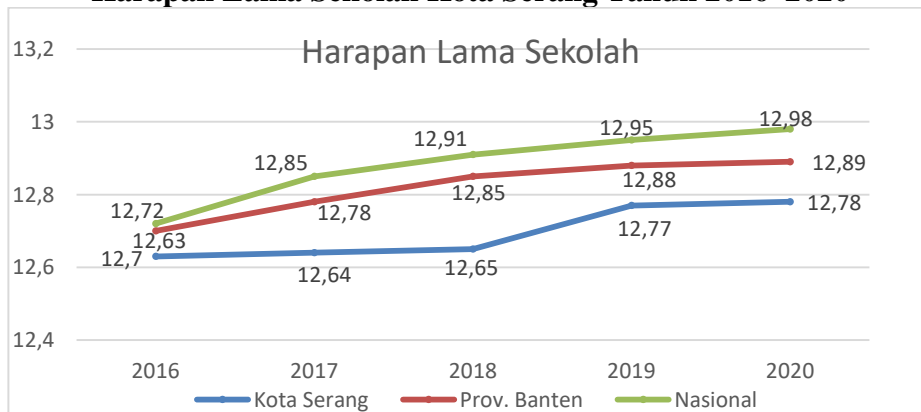
**Rata-rata Lama Sekolah Kota Serang Tahun 2016-2020**



Sumber : BPS Pusat,Prov. Banten, Kota Serang, Tahun 2020

**Grafik 3.5**

**Harapan Lama Sekolah Kota Serang Tahun 2016–2020**



Sumber : BPS Pusat,Prov. Banten, Kota Serang, Tahun 2020



Rata-rata Lama Sekolah Kota Serang tahun 2020 adalah sebesar 8,76 tahun. Angka ini menunjukkan bahwa rata-rata tingkat pendidikan penduduk usia sekolah (7 tahun atau lebih) di Kota Serang dapat menyelesaikan sekolah hanya sampai kelas 2 SLTP. Meskipun dapat memenuhi target tahun 2020 sebesar 8,76 tahun, namun untuk mencapai target rata-rata bersekolah 9 tahun masih membutuhkan upaya lebih kerja keras lagi dari Pemerintah Kota Serang. Rata-rata Lama Sekolah Kota Serang juga masih di bawah Provinsi Banten yang mencapai 8,89 dan di atas Nasional yaitu 12,98.

Harapan Lama Sekolah Kota Serang tahun 2020 adalah sebesar 12,78 tahun. Artinya bahwa lamanya sekolah yang diharapkan akan dirasakan oleh anak pada umur tertentu (7 tahun ke atas) di masa mendatang adalah selama 12,78 tahun atau setara dengan mengenyam pendidikan sampai dengan lulus SLTA. Harapan Lama Sekolah Kota Serang juga masih di bawah Provinsi Banten yang mencapai 12,89 dan Nasional yaitu 12,98.

Pemerintah Kota Serang terus berupaya meningkatkan angka rata-rata lama sekolah dan harapan lama sekolah melalui penyediaan sarana dan prasarana pendidikan serta peningkatan mutu guru dan tenaga pendidikan.

#### **b. Sasaran meningkatnya derajat kesehatan masyarakat**

Kesehatan juga merupakan salah satu cara untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia yang dimiliki daerah tersebut. Tingkat kesehatan masyarakat yang semakin baik/semakin meningkat disetiap tahunnya menjadi salah satu keinginan Pimpinan Daerah dan seluruh elemen Kota Serang. Sasaran meningkatnya derajat kesehatan masyarakat di Kota Serang diukur dengan indikator Usia Harapan Hidup dengan capaian sebagai berikut:

**Tabel 3.6**  
**Capaian Kinerja Sasaran Meningkatnya Derajat Kesehatan Masyarakat Tahun 2020**

No	Indikator Kinerja	Satuan	Kondisi Awal Tahun 2018	Tahun 2019	Tahun 2020		
					Target	Realisasi	%
1.	Usia Harapan Hidup	Tahun	67,58	67,83	68,03	68,00	99,95
<b>Rata-rata Capaian Kinerja Sasaran</b>							<b>99,95</b>

Capaian kinerja sasaran meningkatnya derajat kesehatan masyarakat tahun 2020 adalah sebesar 68,00 meningkat dari tahun sebelumnya walaupun tidak sesuai target karena terjadi wabah nasional Covid-19 selama tahun 2020. Di mana kondisi awal sebesar 67,58 meningkat ditahun 2019 sebesar 0,25 dan pada tahun 2020 meningkat sebesar 0,42 dari tahun awal. Peningkatan ini merupakan usaha dari Pemerintah Kota Serang dalam melaksanakan program-program kesehatan dengan berbagai macam kendala yang dihadapi pada tahun 2020.

**Tabel 3.7**  
**Capaian Kinerja Sasaran Meningkatnya Derajat Kesehatan Masyarakat Tahun 2020 Terhadap Kondisi Akhir RPJMD**

No	Indikator Kinerja	Satuan	Kondisi Akhir RPJMD	Tahun 2020	
				Realisasi	%
1.	Usia Harapan Hidup	Tahun	68,75	68,00	98,90
<b>Rata-rata terhadap RPJMD</b>					<b>98,90</b>

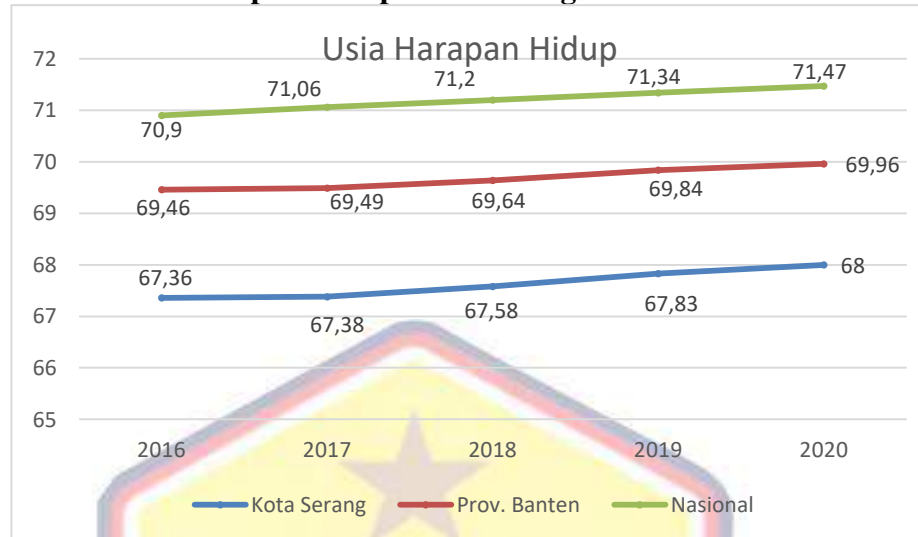
Capaian terhadap target akhir RPJMD untuk Usia Harapan Hidup adalah 98,90% dari target akhir RPJMD 68,75.

Adapun grafik capaian kinerja selama lima tahun sebagaimana berikut:



Grafik 3.6

Usia Harapan Hidup Kota Serang Tahun 2016–2020



Sumber : BPS Pusat, Prov. Banten, Kota Serang, Tahun 2020

Usia harapan hidup adalah rata-rata kesempatan atau waktu hidup yang tersisa. Usia harapan hidup bisa diartikan pula dengan banyaknya tahun yang ditempuh penduduk yang masih hidup sampai umur tertentu.

Usia harapan hidup dari tahun 2016 sampai dengan tahun 2020 telah mengalami peningkatan. Pada tahun 2020 Usia Harapan Hidup tercapai sebesar 68,00. Pencapaian tersebut masih di bawah angka Provinsi Banten yang mencapai 69,96 dan angka Nasional 71,47. Permasalahan dalam pencapaian indikator ini adalah pola hidup tidak sehat khas warga perkotaan yang modern. Solusi atas permasalahan tersebut tentunya dengan upaya preventif, kuratif (pengobatan), dan promotif (ajakan untuk hidup sehat) serta upaya kesehatan terhadap ibu hamil, bayi, balita, remaja dan lansia melalui usaha kesehatan perorangan dan masyarakat sehingga angka harapan hidup semakin meningkat.

c. Sasaran terkendalinya kuantitas, kualitas dan mobilitas pertumbuhan penduduk

Pertumbuhan penduduk juga merupakan salah satu cara untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia yang dimiliki daerah. Sasaran Terkendalinya kuantitas, kualitas dan mobilitas pertumbuhan penduduk di Kota Serang diukur dengan indikator Laju Pertumbuhan Penduduk dengan capaian sebagai berikut:

**Tabel 3.8**  
**Capaian Kinerja Sasaran Terkendalinya Kuantitas, Kualitas dan Mobilitas Pertumbuhan Penduduk Tahun 2020**

No	Indikator Kinerja	Satuan	Kondisi Awal Tahun 2018	Tahun 2020		
				Target	Realisasi	%
1.	Laju Pertumbuhan Penduduk	%	1,68	1,06	1,76	60,23
<b>Rata-rata Capaian Kinerja Sasaran</b>						<b>60,23</b>

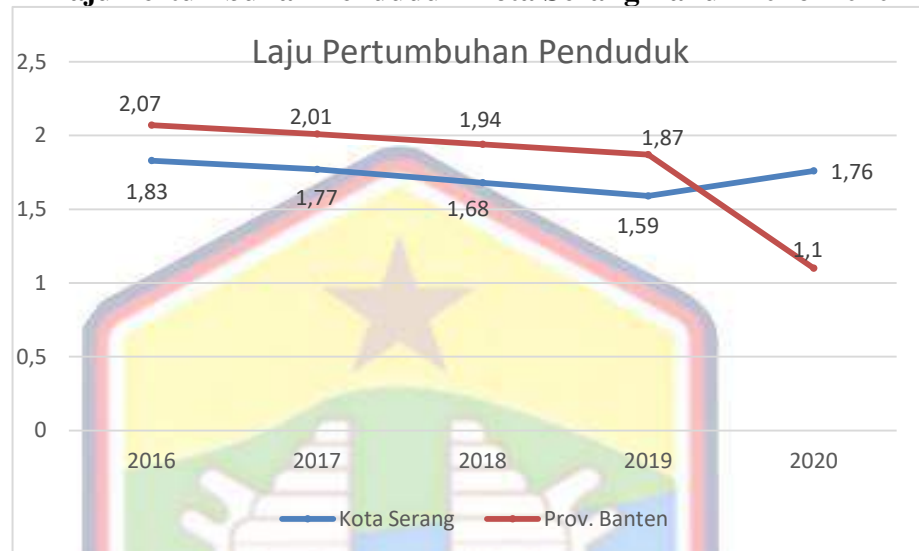
Capaian kinerja sasaran terkendalinya kuantitas, kualitas dan mobilitas pertumbuhan penduduk tahun 2020 adalah sebesar 60,23% meningkat dari tahun 2018, di mana kondisi awal sebesar 1,68 menjadi 1,76 di tahun 2020. Hal ini menandakan bahwa pertumbuhan penduduk di Kota Serang sangat pesat dan belum mampu menghambat laju pertumbuhan penduduk yang ditargetkan yaitu 1,06 pada tahun 2020 namun masih mencapai target karena realisasi tahun 2020 sebesar 1,76 masih di atas toleransi yang ditargetkan.

**Tabel 3.9**  
**Capaian Kinerja Sasaran Terkendalinya Kuantitas, Kualitas dan Mobilitas Pertumbuhan Penduduk Tahun 2020 Terhadap Kondisi Akhir RPJMD**

No	Indikator Kinerja	Satuan	Kondisi Akhir RPJMD	Tahun 2020	
				Realisasi	%
1.	Laju Pertumbuhan Penduduk	%	1,00	1,76	176
<b>Rata-rata terhadap RPJMD</b>					<b>176</b>

Capaian terhadap target akhir RPJMD untuk Laju Pertumbuhan Penduduk adalah 176% dari target akhir RPJMD 1,00. Adapun grafik capaian kinerja selama lima tahun sebagaimana berikut:

**Grafik 3.7**  
**Laju Pertumbuhan Penduduk Kota Serang Tahun 2016–2020**



Sumber : BPS Provinsi Banten, Tahun 2020

Pada tahun 2020 Laju Pertumbuhan Penduduk mengalami peningkatan mencapai 1,76% dari target 1,06% ini terjadi karena pada tahun 2020 terjadi wabah Covid-19, masyarakat banyak kembali ke daerah asal dikarenakan kehilangan pekerjaan dan terjadi peningkatan dari aspek kelahiran. Berkaitan dengan kondisi tersebut pemerintah Kota Serang terus melakukan upaya dalam pengendalian jumlah penduduk melalui penertiban adminduk, penekanan aspek kelahiran, kesehatan ibu dan anak melalui program kependudukan dan keluarga berencana.

## 2. Tujuan terpenuhinya infrastruktur daerah yang berorientasi pada peningkatan pembangunan wilayah

Tujuan daerah terpenuhinya infrastruktur daerah yang berorientasi pada peningkatan pembangunan wilayah dicapai dengan meningkatkan Indeks Kepuasan Layanan Infrastruktur (IKLI). Indeks Kepuasan Layanan Infrastruktur (IKLI) merupakan ukuran umpan balik untuk mengetahui tingkat kepuasan masyarakat atas pembangunan infrastruktur oleh Pemerintah Daerah khususnya Pemerintah Kota Serang. Indeks ini juga diharapkan menjadi suatu tools yang menghasilkan gambaran untuk mengetahui perspektif masyarakat secara obyektif, komprehensif, dan kredibel baik pembangunan fisik maupun aspek manfaat (outcome).

Indeks Kepuasan Layanan Infrastruktur (IKLI) Kota Serang diperoleh dengan survei yang dilakukan oleh Badan Perencanaan Pembangunan (Bappeda) Kota Serang dengan mutu pelayanan terbagi menjadi 4 (empat) kategori, yaitu:

Nilai Interval	Nilai Interval Konversi	Mutu Pelayanan	Kinerja Pelayanan
1,00 – 2,99	10,00 – 29,99	D	Sangat Tidak Puas
3,00 – 4,99	30,00 – 49,99	C	Tidak Puas
5,00 – 6,99	50,00 – 69,99	C+	Cukup Puas
7,00 – 8,99	70,00 – 89,99	B	Puas
9,00 – 10	90,00 – 100	A	Sangat Puas

Indeks Kepuasan Layanan Infrastruktur (IKLI) Kota Serang tahun 2020 tercapai sebesar 61,87. Apabila kita lihat tabel tersebut di atas maka dapat dikatakan Kinerja Pelayanan Infrastruktur di Kota Serang adalah “Cukup Puas” atau dengan skor C+. Adapun rincian IKLI per Kecamatan se-Kota Serang tahun 2020 dapat dilihat di tabel 3.1 berikut:

**Tabel 3.10**

Nilai IKLI Kecamatan se-Kota Serang Tahun 2020

Kecamatan	Nilai	Mutu Pelayanan	Kinerja Pelayanan
Serang	66,46	C+	Cukup Puas
Taktakan	60,895	C+	Cukup Puas
Cipocok Jaya	69,89	C+	Cukup Puas
Walantaka	58,675	C+	Cukup Puas
Kasemen	59,155	C+	Cukup Puas
Curug	56,16	C+	Cukup Puas
Kota Serang	61,87	C+	Cukup Puas

Sumber : Bappeda Kota Serang, Tahun 2020

Indeks kepuasan layanan infrastruktur keseluruhan kota serang tahun 2020 adalah 61,87 yang artinya: **“Cukup Puas”** atau dengan skor C+. Dalam hal ini masyarakat telah merasakan hasil pembangunan infrastruktur diwilayahnya meskipun belum maksimal.

Faktor yang menyebabkan masih belum cukup puas terhadap infrastruktur di Kota Serang adalah:

1. Masyarakat masih minim informasi akan pembangunan yang telah dilaksanakan oleh Pemerintah Kota Serang
2. Kurang terawatnya fasilitas infrastruktur yang ada di Kota Serang, lebih banyak cenderung pada masalah jalan, sedangkan dari sisi lain yang dimaksud dengan infrastruktur bukan semata terpaku pada jalan tetapi masih banyak indikator-indikator lainnya.
3. Perawatan dari hasil pembangunan yang dirasa kurang baik, sehingga terkesan pemerintah acuh dan lalai dalam hal perawatan infrastruktur yang ada di Kota Serang.
4. Banyak permasalahan yang dirasa kurang cepat diatasi oleh Pemerintah Kota Serang, masalah-masalah tersebut masuk dalam beberapa indikator dan isu strategis yang seyognya dapat cepat di tanggulangi oleh Pemerintah Kota Serang.



Tujuan daerah terpenuhinya infrastruktur daerah yang berorientasi pada peningkatan pembangunan wilayah ditunjang dengan sasaran strategis pembangunan Kota Serang sebagai berikut:

**a. Sasaran meningkatnya ketersediaan dan kualitas infrastruktur wilayah**

Sasaran meningkatnya ketersediaan dan kualitas infrastruktur wilayah di Kota Serang diukur dengan indikator tingkat kemantapan infrastruktur wilayah dengan capaian 70,09% dari target yang ditetapkan sebesar 74% seperti tersaji pada tabel berikut:

**Tabel 3.11**  
**Capaian Kinerja Sasaran Meningkatnya Ketersediaan dan Kualitas Infrastruktur Wilayah Tahun 2020**

No	Indikator Kinerja	Satuan	Kondisi Awal Tahun 2018	Tahun 2020		
				Target	Realisasi	%
1.	Tingkat Kemantapan Infrastruktur Wilayah	%	68,6	74	70.09	94,71
<b>Rata-rata Capaian Kinerja Sasaran</b>						<b>94,71</b>

Capaian kinerja sasaran meningkatnya ketersediaan dan kualitas infrastruktur wilayah tahun 2020 adalah sebesar 94,71% menurun dari tahun 2019, hal ini terjadi karena refocusing anggaran meskipun dibandingkan dengan kondisi awal RPJMD mengalami peningkatan. Tingkat kemantapan infrastruktur wilayah sebesar 68,6 menjadi 70,09 di tahun 2020. Peningkatan ini merupakan hasil program peningkatan infrastruktur yang menjadi prioritas pembangunan di Kota Serang. Target tersebut memang masih dirasa belum optimal karena beberapa anggaran terdampak refocusing pandemi Covid-19 yang mengakibatkan beberapa kegiatan harus disesuaikan kembali dengan kondisi yang terjadi di tahun 2020.

Tabel 3.12

**Capaian Kinerja Sasaran Meningkatkan Ketersediaan dan Kualitas Infrastruktur Wilayah Tahun 2020 Terhadap Kondisi Akhir RPJMD**

No	Indikator Kinerja	Satuan	Kondisi Akhir RPJMD	Tahun 2020	
				Realisasi	%
1.	Tingkat Kemantapan Infrastruktur Wilayah	%	83	70,09	84,45
<b>Rata-rata terhadap RPJMD</b>					<b>84,45</b>

Capaian terhadap target akhir RPJMD untuk tingkat kemantapan infrastruktur wilayah adalah 84,45% dari target akhir RPJMD 83, pada tahun 2020 pencapaian target sudah mendekati kondisi akhir RPJMD, pemerintah Kota Serang terus meningkatkan ketersediaan dan kualitas infrastruktur wilayah melalui pembangunan jalan dan jembatan, penyediaan sarana dan prasarana kebinamargaan, peningkatan pembangunan gedung pemerintah dan fasilitas umum, pembangunan saluran drainase/ gorong-gorong, pengembangan dan pengelolaan irigasi dan pengairan lainnya, pengendalian banjir, rehabilitasi pemeliharaan jalan dan jembatan dan pembinaan jasa konstruksi.

**b. Sasaran menurunnya luasan kawasan kumuh**

Sasaran menurunnya luasan kawasan kumuh di Kota Serang diukur dengan indikator persentase kawasan kumuh dengan capaian 6,50% dari target yang ditetapkan sebesar 2,00% seperti tersaji pada tabel berikut:

Tabel 3.13

**Capaian Kinerja Sasaran Menurunnya Luasan Kawasan Kumuh Tahun 2020**

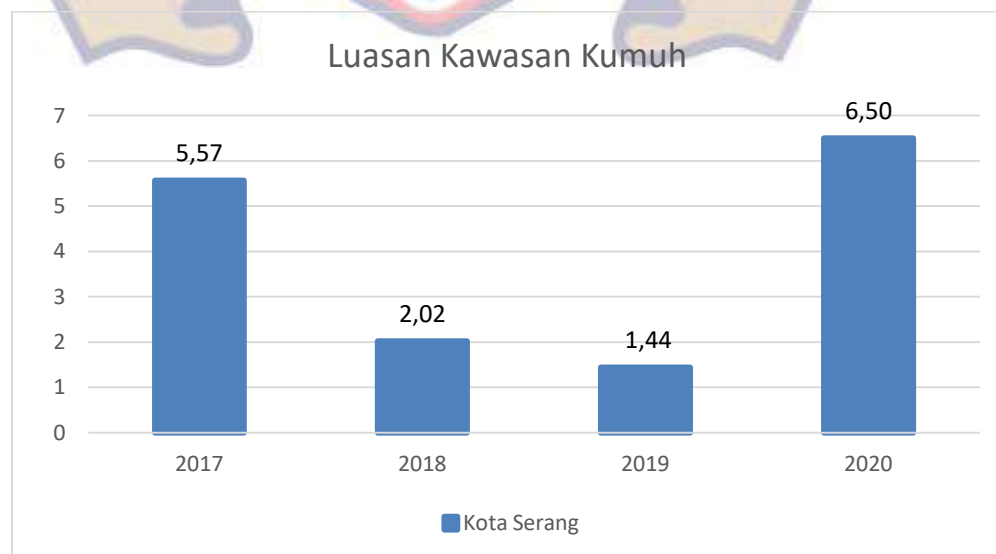
No	Indikator Kinerja	Satuan	Kondisi Awal Tahun 2018	Tahun 2020		
				Target	Realisasi	%
1.	Persentase Kawasan Kumuh	%	2,02	2,00	6,50	30,77
<b>Rata-rata Capaian Kinerja Sasaran</b>						<b>30,77</b>

**Tabel 3.14**  
**Capaian Kinerja Sasaran Menurunnya Luasan Kawasan Kumuh**  
**Tahun 2020 Terhadap Kondisi Akhir RPJMD**

No	Indikator Kinerja	Satuan	Kondisi Akhir RPJMD	Tahun 2020	
				Realisasi	%
1.	Persentase Kawasan Kumuh	%	1,07	6,50	16,46
<b>Rata-rata terhadap RPJMD</b>					<b>16,46</b>

Capaian terhadap target akhir RPJMD untuk persentase kawasan kumuh adalah 16,46% dari target akhir RPJMD 1,07 meskipun pencapaian persentase kawasan kumuh masih relative tinggi terhadap kondisi akhir RPJMD Pemerintah Kota Serang telah berupaya menurunkan persentase kawasan kumuh melalui pembangunan, pemanfaatan pengendalian perumahan, serta pembangunan, pemeliharaan dan pengelolaan permukiman. Adapun capaian persentase kawasan kumuh di Kota Serang selama tiga tahun kebelakang tersaji pada grafik 3.8 berikut:

**Grafik 3.8**  
**Luas Kawasan Kumuh Kota Serang Tahun 2017-2020**



Sumber : DPRKP Kota Serang, Tahun 2020



Rekomendasi penanganan memperhatikan hasil analisis sebab akibat serta rencana program penanganan Indeks luasan kawasan permukiman yang tertata merupakan indikator yang diperuntukkan untuk mengetahui seberapa besar luasan kawasan permukiman yang tertata atau yang sudah ditangani oleh Pemerintah Daerah setempat, yang mana pada setiap wilayah memiliki wilayah atau kawasan yang masih tergolong dalam kawasan permukiman kumuh. Identifikasi kawasan permukiman kumuh yang di buat berdasarkan Pedoman Identifikasi Kawasan permukiman Kumuh yang dibuat oleh Divisi Cipta karya Kementerian PUPR. Berikut pedoman identifikasi ini disusun dengan memperhatikan pokok-pokok di bawah ini:

- 1) Lokasi identifikasi adalah kawasan-kawasan permukiman khususnya yang ada di kota/kabupaten yang menjadi daerah penyangga kota metropolitan;
- 2) Kawasan kumuh yang diidentifikasi diprioritaskan pada kawasan permukiman yang memiliki kaitan dan atau memberi andil tumbuhnya permukiman kumuh di daerah bersangkutan yang merupakan hinterland kota metropolitan sekaligus memberi andil sulitnya penanganan kekumuhan di kota metropolitan;
- 3) Data-data dan informasi mengenai lokasi kawasan permukiman kumuh yang terkumpul digunakan untuk melakukan analisis sebab akibat dan rekomendasi penanganan kawasan permukiman yang ada di kota/kabupaten penyangga kota metropolitan;



4) kawasan kumuh oleh pemerintah daerah.

Untuk melakukan identifikasi kawasan permukiman kumuh digunakan kriteria. Penentuan kriteria kawasan permukiman kumuh dilakukan dengan mempertimbangkan berbagai aspek atau dimensi seperti kesesuaian peruntukan lokasi dengan rencana tata ruang, status (kepemilikan) tanah, letak/kedudukan lokasi, tingkat kepadatan penduduk, tingkat kepadatan bangunan, kondisi fisik, sosial, ekonomi dan budaya masyarakat lokal. Selain itu digunakan kriteria sebagai kawasan penyangga kota metropolitan seperti kawasan permukiman kumuh teridentifikasi yang berdekatan atau berbatasan langsung dengan kawasan yang menjadi bagian dari kota metropolitan. Berdasarkan uraian di atas maka untuk menetapkan lokasi kawasan permukiman kumuh digunakan kriteria-kriteria yang dikelompok ke dalam kriteria: • Vitalitas Non Ekonomi • Vitalitas Ekonomi Kawasan • Status Kepemilikan Tanah • Keadaan Prasarana dan Sarana • Komitmen Pemerintah Kabupaten/Kota • Prioritas Penanganan Kegiatan penilaian kawasan permukiman kumuh dilakukan dengan sistem pembobotan pada masing-masing kriteria di atas. Umumnya dimaksudkan bahwa setiap kriteria memiliki bobot pengaruh yang berbeda-beda. Selanjutnya dalam penentuan bobot kriteria bersifat relatif dan bergantung pada preferensi individu atau kelompok masyarakat dalam melihat pengaruh masing-masing kriteria. Kriteria dimaksud yaitu:



a) **Kriteria Vitalitas Non Ekonomi**

Kriteria vitalitas non ekonomi dipertimbangkan sebagai penentuan penilaian kawasan kumuh dengan indikasi terhadap penanganan peremajaan kawasan kumuh yang dapat memberikan tingkat kelayakan kawasan permukiman tersebut apakah masih layak sebagai kawasan permukiman atau sudah tidak sesuai lagi. Kriteria ini terdiri atas variabel sebagai berikut:

- Kesesuaian pemanfaatan ruang kawasan dalam Rencana Tata Ruang Wilayah Kota atau RDTK, dipandang perlu sebagai legalitas kawasan dalam ruang kota;
- Fisik bangunan perumahan permukiman dalam kawasan kumuh memiliki indikasi terhadap penanganan kawasan permukiman kumuh dalam hal kelayakan suatu hunian berdasarkan intensitas bangunan yang terdapat di dalamnya;
- Kondisi kependudukan dalam kawasan permukiman kumuh yang dinilai, mempunyai indikasi terhadap penanganan kawasan permukiman kumuh berdasarkan kerapatan dan kepadatan penduduk.

b) **Kriteria Vitalitas Ekonomi**

Kriteria vitalitas ekonomi dinilai mempunyai kepentingan atas dasar sasaran program penanganan kawasan permukiman kumuh terutama pada kawasan kumuh sesuai gerakan *City Without Slum* sebagaimana menjadi komitmen dalam Hari Habitat

Internasional. Oleh karenanya kriteria ini akan mempunyai tingkat kepentingan penanganan kawasan permukiman kumuh dalam kaitannya dengan indikasi pengelolaan kawasan sehingga peubah penilai untuk kriteria ini meliputi:

- Tingkat kepentingan kawasan dalam letak kedudukannya pada wilayah kota, apakah apakah kawasan itu strategis atau kurang strategis;
- Fungsi kawasan dalam peruntukan ruang kota, di mana keterkaitan dengan faktor ekonomi memberikan ketertarikan pada investor untuk dapat menangani kawasan kumuh yang ada. Kawasan yang termasuk dalam kelompok ini adalah pusat Pedoman Identifikasi Kawasan Permukiman Kumuh Daerah Penyangga Kota Metropolitan 5 pusat aktivitas bisnis dan perdagangan seperti pasar, terminal/stasiun, pertokoan, atau fungsi lainnya;
- Jarak jangkauan kawasan terhadap tempat mata pencaharian penduduk kawasan permukiman kumuh.

### c) Kriteria Status Tanah

Kriteria status tanah sebagai mana tertuang dalam Inpres Nomor 5 tahun 1990 Tentang Peremajaan Permukiman Kumuh, Peremajaan Permukiman Kumuh merupakan hal penting untuk mencapai kemudahan pengurusan masalah status tanah, kelancaran dan kemudahan pengelolaannya, sekaligus dapat menjadikan jaminan



terhadap ketertarikan investasi dalam suatu kawasan perkotaan.

Perubah penilai dari kriteria ini meliputi:

- Status kepemilikan lahan kawasan perumahan permukiman;
- Status sertifikat tanah yang ada.

**d) Kriteria Kondisi Prasarana dan Sarana**

Kriteria kondisi prasarana dan sarana yang mempengaruhi suatu kawasan permukiman menjadi kumuh, paling tidak terdiri atas:

- Kondisi jalan;
- Drainase;
- Air bersih;
- Air limbah.

**e) Kriteria Komitmen Pemerintah Setempat**

Komitmen pemerintah daerah (kabupaten/kota/propinsi) dinilai mempunyai andil sangat besar untuk terselenggaranya penanganan kawasan permukiman kumuh. Hal Pedoman Identifikasi Kawasan Permukiman Kumuh Daerah Penyangga Kota Metropolitan mempunyai indikasi bahwa pemerintah daerah menginginkan adanya keteraturan pembangunan khususnya kawasan yang ada di daerahnya. Perubah penilai dari kriteria ini meliputi:

- Keinginan pemerintah untuk penyelenggaraan penanganan kawasan kumuh dengan indikasi penyediaan dana dan mekanisme kelembagaan penanganannya;



- Ketersediaan perangkat dalam penanganan, seperti halnya rencana penanganan (*grand scenario*) kawasan, rencana induk (master plan) kawasan dan lainnya.

**f) Kriteria Prioritas Penanganan**

Untuk menentukan lokasi prioritas penanganan, selanjutnya digunakan kriteria lokasi kawasan permukiman kumuh yang diindikasikan memiliki pengaruh terhadap (bagian) kawasan perkotaan metropolitan sekaligus sebagai kawasan permukiman penyangga. Kriteria ini akan menghasilkan lokasi kawasan permukiman yang prioritas ditangani karena letaknya yang berdekatan dengan kawasan perkotaan. Penentuan kriteria ini menggunakan variabel sebagai berikut:

- Kedekatan lokasi kawasan permukiman kumuh dengan pusat kota metropolitan;
- Kedekatan lokasi kawasan permukiman kumuh dengan kawasan pusat pertumbuhan bagian kota metropolitan;
- Kedekatan lokasi kawasan permukiman kumuh dengan kawasan lain (perbatasan) bagian kota metropolitan;
- Kedekatan lokasi kawasan kumuh dengan letak ibukota daerah yang bersangkutan.

Capaian Presentase Luasan Kawasan Permukiman yang tertata dapat dihitung melalui formulasi berikut:

$$\frac{\text{Jumlah Luasan Permukiman yang tertata}}{\text{jumlah luas permukiman}} \times 100$$

Keterangan:

Jumlah Luasan Permukiman = Luasan permukiman yang tertata  
yang Tertata sesuai dengan SK kumuh

Jumlah Luas Permukiman = Jumlah luasan permukiman  
Keseluruhan keseluruhan yang ada pada  
wilayah Kota Serang yang sudah  
ditetapkan

$$\frac{5.589,45}{5.973,96} \times 100 = 93,56$$

Sehingga, Capaian Presentase Luasan Permukiman yang Tertata pada Kota Serang Tahun 2020 sebesar 93,56 %. Ini menunjukkan masih ada wilayah kawasan kumuh sebesar 6,44%. Dari luas wilayah kota serang sebesar 26.674 Ha.yaitu mencapai 1.717 Ha.

c. Sasaran **menurunnya kemacetan lalu lintas**

Sasaran menurunnya kemacetan lalu lintas di Kota Serang diukur dengan indikator Persentase Potensi Titik Kemacetan dengan capaian 50% dari target yang ditetapkan sebesar 32% seperti tersaji pada tabel berikut:

**Tabel 3.15**  
**Capaian Kinerja Sasaran Menurunnya Kemacetan Lalu Lintas**  
**Tahun 2020**

No	Indikator Kinerja	Satuan	Kondisi Awal Tahun 2018	Tahun 2020		
				Target	Realisasi	%
1.	Persentase Potensi Titik Kemacetan	%	50	32	50	64
<b>Rata-rata Capaian Kinerja Sasaran</b>						<b>64</b>



**Tabel 3.16**  
**Capaian Kinerja Sasaran Menurunnya Kemacetan Lalu Lintas**  
**Tahun 2020 Terhadap Kondisi Akhir RPJMD**

No	Indikator Kinerja	Satuan	Kondisi Akhir RPJMD	Tahun 2019	
				Realisasi	%
1.	Persentase Potensi Titik Kemacetan	%	12	50	24
<b>Rata-rata terhadap RPJMD</b>					<b>24</b>

Capaian terhadap target akhir RPJMD untuk persentase potensi titik kemacetan di tahun kedua RPJMD adalah 24% dari target akhir RPJMD 12. Adapun capaian persentase potensi titik kemacetan di Kota Serang selama lima tahun ke belakang tersaji pada grafik 3.9 berikut:

**Grafik 3.9**  
**Persentase Potensi Titik Kemacetan Tahun 2016–2020**



Sumber : Dishub Kota Serang, Tahun 2020

Berdasarkan data dari Dinas Perhubungan Kota Serang, titik kemacetan di Kota Serang sebanyak 14 titik. Pada tahun 2020 ini yang bisa diatasi sebanyak 7 titik dengan persentase 50% terjadi peningkatan dibandingkan tahun yang lalu 44%. Peningkatan ini merupakan upaya Pemerintah Kota Serang mewujudkan program mendesak yaitu mengurangi titik kemacetan di Kota Serang. Dipengaruhi pula oleh

diberlakukannya PSBB sehingga mengurangi kemacetan dikota serang upaya yang terus dilakukan dalam mengurangi potensi titik kemacetan yaitu pengendalian operasional dan rekayasa lalu lintas angkutan jalan (LLAJ), penertiban angkutan darat, serta teknis sarana dan prasarana lalu lintas.

### 3. Tujuan terwujudnya kualitas lingkungan hidup dalam menjamin pembangunan berkelanjutan

Tujuan daerah terwujudnya kualitas lingkungan hidup dalam menjamin pembangunan berkelanjutan dicapai dengan meningkatkan Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH). Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) merupakan gambaran atau indikasi awal yang memberikan kesimpulan cepat dari suatu kondisi lingkungan hidup pada lingkup dan periode tertentu. Indikator yang digunakan dalam perhitungan IKLH adalah Indeks Kualitas / Pencemaran Air, Indeks Kualitas / Pencemaran Udara Indeks Tutupan Hutan/Lahan.

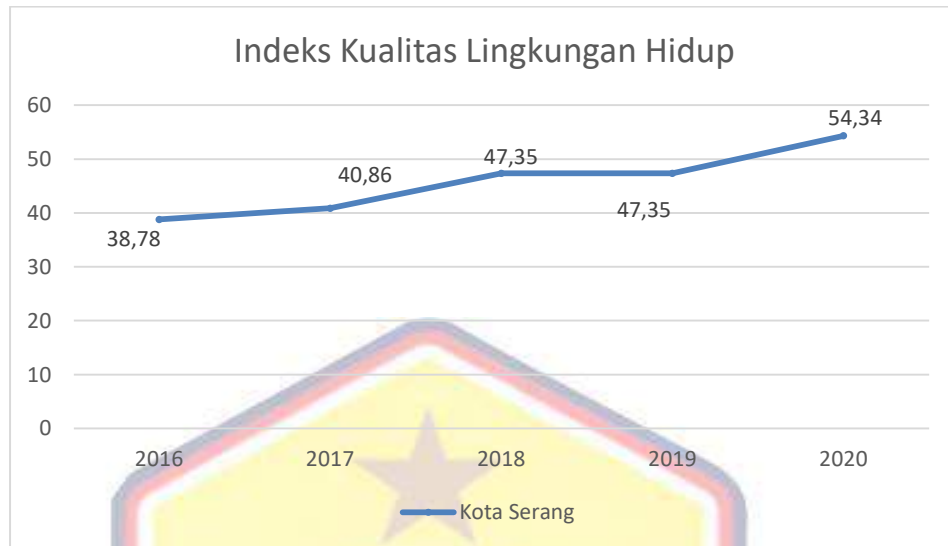
Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) memiliki rentang nilai dan kategori sebagai berikut:

Nilai Interval	Kategori
$> 90$	Unggul
$82 < X \leq 90$	Sangat Baik
$74 < X \leq 82$	Baik
$66 \leq X \leq 74$	Cukup
$58 \leq X < 66$	Kurang
$50 \leq X < 58$	Sangat Kurang
$X < 50$	Waspada

IKLH Kota Serang tahun 2020 adalah sebesar 54,34 poin. Indeks tersebut mengalami peningkatan dari tahun 2019 seperti tersaji dalam grafik 3.10 berikut:

**Grafik 3.10**

**Indeks Kualitas Lingkungan Hidup Kota Serang Tahun 2016–2020**



Sumber : DLH Kota Serang, Tahun 2020

Dari grafik 3.10 di atas, Kota Serang memiliki angka sebesar 54.34. Hal ini menyimpulkan bahwa status lingkungan hidup Kota Serang pada tahun 2020 berada dalam posisi **sangat kurang**. Kondisi ini memiliki makna bahwa lingkungan hidup di Kota Serang masih belum memenuhi kriteria lingkungan yang baik dan sehat.

Tujuan daerah terwujudnya kualitas lingkungan hidup dalam menjamin pembangunan berkelanjutan ditunjang dengan 2 sasaran strategis sebagai berikut:

**a. Sasaran meningkatnya kualitas pengelolaan lingkungan hidup**

Sasaran meningkatnya kualitas pengelolaan lingkungan hidup dicapai dengan meningkatkan Indeks Kualitas / Pencemaran Air, Indeks Kualitas / Pencemaran Udara dan Indeks Tutupan Hutan/Lahan.

**Tabel 3.17**

**Capaian Kinerja Meningkatnya Kualitas Pengelolaan Lingkungan Hidup Tahun 2020**

No	Indikator Kinerja	Satuan	Kondisi Awal Tahun 2018	Tahun 2020		
				Target	Realisasi	%
1.	Indeks kualitas mutu udara	Poin	67,83	51	72,46	142,08

2.	Indeks kualitas mutu air	Poin	56,30	67,50	43,33	155,78
3.	Indeks kualitas mutu tutupan lahan	Poin	25,32	37	39,71	107,32
<b>Rata-rata Capaian Kinerja Sasaran</b>						<b>135,06</b>

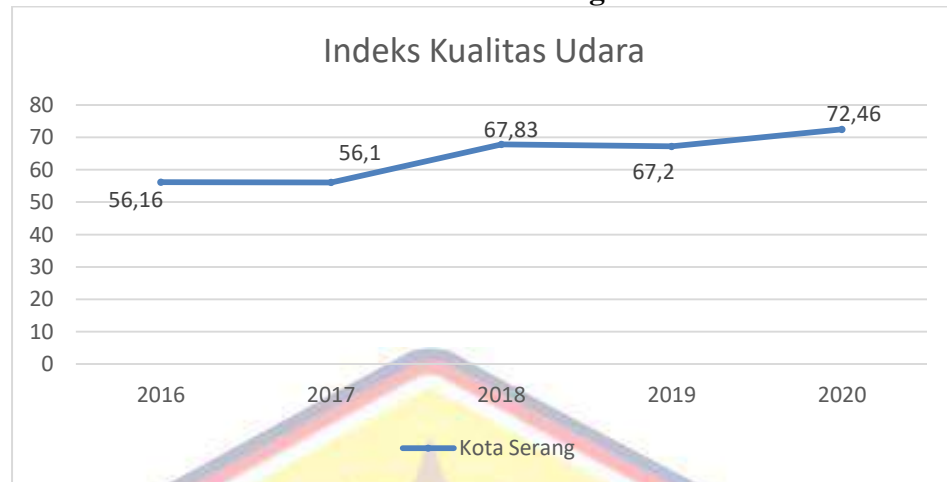
Capaian tersebut mengalami fluktuasi setiap tahun, untuk capaian terhadap target akhir RPJMD tersaji dalam tabel berikut:

**Tabel 3.18**  
**Capaian Kinerja Meningkatnya Kualitas Pengelolaan Lingkungan Hidup Tahun 2020 Terhadap Kondisi Akhir RPJMD**

No	Indikator Kinerja	Satuan	Kondisi Akhir RPJMD	Tahun 2020	
				Realisasi	%
1.	Indeks kualitas mutu udara	Poin	48	72,46	150,96
2.	Indeks kualitas mutu air	Poin	71	43,33	61,03
3.	Indeks kualitas mutu tutupan lahan	Poin	39	39,71	101,82
<b>Rata-rata terhadap RPJMD</b>					<b>104,60</b>

Dari tabel di atas terdapat beberapa kondisi atau indikator kinerja yang mengalami kenaikan dan penurunan capaian pada akhir tahun 2020. Pencapaian terhadap kondisi akhir RPJMD di tahun kedua ini untuk indeks kualitas mutu udara sudah mencapai 150,96%, Indeks kualitas mutu air baru mencapai 61,03% terdapat penurunan dari tahun 2019 yang sudah mencapai 71,90% dan Indeks kualitas mutu tutupan lahan mencapai 101,82%. Adapun capaian selama 5 tahun ke belakang untuk indeks-indeks tersebut tersaji dalam grafik 3.11 sampai dengan 3.13 berikut:

**Grafik 3.11**  
**Indeks Kualitas Udara Kota Serang Tahun 2016–2020**

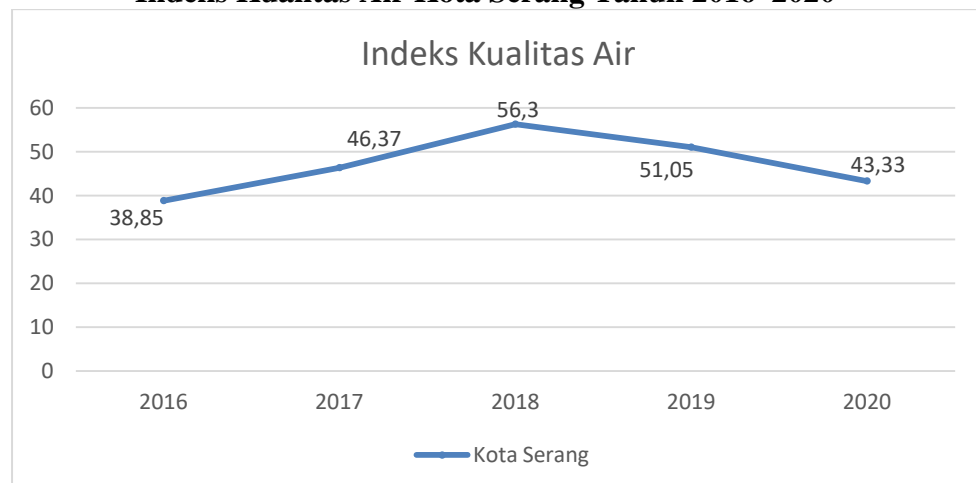


Sumber : DLH Kota Serang, Tahun 2020

Kualitas mutu udara tahun 2020 mencapai 72,46 ini menunjukkan bahwa kualitas udara kota serang tahun 2020 mengalami kenaikan dibandingkan tahun sebelumnya dengan **kategori baik**.

Ada beberapa faktor mengakibatkan udara diwilayah kota serang mengalami kenaikan kualitasnya, salah satu faktor yang menyebabkan yaitu dengan adanya pemberlakuan pembatasan sosial bersekala besar (PSBB) untuk mengurangi penyebaran virus corona, sehingga kualitas udara kota serang yang sebelumnya berada dalam kategori sedang dan tahun 2020 berada dalam **kategori baik**.

**Grafik 3.12**  
**Indeks Kualitas Air Kota Serang Tahun 2016–2020**



Sumber : DLH Kota Serang, Tahun 2019



Indeks kualitas air Kota Serang tahun 2020 masuk dalam kategori buruk, mengalami penurunan kategori dari tahun sebelumnya yaitu **tercemar ringan**. Penurunan kategori ini berdasarkan hasil penelitian disungai cibanten terdapat kandungan pencemaran air dengan mengandung fosfat. Fosfat merupakan bahan kimia yang menyebabkan pertumbuhan tak terkendali ganggang yang menutup permukaan air, sehingga menghalani sinar matahari dan mengganggu kelangsungan hidup dalam air. Kandungan Fosfat umumnya terdapat dalam detergent pencuci piring atupun pakaian. Tingginya kandungan fosfat disungai menunjukan perilaku dan kebiasaan hidup masyarakat disekitar area tersebut. Masyarakat yang langsung membuang limbah rumah tangganya kesuangai dan ada juga yang langsung menggunakan air sungai untuk mencuci pakaian dan piring tanpa mereka sadari bahwa perilaku itu mencemari sungai.

**Grafik 3.13**  
**Indeks Kualitas Tutupan Lahan Kota Serang Tahun 2016–2020**



Sumber : DLH Kota Serang, Tahun 2020

Indeks Kualitas Lahan (IKL) kota serang mterjadi peningkatan yang sangat signifikan dari 29,70 dan untuk tahun 2020 sebesar 39,71 ada kenaikan sebesar 10,01 point hal ini disebabkan adanya perubahan

dalam penetapan rumus indeks kualitas lahan yang ditetapkan oleh kementerian lingkungan hidup yaitu dengan diterbitkannya surat dari kementerian lingkungan hidup dan kehutan republik indonesia melalui direktorat jendral pengendalian pencemaran dan kerusakan lingkungan Nomor S.318/TPKL/SCT/REN.0/12/2020 tentang metoda perhitungan indeks kualitas lingkungan hidup 2020-2024, dimana indeks kualitas lahan (IKL) merupakan salah satu unsur pendukung perhitungan IKLH

Berdasarkan Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 12 Tahun 2010 Tentang Pelaksanaan Pengendalian Pencemaran Udara Di Daerah Terdapat dua prinsip umum penempatan stasiun pemantau kualitas udara, yaitu pada daerah di mana terdapat reseptor yang akan terkena dampak dan pada daerah di mana diperkirakan terdapat sumber dan konsentrasi pencemar yang tinggi. Karena dampak dan karakteristik sumber setiap polutan berbeda-beda, sehingga parameter yang dipantau di setiap lokasi dapat berbeda-beda. Dengan kata lain, tergantung pada karakteristik sumber dan pertimbangan lain seperti kondisi topografi, meteorologi dan tataguna lahan. Dalam rangka pemantauan kualitas udara dengan metode passive sampler untuk perhitungan Indeks Kualitas Udara Lokasi sampling ada 4 lokasi pada masing masing kab/kota:

1. Daerah padat transportasi (jalan utama yg lalu lintasnya padat)
2. Daerah/kawasan Industri (bukan industrinya)
3. Pemukiman padat penduduk (urban background)
4. Kawasan komersil (perkantoran, perdagangan yang tidak terpengaruh langsung transportasi).

Untuk Kota Serang ada 4 titik lokasi yang di ambil dalam rangka perhitungan indeks kualitas udara:

1. Industri : PT. PUSRI Jalan Jendral Sudirman Kemang dengan titik koordinat -6.121444,106.182672
2. Perkantoran : Kantor Dinas Lingkungan Hidup Kota Serang

- dengan titik koordinat -6.112396,106.141691
3. Pemukiman : Perumahan Penancangan dengan titik koordinat -115189,106.179634
  4. Transportasi : Alun-alun Timur (depan Ramayana) jalan Veteran dengan titik koordinat -6.117010,106.151847

Dari hasil pemantauan 4 (empat) titik lokasi tersebut dan dengan menggunakan Rumus: Indeks Kualitas Udara (IKU) Kota Serang Tahun 2020 =  $100 - (50/0.9 \times (\text{ieu} - 0,1))$  maka diperoleh Indeks Kualitas Udara (IKU) Kota Serang Tahun 2020 adalah sebesar **72,46 poin** dan masuk dalam kategori **Baik** hal ini melebihi target yang telah ditetapkan dalam IKU sebesar 51 point.

Nilai Indeks Kualitas Air (IKA) untuk satu titik & periode pemantauan merupakan total penjumlahan dari perwakilan masing-masing nilai sub indeks parameter kualitas air dengan bobot parameter sesuai dengan rumus. Secara umum nilai Indeks Kualitas Air dipengaruhi oleh berbagai variable antara lain:

1. Penurunan beban pencemaran serta upaya pemulihan (restorasi) pada beberapa sumber air;
2. Ketersediaan & fluktuasi debit air yang dipengaruhi oleh perubahan fungsi lahan serta factor cuaca local, iklim regional, dan global;
3. Penggunaan air;
4. Tingkat erosi dan sedimentasi.

Tahun 2020 Dinas Lingkungan Hidup Kota Serang mengambil sampel pengujian air pada 4 (empat) titik sampel dan dilakukan dalam sebulan 4 (empat) kali, yaitu pada aliran sungai Kaibon, Bendungan Gelam, Kaujon Serang, dan Cibeurih. Setiap titik pemantauan diasumsikan sebagai satu data dan akan memiliki status kualitas air. Konsentrasi parameter yang diukur dibandingkan dengan baku mutu air, apabila nilai /Lij lebih besar dari 1,0 maka digunakan nilai /Lij baru dengan rumus sebagai berikut:  $(/Lij) \text{ baru} = 1,0 + P.\log(/Lij)$  Selanjutnya dilakukan penghitungan indeks pencemaran, dengan



formula sebagai berikut: Keterangan: / Lij M : nilai maksimum dari / Lij / Lij R : nilai rata-rata dari /Lij Evaluasi terhadap nilai Pij: Memenuhi baku mutu jika  $0 < Pij \leq 1$  Tercemar ringan jika  $1,0 < Pij \leq 5,0$  Tercemar sedang jika  $5,0 < Pij \leq 10,0$  Tercemar berat jika  $Pij > 10,0$  Transformasi nilai IPA ke dalam indeks kualitas pemenuhan baku mutu. Persentase pemenuhan baku mutu didapatkan dari hasil penjumlahan titik sampel yang memenuhi baku mutu terhadap jumlah sampel dalam persen. Sedangkan bobot indeks diberikan batasan sebagai berikut : 70 untuk memenuhi baku mutu, 50 untuk tercemar ringan, 30 untuk tercemar sedang, dan 10 untuk tercemar berat. Parameter yang dinilai dalam indikator kualitas air yaitu TSS,DO, COD, BOD, Fosfat, dan Total Coliform.

Dari hasil pengujian kualitas air yang dilakukan Dinas Lingkungan Hidup Kota Serang, maka diperoleh Indeks Kualitas Air (IKA) Tahun 2020 sebesar 43,33 **poin** atau masuk kedalam kategori **Buruk**. Indeks Kualitas Air Kota Serang tahun 2020 masuk dalam kategori buruk, hal ini di pengaruhi oleh factor alam, manusia, industri di sekitar yang mengakibatkan kondisi air kualitasnya menjadi buruk.

Perhitungan Indeks Kualitas Tutupan Lahan (IKTL) di ambil tutupan lahan yang bercirikan hutan dan lahan-lahan yang sudah ditetapkan sebagai ruang terbuka hijau, sempadan sungai, kebun raya dan taman keanekaragaman hayati. Saat ini Kota Serang belum memiliki Kebun Raya ataupun Taman Keanekaragaman hayati sehingga tidak tersedia untuk keperluan perhitungan IKTL. Berdasarkan peta penutupan lahan Tahun 2020 tutupan lahan yang bercirikan hutan antara lain yaitu hutan lahan kering sekunder, hutan bakau, hutan kota, dan hutan tanaman. Untuk ruang terbuka hijau teridentifikasi antara lain RTH Kopasus Group 1, Taman Debus, Stadion Maulana Yusuf, Alun-alun Kota Serang dan RTH Tol Jakarta–Merak yang melintasi Kota Serang. Sedangkan untuk sempadan sungai teridentifikasi lahan dengan tutupan lahan perkebunan/kebun pada sepanjang Sungai Cibanten.



Untuk menghitung Indeks Kualitas Tutupan Lahan Dinas Lingkungan Hidup Kota Serang Tahun 2020 menggunakan persamaan:

$$IKTL = 100 - ([84.3 - (TH \times 100)] \times \frac{50}{54,3})$$

Dari hasil perhitungan Indeks kualitas Tutupan Lahan yang dilakukan Dinas Lingkungan Hidup Kota Serang, maka diperoleh Indeks Kualitas Tutupan Lahan (IKTL) Tahun 2020 diperoleh nilai sebesar 39,71

Indeks tutupan lahan relatif tetap pada nilai 25,32 di tahun 2016 – 2018, tahun 2019 naik 29,7 namun di tahun 2020 naik kembali menjadi 39,71, hal ini menunjukkan adanya perubahan luas wilayah hutan primer dan hutan sekunder.

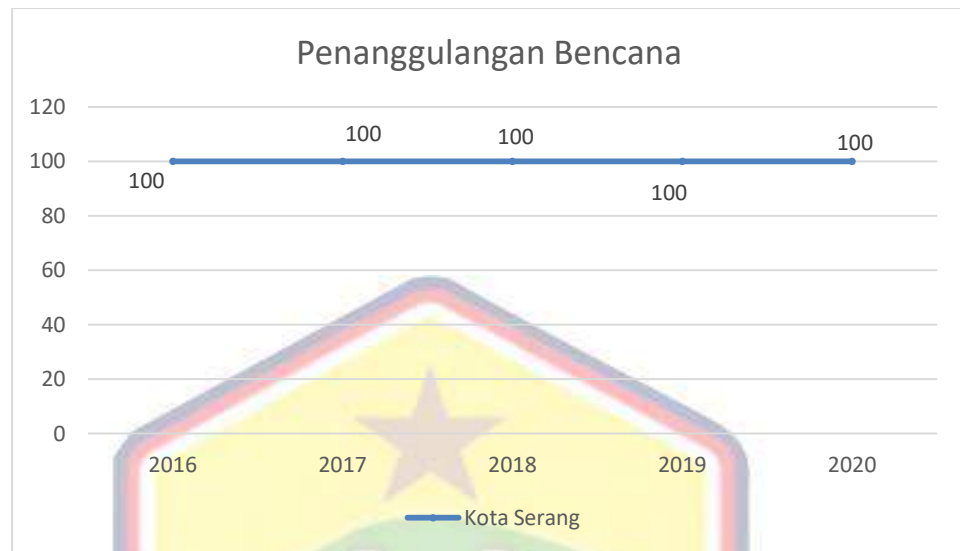
Peningkatan kualitas IKU, IKA dan IKTL masih di bawah target yang ingin dicapai karena terus bertambahnya jumlah penduduk, jumlah kendaraan dan perilaku masyarakat yang belum begitu sadar dengan lingkungan, upaya pemerintah Kota Serang untuk meningkatkan kualitas lingkungan hidup melalui program pengendalian pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup, penataan dan perlindungan pengelolaan lingkungan hidup program penataan ruang serta pengelolaan sampah dan B3.

#### **b. Sasaran meningkatnya mitigasi dan penanggulangan bencana**

Bencana yang terjadi tidak pernah diduga sebelumnya, namun kami telah memperkirakan untuk upaya penanggulangan bencana yang mungkin terjadi. Setiap kali bencana terjadi, maka tuntutan publik/masyarakat terhadap peran serta pemerintah dalam menanggulangnya selalu mengemuka. Pemerintah diharapkan sebagai pihak yang paling mampu menangani bencana, mulai dari masalah antisipasi dini sampai pada proses penanganan dampak yang ditimbulkannya (rehabilitasi).



**Grafik 3.14**  
**Cakupan Penanggulangan Bencana Tahun 2016–2020**



Sumber : BPBD Kota Serang, Tahun 2020

Dari grafik tersebut di atas, dapat diketahui bahwa penanganan terhadap korban bencana telah dilaksanakan secara maksimal, mulai dari penanganan sampai pemulihan dampak bencana.

**Tabel 3.19**  
**Capaian Kinerja Meningkatnya Mitigasi dan Penanggulangan Bencana Tahun 2020**

No	Indikator Kinerja	Satuan	Kondisi Awal Tahun 2018	Tahun 2020		
				Target	Realisasi	%
1.	Cakupan Penanggulangan Bencana	%	100	100	100	100
<b>Rata-rata Capaian Kinerja Sasaran</b>						<b>100</b>

Sasaran meningkatnya mitigasi dan penanggulangan bencana juga ditunjang dengan indikator cakupan penanggulangan bencana, dengan capaian pada tahun 2020 sebesar 100% dari target yang

ditetapkan sebesar 100%, yang artinya setiap bencana atau musibah yang terjadi di Kota Serang selalu ditanggulangi seluruhnya.

**Tabel 3.20**  
**Capaian Kinerja Meningkatnya Mitigasi dan Penanggulangan**  
**Bencana Tahun 2020 Terhadap Kondisi Akhir RPJMD**

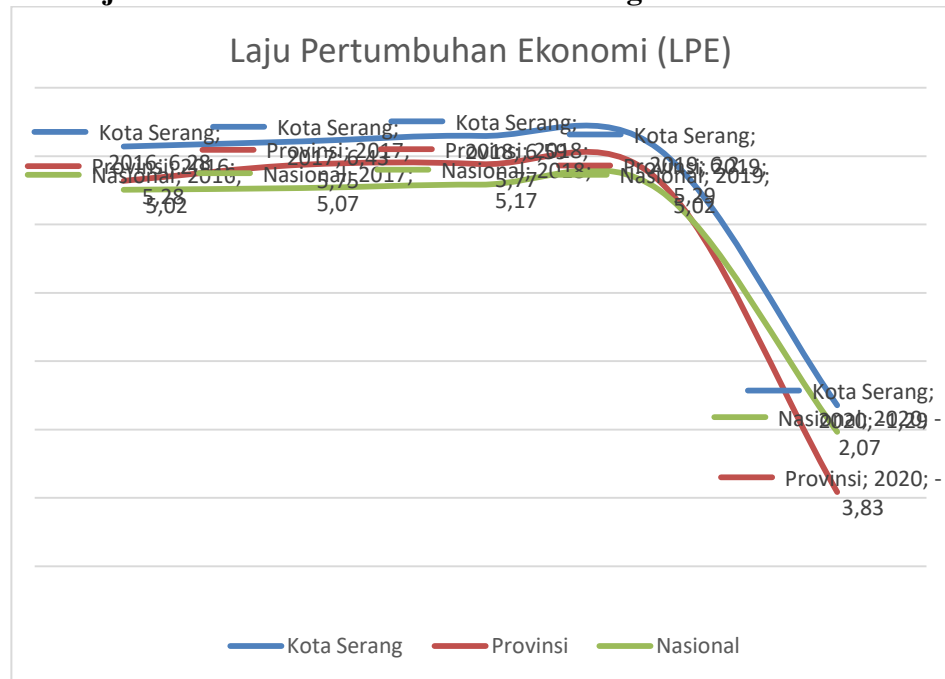
No	Indikator Kinerja	Satuan	Kondisi Akhir RPJMD	Tahun 2020	
				Realisasi	%
1.	Cakupan Penanggulangan Bencana	%	100	100	100
<b>Rata-rata terhadap RPJMD</b>					<b>100</b>

Dari tabel di atas pencapaian terhadap kondisi akhir RPJM di tahun pertama ini untuk cakupan penanggulangan bencana mencapai 100%, artinya tahun ini Kota Serang dapat menanggulangi bencana yang terjadi sesuai target yang ditetapkan dalam RPJMD melalui pelaksanaan program pencegahan dan kesiap siagaan bencana, program darurat bencana serta pemulihan pasca bencana.

#### **4. Tujuan tercapainya pertumbuhan ekonomi daerah yang berkualitas dan inklusif berbasis potensi keunggulan lokal daerah**

Laju Pertumbuhan Ekonomi (LPE) Kota Serang pada Tahun 2020 berkontraksi sebesar -1,29% dimana pencapaian tersebut sangat rendah dibandingkan Tahun 2019 yang mencapai 6,20%. Hal ini juga imbas dari adanya wabah covid-19 yang mengakibatkan banyak sektor mengalami perubahan yang signifikan terutama sektor perekonomian masyarakat Kota Serang. Berbagai macam upaya yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah untuk menekan persebaran Covid-19 dengan harapan tidak memperburuk kondisi ekonomi di tahun 2020, namun upaya tersebut tidak dapat terealisasi secara maksimal sehingga wabah covid semakin meningkat. Grafik yang menunjukkan perkembangan Laju Pertumbuhan Ekonomi terlihat pada grafik 3.15 berikut:

**Grafik 3.15**  
**Laju Pertumbuhan Ekonomi Kota Serang Tahun 2016–2020**



Sumber : BPS Kota Serang, Tahun 2020

Selama periode 2016-2020, laju pertumbuhan ekonomi Kota Serang selalu lebih tinggi jika dibandingkan dengan Provinsi Banten dan Nasional. Hal ini menunjukkan bahwa pertumbuhan ekonomi Kota Serang relatif lebih baik jika dibandingkan dengan kondisi ekonomi makro secara regional Banten dan nasional. Secara umum, pertumbuhan ekonomi Kota Serang tahun 2016-2019 setiap tahunnya menunjukkan trend kenaikan dan cukup stabil terhadap gangguan/guncangan eksternal, baik dalam tataran global ataupun domestik. Pada tahun 2020 LPE mengalami penurunan sampai -1,29 hal ini akibat pengaruh/dampak dari kondisi wabah Covid-19. Faktor yang mempengaruhi diantaranya menurunnya faktor ekonomi dari bidang jasa dan perdagangan yang menjadi andalan Pemerintah Kota Serang. Penurunan ini harus dapat ditingkatkan agar relatif stabil iklim perekonomian di Kota Serang sehingga harus tetap dijaga dan dipelihara oleh semua pemangku kepentingan agar dapat meningkatkan laju pertumbuhan ekonomi yang tinggi.

**a. Sasaran meningkatnya perekonomian daerah dan daya beli masyarakat**

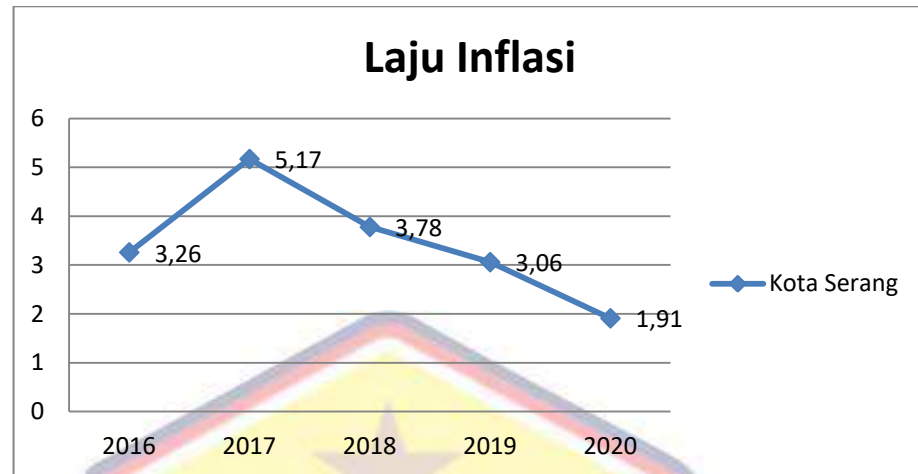
Capaian Kinerja meningkatnya perekonomian daerah dan daya beli masyarakat diukur dengan 6 indikator dengan capaian sebagai berikut:

**Tabel 3.21**  
**Capaian Kinerja Meningkatnya Perekonomian Daerah dan Daya Beli Masyarakat Tahun 2020**

No	Indikator Kinerja	Satuan	Kondisi Awal Tahun 2018	Tahun 2020		
				Target	Realisasi	%
1.	Tingkat inflasi daerah	%	3,78	3 – 5	1,91	63,67
2.	Indeks daya beli	Poin	78,76	80,44	78,65	97,77
3.	PDRB per kapita	Juta Rp.	42,68	46,50	45,17	97,14
4.	Indeks Ketimpangan Regional Williamson	Poin	0,55	0,53	0,48	110,42
5.	Angka Kemiskinan	%	5,36	5,16	6,06	85,411
6.	Tingkat Pengangguran Terbuka	%	8,16	8,05	9,26	86,93
<b>Rata-rata Capaian Kinerja Sasaran</b>						<b>90,18</b>

Tingkat inflasi Kota Serang tahun 2020 mencapai 1,91% lebih rendah dibandingkan tahun 2019, fluktuasi tingkat inflasi di Kota Serang terlihat pada grafik 3.16 berikut:

**Grafik 3.16**  
**Laju Inflasi Kota Serang Tahun 2016–2020**



Sumber : BPS Kota Serang, Tahun 2020

Kota Serang selama periode 2016-2020 mengalami fluktuasi penurunan laju inflasi tiap tahunnya. Pada tahun 2016 tingkat inflasi ada di kisaran 3,26%, pada tahun 2017 tingkat inflasi yang ada mengalami peningkatan sebesar 5,17%. Namun pada tahun 2018, tingkat inflasi Kota Serang mengalami penurunan yang cukup signifikan menjadi 3,78%. Pada tahun 2019, inflasi Kota Serang mengalami penurunan signifikan menjadi sebesar 3,06% dan pada tahun 2020 menurun kembali 1,15% dari tahun 2019, hal ini dipengaruhi salah satunya daya beli masyarakat yang relatif rendah, akibat harga yang tinggi serta dampak inflasi ekonomi secara nasional yakni dipengaruhi oleh pendapatan negara, hutang negara, tingginya permintaan yang tidak diimbangi kuantitas produksi, biaya produksi industri dan nilai tukar.

Indeks Daya Beli merupakan kemampuan masyarakat sebagai konsumen untuk membeli barang atau jasa yang dibutuhkan. Faktor-faktor yang mempengaruhi daya beli masyarakat antara lain tingkat pendapatan, tingkat pendidikan, tingkat kebutuhan, kebiasaan masyarakat, harga barang dan mode. Indeks Daya Beli Kota Serang 2018 sebagai kondisi awal RPJMD Kota Serang Tahun 2018 – 2023





adalah 78,76 poin. Adapun untuk tahun 2020 indeks daya beli mencapai 78,65 dari yang ditargetkan sebesar 80,44 atau 97,77 %.

PDRB per kapita Kota Serang tahun 2020 mencapai 45,17 juta rupiah dari yang ditargetkan sebesar 46,50 juta rupiah. Capaian tahun 2020 lebih besar dibandingkan kondisi awal pada tahun 2018 sebesar 42,68 juta rupiah.

Indeks Ketimpangan Regional Williamson merupakan ukuran ketimpangan pendapatan antar wilayah dengan menggunakan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) per kapita sebagai data dasar. Pengertian indeks ini adalah apabila indeks williamson semakin besar atau mendekati angka satu menunjukkan ketimpangan yang semakin besar dan apabila angka indeks williamson jauh dari angka satu atau mendekati angka nol menunjukkan ketimpangan yang semakin kecil. Batasan tingkat ketimpangan antar daerah menggunakan ukuran:

- ✓ Bila Indeks Williamson  $< 0,3$  artinya ketimpangan wilayah rendah
- ✓ Bila Indeks Williamson  $0,3-0,5$  artinya ketimpangan wilayah sedang
- ✓ Indeks Williamson  $> 0,5$  artinya ketimpangan wilayah tinggi

Indeks Williamson Kota Serang 2018 sebagai kondisi awal RPJMD Kota Serang Tahun 2018 – 2023 adalah 0,55 poin yang menandakan masih tingginya ketimpangan di Kota Serang. Adapun untuk tahun 2020 indeks williamson mencapai 0,48 atau berada pada kategori ketimpangan wilayah sedang. Keadaan ini lebih baik dari kondisi awal tahun 2018. Rendahnya ketimpangan Williamson di Kota Serang karena sudah meratanya pembangunan di seluruh Kecamatan-kecamatan dengan dilaksanakannya program-program kewilayahan baik berupa program yang bersumber dari DAU, DAK maupun APBD dan DAU T pada setiap kelurahan ..

Kemiskinan merupakan permasalahan di seluruh daerah perkotaan yang harus segera ditanggulangi. Angka kemiskinan yang terus menurun merupakan potret keberhasilan kinerja pemerintah dalam memajukan perekonomian dan kesejahteraan masyarakat..

Pemerintah Kota Serang dari tahun ke tahun telah melaksanakan upaya penanggulangan kemiskinan. Jumlah penduduk miskin dari 5,36% tahun 2018 turun menjadi 5,28% pada tahun 2019, Namun pada tahun 2020 terjadi peningkatan angka kemiskinan mencapai 6,06 hal ini karena pengaruh pandemi Covid-19. Banyak masyarakat yang kehilangan pekerjaan, usaha yang mengalami gulung tikar terutama pada sektor jasa, perdagangan serta industri.

Dari pelaksanaan program pembangunan secara menyeluruh yang mencakup bidang ekonomi, pertanian, pendidikan, kesehatan termasuk program keluarga berencana, dan prasarana pendukungnya untuk menurunkan kemiskinan pada tahun 2020 mengalami recufusing untuk penanggulangan Covid-19 sehingga tidak maksimal dan pengaruh Covid-19 itu sendiri banyak terjadi dampak terhadap penambahan kemiskinan terlihat pada grafik 3.17.

**Grafik 3.17**  
**Persentase Penduduk Miskin Tahun 2016–2020**

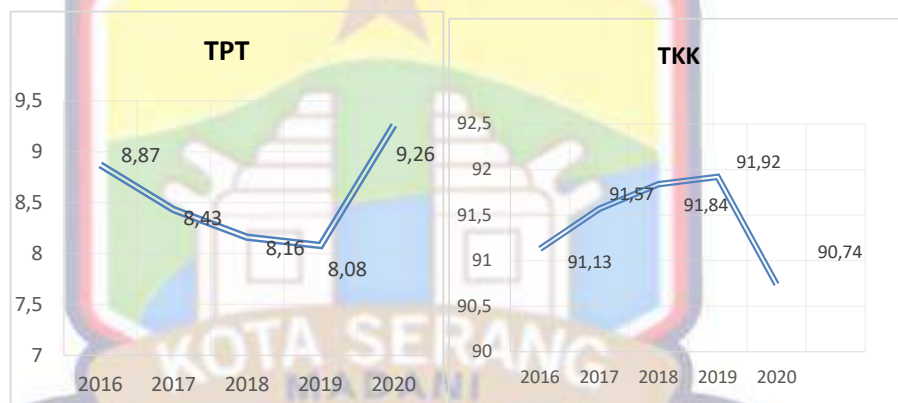


Sumber : BPS Kota Serang, Tahun 2020

Pada Tahun 2020 pelaksanaan program untuk peningkatan ketenaga kerjaan masih relatif rendah seperti bursa kerja, pelatihantenaga kerja dan lain sebagainya. Namun permasalahan mendasar dibidang ketenagakerjaan adalah masih tingginya angka

pengangguran. Hal ini disebabkan antara lain tidak sebandingnya jumlah pertumbuhan angkatan kerja dengan laju pertumbuhan kesempatan kerja, serta rendahnya kompetensi tenaga kerja dan tingkat pendidikan tenaga kerja, selain itu perkembangan industri kreatif dan wirausahawan muda belum optimal, disamping itu adanya wabah covid berpengaruh besar terhadap kondisi ketenaga kerjaan, PHK, perusahaan banyak yang mengalami pailit sehingga Tingkat pengangguran terbuka Kota Serang meningkat dari 8,08% pada Tahun 2019 menjadi sebesar 9,26% di tahun 2020.

**Grafik 3.18**  
**Tingkat Pengangguran Terbuka 2016–2020**



Sumber : BPS Kota Serang, Tahun 2020

**Tabel 3.22**  
**Capaian Kinerja Meningkatnya Perekonomian Daerah dan Daya Beli Masyarakat Tahun 2020 Terhadap Kondisi Akhir RPJMD**

No	Indikator Kinerja	Satuan	Kondisi Akhir RPJMD	Tahun 2020	
				Realisasi	%
1.	Tingkat inflasi daerah	%	3 – 5	1,91	63,67
2.	Indeks daya beli	Poin	83,61	78,65	94,07
3.	PDRB per kapita	Juta Rp.	52,50	45,17	86,04
4.	Indeks Ketimpangan Regional Williamson	Poin	0,50	0,48	96,00
5.	Angka Kemiskinan	%	4,86	6,06	124,69



6.	Tingkat Terbuka	Pengangguran	%	7,93	9,26	116,77
<b>Rata-rata terhadap RPJMD</b>						<b>96,87</b>

Dalam tahun kedua RPJMD capaian kinerja perekonomian daerah dan daya beli masyarakat tahun 2020 banyak mengalami penurunan dari target yang telah ditetapkan dalam RPJMD hal ini karena terjadi refocusing dan dampak dari terjadinya wabah Covid-19, upaya pemerintah kota serang dalam meningkatkan perekonomian daerah dan daya beli masyarakat dilakukan melalui program pembinaan, peningkatan perekonomian daerah, kualitas kelembagaan koperasi, pemberdayaan pengembangan umkm, perdagangan, pengelolaan pasar, pengembangan industri, peningkatan produksi dan produktivitas pertanian, peningkatan produksi dan bina usaha perternakan, peningkatan produksi dan pemasaran hasil perkebunan, pengembangan produksi dan pemasaran hasil perikanan, peningkatan ketahanan pangan, promosi pariwisata, program destinasi parawisata dan bina usaha, peningkatan daya saing penanaman modal peningkatan pengendalian dan pengawasan penanaman modal, penanganan fakir miskin, perlindungan dan jaminan sosial, pemberdayaan kelembagaan kesejahteraan sosial, rehabilitas sosial, peningkatan kualitas dan produktivitas tenaga kerja, penempatan tenaga kerjadan perluasan kesempatan kerja, pembinaan hubungan industrial dan peningkatan jaminan sosial ketenagakerjaan, penyelenggaraan transmigrasi dan pemberdayaan masyarakat.

#### **5. Tujuan terwujudnya tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih serta layanan publik yang prima berbasis teknologi informasi**

Tujuan terwujudnya tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih serta layanan publik yang prima berbasis teknologi informasi diukur dengan indikator indeks reformasi birokrasi. Berdasarkan hasil evaluasi

Reformasi Birokrasi Kota Serang oleh Kemenpan RB, indeks reformasi birokrasi Kota Serang untuk tahun 2017 - 2019 adalah sebagai berikut:

**Tabel 3.23**  
**Hasil Evaluasi Reformasi Birokrasi Kota Serang Tahun 2017-2019**

No	Komponen Penilai	Bobot	Nilai		
			2017	2018	2019
<b>I</b>	<b>Komponen Pengungkit</b>				
1.	Manajemen Perubahan	5	2,72	2,74	2,79
2.	Penataan Peraturan Perundang-undangan	5	2,71	2,71	2,71
3.	Penataan dan Penguatan Organisasi	6	2,16	2,16	2,19
4.	Penataan Tata Laksana	5	2,33	2,40	2,53
5.	Penataan Sistem Manajemen SDM	15	9,80	10,00	10,14
6.	Penguatan Akuntabilitas	6	2,58	2,58	2,86
7.	Penguatan Pengawasan	12	3,71	3,60	3,62
8.	Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik	6	2,66	2,69	2,90
<b>Total Komponen Pengungkit (A)</b>		<b>60</b>	<b>28,67</b>	<b>28,88</b>	<b>29,74</b>
<b>II</b>	<b>Komponen Hasil</b>				
1.	Nilai Akuntabilitas Kinerja	14	6,81	7,12	7,32
2.	Survei Internal Integritas Organisasi	6	4,68	3,78	4,14
3.	Survei Eksternal Persepsi Korupsi	7	5,69	5,55	6,11
4.	Opini BPK	3	3,00	3,00	3,00
5.	Survei Internal Pelayanan Publik	10	7,80	7,90	8,83
<b>Total Komponen Hasil (B)</b>		<b>40</b>	<b>27,98</b>	<b>27,35</b>	<b>29,40</b>
<b>Indeks Reformasi Birokrasi (A+B)</b>		<b>100</b>	<b>56,65</b>	<b>56,23</b>	<b>59,14</b>
<b>Kategori</b>			<b>CC</b>	<b>CC</b>	<b>CC</b>

Untuk Evaluasi Reformasi Birokrasi tahun 2020 kota serang telah membuat dan mengirimkan laporan namun belum dikeluarkan oleh Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi RI.

Pada laporan Evaluasi Reformasi Birokrasi tahun 2020 Kota Serang telah menindaklanjuti beberapa rekomendasi hasil evaluasi tahun





2018, namun beberapa tindak lanjut masih perlu disempurnakan. Beberapa catatan yang harus diperhatikan untuk meningkatkan kualitas RB di Kota Serang adalah sebagai berikut:

- a. Implementasi RB belum mencakup seluruh OPD sebab masih fokus pada pelaksanaan kegiatan kelompok kerja (pokja) tim RB di Pemkot
- b. Belum selesai menindaklanjuti catatan terkait finalisasi penyusunan *Road Map*, peningkatan peran agen perubahan, identifikasi peraturan perundang-undangan, evaluasi kelembagaan, perbaikan peta proses bisnis sinergitas antar unit kerja, pengelolaan sistem manajemen SDM
- c. Hasil evaluasi atas pengawasan kearsipan masih pada kategori “cukup”
- d. Belum ada penyusunan *Grand Design* Teknologi Informasi (*Road Map E-Government*)
- e. Pemetaan gap kompetensi pegawai perlu ditindaklanjuti dengan *Human Capital Development Plan (HCDP)*
- f. Monitoring dan evaluasi atas pelaksanaan sistem pengawasan belum dilakukan sehingga belum dapat memberikan rekomendasi perbaikan untuk meningkatkan efektifitas pengawasan
- g. Pembangunan ZI untuk unit kerja percontohan belum dilaksanakan sehingga saat ini belum ada unit kerja yang memperoleh predikat WBK/WBBM

Survei untuk melengkapi pelaksanaan evaluasi RB 2019 menunjukkan hasil sebagai berikut:

- a. Survei kepada pegawai tentang integritas jabatan menunjukkan hasil:
  - ✓ 19% memahami tugas dan fungsi yang harus dilaksanakan dan ukuran keberhasilannya
  - ✓ 52% memahami tugas dan fungsi yang harus dilaksanakan namun tidak memahami ukuran keberhasilannya
  - ✓ 29% tidak memahami tugas dan fungsi yang harus dilaksanakan maupun ukuran keberhasilannya
- b. Survei internal terhadap integritas organisasi menunjukkan indeks 3,01 dalam skala 0 – 4 dengan rincian:

No.	Komponen	Indeks 2020
1.	Budaya organisasi dan sistem anti korupsi	2,84
2.	Integritas terkait pengelolaan SDM	3,05
3.	Integritas terkait pengelolaan anggaran	3,07
4.	Integritas kesesuaian perintah atasan dengan aturan dan norma	3,07
<b>Indeks Integritas Organisasi</b>		<b>3,01</b>

Indeks integritas organisasi di atas menggambarkan persepsi para pegawai Kota Serang terhadap kualitas penerapan sistem integritas yang berlaku secara internal. Capaian tersebut masih di bawah skor indeks integritas ideal, yaitu 3,60 sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri PAN dan RB Nomor 52 Tahun 2014. Dengan demikian, masih terdapat ruang perbaikan dalam penerapan sistem integritas pada Kota Serang.

- c. Survei eksternal ke masyarakat penerima layanan Kota Serang menunjukkan hasil sebagai berikut:
- 1) Survei persepsi pelayanan menunjukkan indeks 3,09 dalam skala 4, yang berarti masih terdapat selisih atau gap antara harapan penerima layanan dengan realitas kondisi layanan yang diterima
  - 2) Survei persepsi korupsi yang merupakan gambaran atas integritas pemberi layanan menunjukkan indeks 3,42 dalam skala 4, yang berarti masyarakat memiliki persepsi bahwa integritas aparatur pemberi layanan masih perlu ditingkatkan.

Dalam rangka meningkatkan kualitas birokrasi dan mampu lebih menumbuhkan budaya kinerja serta memperkuat integritas pegawai Kota Serang, terdapat beberapa hal yang perlu ditindaklanjuti, yaitu:

1. Melakukan finalisasi *Road Map* RB 2020 – 2024 selaras dengan RPJMD dan *Road Map* RB Nasional 2020 – 2024



2. Melaksanakan internalisasi arah perubahan yang ditetapkan kepada seluruh pegawai secara konsisten dan memastikan segala kebijakan penerapan RB dapat terimplementasikan sampai ke level unit kerja
3. Memaksimalkan peran *agent of change* sebagai penggerak perubahan di masing-masing unit kerja
4. Membangun sistem pengendalian penyusunan peraturan perundang-undangan dan mengidentifikasi peraturan perundang-undangan yang tidak harmonis dan tumpang tindih untuk selanjutnya dilakukan perbaikan
5. Mengoptimalkan pelaksanaan evaluasi kelembagaan yang dilanjutkan dengan perubahan kelembagaan untuk mendukung pencapaian kinerja
6. Membuat peta proses bisnis sesuai kebutuhan organisasi dan berbasis pada kinerja yang akan dicapai. Kemudian dilanjutkan dengan penyelarasan SOP terhadap peta proses bisnis serta melakukan monitoring terhadap penggunaan aplikasi terkait SOP.
7. Menindaklanjuti rekomendasi hasil evaluasi pengawasan kearsipan
8. Membuat, mengevaluasi dan memantau pelaksanaan *Grand Design* teknologi informasi (*Road Map E-Government*)
9. Memperbaiki sistem manajemen SDM, antara lain memperhatikan reviu standar kompetensi jabatan, penyusunan peta gap kompetensi pegawai, assessment pada seluruh pegawai, dan menerapkan *Human Capital Development Plan (HCDP)*
10. Memperhatikan penilaian kinerja individu secara berkala yang mengacu pada kinerja organisasi sebagai dasar pemberian *reward and punishment*
11. Melaksanakan monitoring dan evaluasi atas implementasi sistem pengawasan untuk memastikan efektifitas sistem pengawasan dan membangun Zona Integritas menuju WBK/WBBM pada unit kerja
12. Meningkatkan kualitas pelayanan publik dengan melakukan internalisasi budaya pelayanan prima dan didukung dengan pelatihan terkait yang berkelanjutan.

**a. Sasaran meningkatnya kualitas dan akuntabilitas pelayanan publik dan penyelenggaraan pemerintahan daerah**

Capaian Kinerja kualitas dan akuntabilitas pelayanan publik dan penyelenggaraan pemerintahan daerah diukur dengan 4 indikator dengan capaian sebagai berikut:

**Tabel 3.24**  
**Capaian Kinerja Meningkatnya Kualitas dan Akuntabilitas Pelayanan Publik dan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Tahun 2020**

No	Indikator Kinerja	Satuan	Kondisi Awal Tahun 2018	Tahun 2020		
				Target	Realisasi	%
1.	Indeks kepuasan masyarakat (IKM)	Poin	72,00	75,00	77,74	115,03
2.	Nilai LPPD Kota	Kategori	Sangat Tinggi	Sangat Tinggi	n/a	-
3.	Hasil Evaluasi AKIP	Kategori	CC	B	n/a	-
4.	Hasil Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD)	Kategori	WTP	WTP	n/a	-
<b>Rata-rata Capaian Kinerja Sasaran</b>						<b>115,03</b>

**Tabel 3.25**  
**Capaian Kinerja Meningkatnya Kualitas dan Akuntabilitas Pelayanan Publik dan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Tahun 2020 Terhadap Kondisi Akhir RPJMD**

No	Indikator Kinerja	Satuan	Kondisi Akhir RPJMD	Tahun 2020	
				Realisasi	%
1.	Indeks kepuasan masyarakat (IKM)	Poin	81	77,74	95,97
2.	Nilai LPPD Kota	Kategori	Sangat Tinggi	n/a	-
3.	Hasil Evaluasi AKIP	Kategori	BB	n/a	-
4.	Hasil Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD)	Kategori	WTP	n/a	-
<b>Rata-rata terhadap RPJMD</b>					<b>95,97</b>

Berdasarkan pengukuran indeks kepuasan masyarakat terhadap seluruh unit penyelenggara pelayanan publik yang menjadi obyek survei ini, diperoleh kesimpulan bahwa secara umum Indeks Kepuasan Masyarakat Kota Serang secara agregat pada Semester II periode Survei Semester II 2020 ini terkoreksi menjadi sebesar 77,74 yang secara umum masih terkategori memuaskan dengan kualifikasi mutu pelayanan B. Capaian ini tercatat mengalami sedikit kenaikan dibanding semester I sebesar 7,53; dan sedikit terkoreksi dibandingkan dengan capaian pada tahun 2019 sebesar 77,80, meski penurunan ini tercatat tidak signifikan.

**Tabel 3.26**  
**Nilai Persepsi, Interval IKM, Interval Konversi IKM, Mutu Pelayanan dan Kinerja Unit Pelayanan**

Nilai Persepsi	Nilai Interval IKM	Nilai Konversi IKM	Mutu Pelayanan	Kinerja Unit Pelayanan
1	1,000 – 2,5996	20,00 – 64,99	D	Tidak Baik
2	2,60 – 3,0640	65,00 – 76,60	C	Kurang Baik
3	3,0644 – 3,532	76,61 – 88,30	B	Baik
4	3,5324 – 4,000	88,31 – 100	A	Sangat Baik

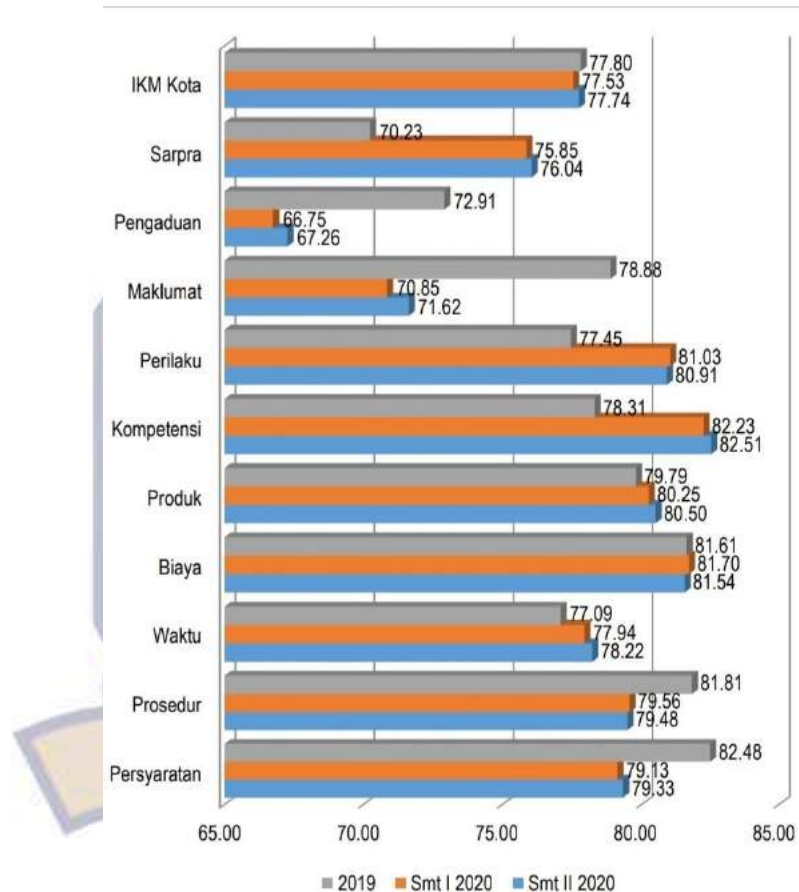
Sumber : Permenpan RB Nomor 14 Tahun 2017

Dari 10 unsur yang dinilai, 8 (delapan) dari 10 (sepuluh) unsur yang dinilai telah mencapai kualifikasi baik atau memuaskan dengan rentang indeks antara 76,61 hingga 88,30; belum ada satu pun unsur yang mencapai kualifikasi A. Meski secara umum telah terkategori baik, namun masih terdapat 3 (tiga) unsur yang bahkan masih berkualifikasi C, yaitu unsur pengelolaan pengaduan dengan indeks sebesar 67,26; unsur maklumat pelayanan dengan indeks 71,62; dan unsur sarana prasarana pelayanan dengan indeks sebesar 76,04. Ketiganya bahkan tercatat memiliki indeks di bawah IKM Kota Serang sebesar 77,74; sehingga perlu mendapat perhatian serius untuk dibenahi.



Perbandingan capaian indeks kepuasan masyarakat berdasarkan unsur-unsurnya sebagaimana dijelaskan di atas, secara grafis dapat dilihat pada grafik IKM Kota Serang Berdasarkan Unsur berikut:

**Grafik 3.19**  
**IKM Kota Serang berdasar Unsur Tahun 2019 – 2020**

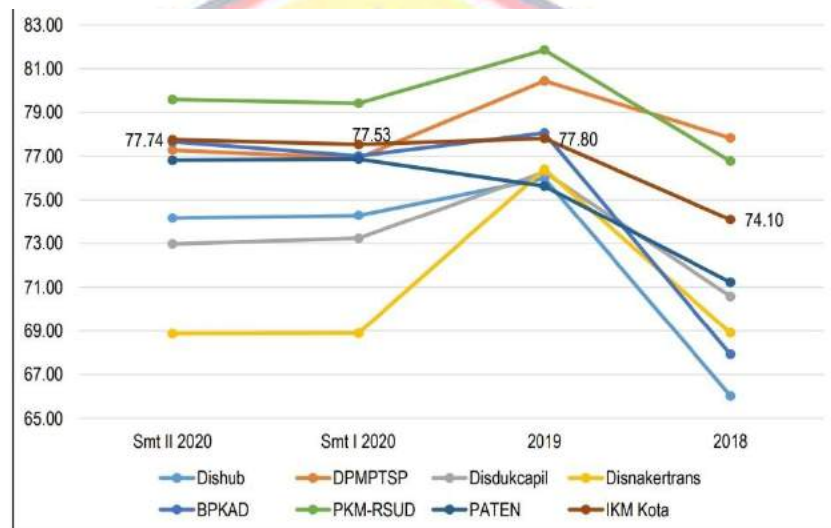


Sumber : Bappeda Kota Serang Tahun 2020

Seperti temuan pada semester I, IKM Kota Serang pada Semester II tahun 2020 paling banyak ditentukan oleh kinerja 3 (tiga) unsurnya yang paling banyak mengalami perubahan dibandingkan tahun 2019, yaitu: kompetensi petugas pelayanan, perilaku petugas pelayanan, dan sarana prasarana pendukung pelayanan yang meningkat cukup signifikan, sehingga penurunan IKM pada Semester II ini tidak terlalu signifikan. Penyelenggaraan survei kepuasan masyarakat yang dilakukan secara berkala dan konsisten setiap tahun, terbukti efektif

mampu mengidentifikasi dan memetakan permasalahan pelayanan publik di Kota Serang, sehingga meski pada IKM Semester II mengalami penurunan karena dampak dari pandemi Covid-19, namun penurunan ini masih taraf yang wajar dan terkendali. Gambaran tentang kecenderungan penurunan IKM Kota Serang pada seluruh obyek survei akibat dampak Covid-19 tersebut dapat dilihat pada grafik berikut:

**Grafik 3.20**  
**Perbandingan IKM berdasarkan Unit Pelayanan Tahun 2018-2020**



Grafik di atas menggambarkan dinamika perkembangan indeks kepuasan dari setiap unit penyelenggara pelayanan setiap tahunnya, sehingga berpengaruh pada nilai Indeks Kepuasan Masyarakat di tingkat Kota. Berdasarkan grafik di atas dapat disimpulkan bahwa secara umum IKM Kota Serang maupun IKM seluruh organisasi perangkat daerah yang disurvei mengalami penurunan dengan tingkat signifikansi penurunan yang berbeda-beda. Penurunan paling signifikan terjadi pada Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi yang pada Semester II tahun 2020 turun lagi hingga 68,87; turun signifikan dibanding IKM pada tahun 2019 yang telah mencapai 76,40. Sedangkan perangkat daerah lainnya secara umum juga mengalami penurunan meski dengan tingkat signifikansi yang berbeda-beda. Hanya Puskesmas-RSUD serta



DPMPTSP yang secara akumulatif mengalami kenaikan pada semester II Tahun 2020, itu pun tidak terlalu signifikan.

Secara umum, sebagaimana temuan pada tahun sebelumnya, diskrepansi capaian IKM yang cukup nyata antarunit pelayanan masih menggambarkan belum terinternalisasinya standar pelayanan publik secara merata pada masing-masing unit penyelenggara pelayanan publik di Kota Serang. Demikian pula dengan fluktuasi capaian IKM pada masing-masing unit yang menggambarkan belum *well established*-nya mutu dan kinerja pelayanan publik tersebut.

Kepuasan masyarakat terhadap pelayanan publik pada dasarnya merupakan kondisi dinamik dari sikap dan penilaian masyarakat terhadap berbagai dimensi atau unsur dalam penyelenggaraan pelayanan publik yang juga bersifat dinamis. Karenanya kenaikan maupun penurunan capaian IKM dapat dipahami dan ditoleransi sejauh dalam batas-batas yang wajar menurut ukuran statistik, sebab fluktuasi yang terlalu tajam pasti merepresentasi situasi abnormalitas yang patut diidentifikasi penyebabnya. Demikian pula dengan kenaikan drastis yang dapat juga dinilai irrasional bila ternyata faktanya besaran input yang diberikan ternyata terbilang biasa saja.

Fenomena turunnya IKM pada level kota maupun unit-unit penyelenggara pelayanan publik di Kota Serang pada Semester II tahun 2020 ini, diyakini masih merupakan implikasi dari situasi pandemi yang menyebabkan terjadinya sejumlah penyesuaian dalam penyelenggaraan pelayanan publik di Kota Serang. Penyesuaian yang harus disesuaikan dengan protokol kesehatan secara nyata telah menurunkan kapasitas layanan, seperti: jumlah antrian yang menjadi terbatas karena pengaturan jarak, demikian pula dengan ruang tunggu pelayanan yang kapasitasnya dikurangi karena pengaturan jarak, pengaturan waktu kerja pegawai antara pegawai yang bekerja dari kantor (*work from office*) dan bekerja dari rumah (*work from home*), dan lain-lain. Demikian pula dengan implikasi penutupan kantor-

kantor pelayanan bilamana terkonfirmasi ada kasus positif Covid-19 yang ditemukan di lingkungan kantor pelayanan tersebut, yang tentu sangat berdampak pada kepuasan masyarakat terhadap pelayanan publik di unit yang mengalaminya. Dalam 6 (enam) bulan terakhir tercatat beberapa kantor perangkat daerah di Kota Serang terpaksa ditutup sementara karena alasan dimaksud di atas, antara lain: Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, Dinas Sosial, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, dan lain-lain.

**Tabel 3.27**  
**IKM Kota Serang Berdasar Indikator Komposit Tahun 2020**

No	Indikator	Indeks	Mutu	Keterangan
1	Kemudahan Persyaratan	79.19	B	di atas rerata
2	Kemudahan Prosedur	79.43	B	di atas rerata
3	Ketepatan Waktu Buka Pelayanan	76.34	C	di bawah rerata
4	Kesesuaian Waktu Istirahat	75.48	C	di bawah rerata
5	Kesesuaian Waktu Tutup	77.63	B	di atas rerata
6	Kewajaran Lama WT Pelayanan	81.08	B	di atas rerata
7	Kewajaran Biaya	78.71	B	di atas rerata
8	Bebas Pungli	79.68	B	di atas rerata
9	Produk Sesuai Harapan	77.42	B	di atas rerata
10	Angka Komplain	74.19	C	di bawah rerata
11	Keterampilan Petugas	75.05	C	di bawah rerata
12	Kemampuan Kominfo	75.48	C	di bawah rerata
13	Pengalaman Petugas	81.29	B	di atas rerata
14	Responsivitas Petugas	77.72	B	di atas rerata
15	Non Diskriminatif	76.56	C	di bawah rerata
16	Kesantunan	76.56	C	di bawah rerata
17	Keramahan	76.77	B	di atas rerata
18	Ketersediaan Maklumat Pelayanan	78.06	B	di atas rerata
19	Integritas Maklumat Pelayanan	73.44	C	di bawah rerata
20	Ketersediaan Sarana Pengaduan	73.87	C	di bawah rerata
21	Respon Pengaduan Sesuai Harapan	72.19	C	di bawah rerata
22	Kebersihan Lingkungan	75.38	C	di bawah rerata
23	Kenyamanan Ruang Pelayanan	77,71	B	di atas rerata
24	Kebersihan Toilet Umum	71.18	C	di bawah rerata



25	Ketersediaan APAR	64.30	D	di bawah rerata
26	Efektifitas Larangan Merokok	58.49	D	di bawah rerata
27	Sarpras Tidak Membahayakan	85.38	B	di atas rerata
28	Keamanan	85.38	B	di atas rerata
29	Ketersediaan Sarpras Afirmasi	65.81	C	di bawah rerata
30	Ketersediaan Rambu2 Mitigas Bencana	69.25	C	di bawah rerata
31	Ketersediaan Pelayanan Online	60.22	D	di bawah rerata
32	Penerapan Protokol Kesehatan	72.04	C	Dibawah rerata

Sumber : Bappeda Kota Serang Tahun 2020

Berdasarkan tabel di atas teridentifikasi bahwa 6875% indikator kepuasan pelayanan di Kota Serang telah mencapai mutu B, meski masih terdapat sekira 28,13% indikator yang bermutu C, dan 3,13% bermutu D. Meski demikian 65,63% indikatornya telah mencapai indeks di atas rerata indeks agregat di tingkat Kota sebesar 77,74; dan hanya terdapat 11 dari 32 indikator yang capaiannya masih di bawah rerata. Berbeda dengan survei pada tahun 2019, terdapat indikator penerapan protokol kesehatan pada survei tahun 2020, meski hasilnya tidak diintegrasikan dalam perhitungan IKM.

Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) merupakan gambaran kinerja penyelenggaraan pemerintah daerah setiap tahun dan setiap akhir masa jabatan Kepala Daerah yang berfungsi sebagai wahana sinergitas dan sinkronisasi penyelenggaraan pemerintahan antara pemerintah daerah dan Pemerintah dalam kerangka mengevaluasi kinerja pelaksanaan program dan kegiatan yang dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah guna menunjang terwujudnya kesejahteraan masyarakat. Nilai LPPD diukur dari skor evaluasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah berdasarkan Peraturan pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah Daerah.



**Tabel 3.28**  
**Hasil Capaian Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah Daerah**  
**Kota Serang Tahun 2015-2019**

No	Tahun	Skor	Status	Urutan Nasional
1.	2016	2,7345	Tinggi	72
2.	2017	2,9606	Tinggi	70
3.	2018	3,0233	Sangat Tinggi	45
4.	2019	3,2344	Sangat Tinggi	
5.	2020	-	n/a	

Nilai LPPD Kota Serang pada tahun 2019 berdasarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri sebesar 3,2344 dengan kategori Sangat Tinggi, capaian tersebut sesuai target yang ditetapkan yaitu Sangat Tinggi atau capaian kinerja sebesar 100%. Namun urutan tingkat nasional belum dikeluarkan oleh Kementerian Dalam Negeri. Capaian tersebut lebih tinggi dibandingkan dengan capaian tahun 2018 yang mencapai nilai sebesar 3,0233. Meningkatnya capaian kinerja nilai LPPD Tahun 2019 dikarenakan penyajian data dukung LPPD yang semakin baik dan lengkap untuk penilaian tahun 2020 hasil evaluasi LPPD kota serang belum dikeluarkan oleh Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia.

Upaya yang telah dilakukan untuk meningkatkan capaian nilai LPPD antara lain mendorong OPD untuk memenuhi indikator kinerja kunci dengan akurat dan tepat serta melakukan konsultasi dan koordinasi dengan Pemerintah Provinsi Banten dan Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia, sehingga mudah-mudahan perolehan nilai LPPD Kota Serang Tahun 2020 lebih tinggi dibandingkan dengan tahun 2019 yang akan diumumkan oleh Kementerian Dalam Negeri RI.

Akuntabilitas sebagai suatu perwujudan kewajiban untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan atau kegagalan misi organisasi dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan melalui media pertanggungjawaban yang dilaksanakan secara periodik. Dalam dunia birokrasi, akuntabilitas pemerintah merupakan perwujudan kewajiban instansi pemerintah untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan misi instansi yang bersangkutan. Nilai Evaluasi AKIP Kota diukur sesuai dengan Permenpan No. 12/2015 tentang Pedoman Atas Implementasi SAKIP.

Dapat dijelaskan bahwa capaian kinerja hasil evaluasi AKIP Kota Serang tahun 2019 adalah 54,96 atau kategori CC belum memenuhi target B yang dicanangkan di tahun 2019. Atas capaian tersebut maka kinerja akuntabilitas Kota Serang tahun 2019 adalah belum sesuai target atau baru mencapai 91,60%. Capaian nilai hasil evaluasi AKIP Kota Serang tahun 2017 s.d. 2019 sebagai berikut:

**Grafik 3.21**  
**Capaian Nilai AKIP Kota Serang Tahun 2017 – 2019**



Sumber : Bagian Organisasi dan RB Setda Kota Serang, Tahun 2019

Untuk melihat perkembangan capaian kinerja hasil evaluasi AKIP Kota Serang sejak tahun 2017 meliputi meliputi 5 komponen AKIP sebagaimana tabel berikut:

**Tabel 3.29**  
**Hasil Evaluasi AKIP Kota Serang 2017 – 2019**

Komponen	Bobot	2017	2018	% Kinerja Komponen berdasarkan bobot	Bobot	2019	% Kinerja Komponen berdasarkan bobot
Perencanaan Kinerja	35	15,83	16,42	46,91	30	17,67	58,90
Pengukuran Kinerja	20	12,13	12,16	60,80	25	13,06	52,24
Pelaporan Kinerja	15	9,24	9,29	61,93	15	9,31	62,07
Evaluasi Kinerja	10	4,22	4,23	42,30	10	4,58	45,80
Capaian Kinerja	20	9,44	10,21	51,05	20	10,34	51,70
<b>Total</b>	<b>100</b>	<b>50,85</b>	<b>52,31</b>		<b>100</b>	<b>54,96</b>	
<b>Kategori</b>		<b>CC</b>	<b>CC</b>			<b>CC</b>	

Sumber : Bagian Organisasi dan RB Setda Kota Serang, Tahun 2019

Dari data tersebut di atas diperoleh gambaran bahwa secara umum terdapat peningkatan pada seluruh komponen SAKIP. Komponen evaluasi kinerja menempati posisi kinerja terendah sebesar 45,80% dan kinerja tertinggi pada komponen pelaporan kinerja sebesar 62,07%.

Capaian tersebut hanya meningkat sebesar 2,65 point dari capaian tahun 2018 sebesar 52,31 dengan kategori CC. Capaian tersebut karena belum maksimalnya komitmen Pimpinan Daerah dan seluruh Aparatur Sipil Negara di lingkungan Pemerintah Kota Serang, sehingga hasil evaluasi AKIP Kota Serang tahun 2019 belum memenuhi target yang ditetapkan tahun 2020 pemerintah kota serang telah membuat dan melaporkan Evaluasi AKIP yang ditargetkan dengan kategori B namun sampai dengan saat ini hasil evaluasi AKIP belum dikeluarkan oleh Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara

dan Reformasi Birokrasi RI, evaluasi AKIP yang dilaporkan melalui implementasi SAKIP namun terdapat beberapa kendala yang dihadapi antara lain:

1. Lemahnya dukungan atau komitmen pimpinan;
2. Adanya resistensi terhadap perubahan;
3. Lemahnya pemahaman tentang akuntabilitas kinerja;
4. Kurang Akuratnya data kinerja.

Upaya yang dilakukan cukup efektif untuk meningkatkan SAKIP Kota Serang pada tahun mendatang adalah:

- a. Langkah memperkuat komitmen pimpinan;
- b. Langkah penguatan soliditas tim fasilitasi SAKIP dan pendampingan dari Tim Kemenpan RB;
- c. Langkah penguatan kapasitas dan kesungguhan kepala OPD;
- d. Langkah komitmen membangun aplikasi e-Sakip;
- e. Langkah penetapan Pengelola data AKIP di OPD.

Dalam upaya menjaga kesinambungan dan meningkatkan kualitas implementasi SAKIP Kota Serang, serta untuk lebih mengefektifkan penerapan budaya kinerja perlu dilakukan langkah-langkah perbaikan, terdapat 3 rekomendasi yang disampaikan oleh Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan reformasi Birokrasi yaitu:

- a. Memperbaiki sistem evaluasi kinerja internal berupa penyusunan pedoman evaluasi akuntabilitas kinerja internal;
- b. Melakukan reviu berkala atas Indikator Kinerja Utama;
- c. Melakukan evaluasi atas rencana aksi dan pemantauan secara berkala atas tindak lanjut hasil evaluasi rencana aksi.

Dalam kaitannya dengan target terhadap opini Pemerintah Kota Serang dalam kaitannya dengan audit LKPD Kota Serang Tahun 2019 yang diberikan oleh BPK-RI pada Tahun 2020, menargetkan masih mendapat opini WTP (Wajar Tanpa Pengecualian) dikarenakan Pemerintah Kota Serang masih terus mengupayakan berbagai hal

dalam upaya mempertahankan opini WTP (Wajar Tanpa Pengecualian) pada Tahun 2020.

Diharapkan pada Tahun 2020 untuk pemeriksaan Laporan Keuangan Pemerintah Kota Serang per 31 Desember 2020, Pemerintah Kota Serang bisa mempertahankan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) sampai dengan akhir tahun renstra yaitu pada tahun 2023.

Dalam mempertahankan WTP dilakukan pula perbaikan manajemen kinerja dan keuangan oleh Inspektorat, beberapa upaya yang dilakukan antara lain dengan meningkatkan kepatuhan melalui pengawasan internal oleh setiap OPD dengan optimalisasi implementasi SPIP.

### C. AKUNTABILITAS KEUANGAN

Berdasarkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kota Serang Tahun 2020 yang tertuang dalam Peraturan Daerah Kota Serang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Perubahan Anggaran Pendapatandan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020, belanja daerah ditargetkan sebesar Rp.1.384.644.172.872 dengan realisasi sebesar Rp.1.322.123.502.156 yang terdiri dari Belanja Tidak Langsung ditargetkan sebesar Rp.672.950.092.966 dengan realisasi sebesar Rp.636.569.942.587 dan Belanja Langsung sebesar Rp. 711.694.079.906 dengan realisasi sebesar Rp. 685.553.559.569.

**Tabel 3.30**  
**Komposisi Belanja Pemerintah Kota Serang Tahun Anggaran 2020**  
**(Anaudited)**

No	Uraian	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%
1.	Belanja Tidak Langsung	672.950.092.966	636.569.942.587	94,59
2.	Belanja Langsung	711.694.079.906	685.553.559.569	96,33
<b>Jumlah</b>		<b>1.384.644.172.872</b>	<b>1.322.123.502.156</b>	<b>95,48</b>

Sumber : BPKAD Kota Serang, Tahun 2020



Jika dilihat dari komposisinya, belanja tidak langsung memberikan kontribusi sebesar 94,59% dari realisasi belanja Kota Serang di tahun 2020 dan sisanya sebesar 96,33% disumbangkan oleh belanja langsung.

Adapun pagu dan realisasi anggaran yang terkait dengan pencapaian target sasaran dan indikator kinerja RPJMD Kota Serang yang diperjanjikan pada tahun 2020 adalah sebesar Rp.1.285.472.985.383. Realisasi anggaran terkait pencapaian kinerja sasaran strategis Pemerintah Kota Serang tahun 2020 adalah sebesar Rp.1.322.123.502.156 atau 95,48%, dapat dilihat pada tabel berikut :

**Tabel 3.31**  
**Pagu dan Realisasi Anggaran Pemerintah Kota Serang**  
**Per Sasaran Strategis Tahun 2020**

No.	Sasaran Strategis	Rencana (Rp)	Realisasi (Rp)	%
1.	Meningkatnya derajat pendidikan masyarakat	135.348.298.396	133.322.890.570	96,10
2.	Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat	85.830.702.252	77.293.562.126	90,05
3.	Terkendalnya kuantitas, kualitas dan mobilitas pertumbuhan penduduk	3.812.684.700	3.576.917.541	93,84
4.	Meningkatnya ketersediaan dan kualitas infrastruktur wilayah	72.490.300.125	70.002.271.662	96,57
5.	Menurunnya luasan kawasan kumuh	39.085.997.234	38.148.074.064	97,60
6.	Menurunnya kemacetan lalu lintas	12.277.214.800	11.783.409.162	95,98
7.	Meningkatnya kualitas pengelolaan lingkungan hidup	33.867.420.371	33.054.459.375	97,60
8.	Meningkatnya mitigasi dan penanggulangan bencana	1.564.465.000	1.371.180.000	87,65
9.	Meningkatnya perekonomian daerah dan daya beli masyarakat	22.102.972.279	21.365.991.650	96,67



No.	Sasaran Strategis	Rencana (Rp)	Realisasi (Rp)	%
10.	Meningkatnya kualitas dan akuntabilitas pelayanan publik dan penyelenggaraan pemerintahan daerah	305.314.024.749	295.634.803.419	96,83
<b>Jumlah</b>		<b>711.694.079.906</b>	<b>685.553.559.569</b>	<b>95,48</b>

Sumber : *Bagian Organisasi dan Reformasi Birokrasi Setda Kota Serang Tahun 2020 (diolah)*

Dari tabel diatas dapat diketahui anggaran yang direncanakan dan dimanfaatkan pencapaian kinerja sasaran yang diperjanjikan Pemerintah Kota Serang pada tahun 2020, dari laporan anggaran dalam mencapai sasaran strategis sesuai tabel diatas terjadi efisiensi anggaran dalam mencapai target sasaran, hal ini terjadi karena aspek perencanaan yang matang serta kecermatan dalam penatausahaan keuangan. Terdapat beberapa capaian yang melebihi target dengan realisasi anggaran yang cukup efisien dalam dalam sasaran kegiatan meningkatkan mitigasi penanggulangan bencana, untuk sasaran strategis yang lainnya berkisar pada realisasi rata-rata diatas 90% dengan serapan anggaran secara keseluruhan 95,48%.

#### **ANALISA EFEKTIFITAS PENGGUNAAN SUMBER DAYA**

Untuk mengetahui efektifitas anggaran terhadap capaian Kinerja Sasaran Strategis Pemerintah Kota Serang, dapat diketahui dari capaian kinerja sasaran dan anggaran yang direalisasikan pada tahun 2020 sebagaimana tabel berikut:

**Tabel 3.32**  
**Efektifitas Anggaran Terhadap Capaian Tujuan dan Sasaran**  
**Pemerintah Kota Serang Tahun 2020**

No.	Tujuan & Sasaran	Jumlah Indikator	% Rerata Capaian Kinerja	Realisasi Anggaran	%
<b>A</b>	<b>Misi 1 Memperkuat peradaban yang berbasis nilai-nilai kemanusiaan</b>				
1	Tujuan Terwujudnya Sumber Daya Manusia yang Sehat, Cerdas dan Berbudaya	1	99,57	214.193.370.237	95,20
a.	Sasaran meningkatnya derajat pendidikan masyarakat	2	101,04	133.322.890.570	96,10
b.	Sasaran meningkatnya derajat kesehatan masyarakat	1	99,95	77.293.562.126	90,05
c.	Sasaran terkendalinya kuantitas, kualitas dan mobilitas pertumbuhan penduduk	1	60,23	3.576.917.541	93,84
<b>B</b>	<b>Misi 2 Meningkatkan sarana prasarana daerah yang berwawasan lingkungan</b>				
1	Tujuan terpenuhinya infrastruktur daerah yang berorientasi pada peningkatan pembangunan wilayah	1	101,92	119.933.754.888	96,84
a.	Sasaran meningkatnya ketersediaan dan kualitas infrastruktur wilayah	1	94,71	70.002.271.662	96,57
b.	Sasaran menurunnya luasan kawasan kumuh	1	30,77	38.148.074.064	97,60



No.	Tujuan & Sasaran	Jumlah Indikator	% Rerata Capaian Kinerja	Realisasi Anggaran	%
c.	Sasaran menurunnya kemacetan lalu lintas	1	64	11.783.409.162	95,98
<b>2</b>	<b>Tujuan terwujudnya kualitas lingkungan hidup dalam menjamin pembangunan berkelanjutan</b>	<b>1</b>	<b>107,92</b>	<b>34.425.639.375</b>	<b>97,16</b>
a.	Sasaran meningkatnya kualitas pengelolaan lingkungan hidup	3	135,06	33.054.459.375	97,60
b.	Sasaran meningkatnya mitigasi dan penanggulangan bencana	1	100	1.371.180.000	87,65
<b>C</b>	<b>Misi 3 Meningkatkan perekonomian daerah dan pemberdayaan masyarakat yang berdaya saing</b>				
<b>1</b>	<b>Tujuan tercapainya pertumbuhan ekonomi daerah yang berkualitas dan inklusif berbasis potensi keunggulan lokal daerah</b>	<b>1</b>	<b>-19,51</b>	<b>21.365.991.650</b>	<b>96,67</b>
a.	Sasaran meningkatnya perekonomian daerah dan daya beli masyarakat	6	90,18	21.365.991.650	96,67
<b>D</b>	<b>Misi 4 Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang baik</b>				
<b>1</b>	<b>Tujuan terwujudnya tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih serta layanan publik yang prima berbasis teknologi informasi</b>	<b>1</b>	<b>n/a</b>	<b>295.634.803.419</b>	<b>96,83</b>



No.	Tujuan & Sasaran	Jumlah Indikator	% Rerata Capaian Kinerja	Realisasi Anggaran	%
a.	Sasaran meningkatnya kualitas dan akuntabilitas pelayanan publik dan penyelenggaraan pemerintah daerah	4	115,03 ( % capaian IKM)	295.634.803.419	96,83
<b>Jumlah</b>		<b>21</b>		<b>685.553.559.569</b>	

Secara umum dapat disimpulkan bahwa penggunaan anggaran pada tahun 2020 dapat dikatakan efektif terhadap pencapaian kinerja sasaran Pemerintah Kota Serang, sasaran pencapaian yang melebihi target antara lain Sasaran meningkatnya kualitas pengelolaan lingkungan hidup sebesar 97,60% dan Sasaran meningkatnya perekonomian daerah dan daya beli masyarakat sebesar 96,67%. Namun ada pula target kinerja yang belum mencapai target realisasi anggaran seperti yang dalam pencapaian sasaran kinerja peningkatan mitigasi dan penanggulangan bencana. Namun ini dianggap efektif karena capaian kinerja mencapai 100 %. Sasaran strategis meningkatnya kualitas dan akuntabilitas pelayanan publik dan penyelenggaraan pemerintah daerah belum dapat disajikan secara tepat karena penilaian AKIP dan opini terhadap Laporan Keuangan Pemerintah Daerah belum keluar.

Untuk mencapai misi 1 (satu) dalam menguatkan peradaban yang berbasis nilai-nilai kemanusiaan dengan anggaran yang tersedia untuk mencapai terwujudnya sumber daya manusia yang sehat cerdas dan berbudaya dengan 4 indikator rerata capaian kinerja 99,57 % sedangkan anggaran yang terserap untuk mencapai tujuan misi 1 sebesar 95,20 %, ini menunjukkan efektif dalam mencapai kinerja yang ditargetkan. Pada sasaran strategis terkendalinya kuantitas, kualitas dan mobilitas pertumbuhan penduduk dengan indikator Laju Pertumbuhan Penduduk (LPP) mengalami peningkatan dari target 1,06 menjadi 1,76 pada tahun 2020, yang seharusnya target di tahun ini menurun dengan anggaran yang disediakan mencapai realisasi 93,84% namun





presentasi capaian kinerja hanya 60,23%, hal ini terjadi karena program pelayanan Keluarga Berencana tidak optimal baik di fasilitas Kesehatan, RS, Klinik dan Bidan Praktek mandiri serta pelayanan KB bergerak akibat dari adanya wabah covid 19, masyarakat banyak yang menghawatirkan penularan covid 19 termasuk tenaga Kesehatan yang mengalami keterbatasan dalam memberikan pelayanan keluarga berencana kepada masyarakat sehingga dari aspek kelahiran terjadi penambahan jumlah penduduk, begitu pula dari aspek mobilitas banyak terjadi penduduk yang kembali ke daerah asal yang sebelumnya tinggal di daerah lain karena bekerja dengan terpaksa harus kehilangan pekerjaan akibat industri, perdagangan dan jasa mengalami penurunan bahkan tidak beroperasi. Solusi terhadap permasalahan tersebut dengan meningkatkan pelayanan KB melalui PIL dan Kondom yang tidak tergantung dari pelayanan medis namun efektif untuk menunda kehamilan disamping dilaksanakan pelayanan bergerak ke masyarakat dengan protokol Kesehatan meskipun masih terbatas, namun ini cukup efektif untuk meningkatkan peserta KB aktif dan menurunkan angka putus pakai ber KB.

Untuk mencapai misi yang 2 (dua) meningkatkan sarana dan prasarana daerah yang berwawasan lingkungan dalam mencapai tujuan yang pertama terpenuhinya infrastruktur daerah yang berorientasi pada peningkatan pembangunan wilayah dengan 3 sasaran strategis dan 1 indikator dari masing-masing sasaran strategis dengan jumlah anggaran yang tersedia mampu mencapai target kinerja 101,92% dengan realisasi anggaran 96,84%, ini menunjukkan adanya efisien dan efektif dalam penggunaan anggaran untuk mencapai target kinerja. Dari 3 indikator sasaran realisasi anggaran yang efektif adalah dalam mencapai sasaran meningkatnya ketersediaan dan kualitas infrastruktur wilayah, capaian kinerja 94,71% dengan realisasi anggaran 96,57%. Ada beberapa program pada pencapaian indikator tingkat kemantapan infrastruktur wilayah pada program peningkatan pembangunan Gedung pemerintah dan fasilitas umum 93,64% dan perbaikan / pembangunan saluran drainase/ gorong-gorong sedangkan pencapaian target kinerja rata-rata realisasi 97%.



Pada sasaran strategis menurunnya luas Kawasan kumuh terjadi peningkatan capaian kinerja yang di targetkan 2% realisasi 6,50% yang seharusnya realisasi kinerja menurun dengan realisasi anggaran 97,6%. Hal ini terjadi karena adanya perubahan pedoman identifikasi Kawasan permukiman kumuh yang dibuat oleh devisi cipta karya kementerian PUPR, Sehingga perlu dilakukan perubahan target indikator sesuai pedoman tersebut untuk tahun selanjutnya.

Sasaran strategis menurunnya kemacetan lalu lintas dari target kinerja 32%, tercapai 50% dengan prosentase capaian 64% (artinya semakin kecil prosentase semakin tertangani kemacetan lalu lintas) dengan realisasi anggaran 95,98%, dengan anggaran yang tersedia tidak mencapai target yang di tetapkan 32%. Hal ini karena anggaran yang tersedia tidak memadai untuk membiayai operasional dalam menangani kemacetan Kota Serang, karena anggaran yang tersedia diperuntukan tidak hanya untuk menangani kemacetan tetapi operasional perhubungan darat, laut, serta sarana prasarana perhubungan, meskipun demikian tingkat kemacetan dapat dikendalikan sebagai dampak dari wabah Covid-19 relatif berkurang dengan adanya anjuran pemerintah untuk tetap dirumah (*stay at home*)

Capaian tujuan kedua, terwujudnya kualitas lingkungan hidup dalam menjamin pembangun berkelanjutan. Ada 3 indikator sasaran dengan capaian kinerja rerata 107,92%, sedangkan anggaran yang terealisasi 97,21% dalam mencapai sasaran strategis meningkatnya kualitas pengelolaan lingkungan hidup dengan 3 indikator mencapai rerata capaian kinerja 104,53% dengan realisasai anggaran 97,60%. Hal ini menunjukkan bahwa anggaran yang tersedia secara optimal dapat mencapai target kinerja yang di tetapkan secara efektif bahkan melabihi dari target anggaran. Meskipun terjadi penurunan pada pencapaian indikator indeks mutu air yang mencapai 43,33 poin dari target 67,50 poin. Solusi dari permasalahan ini, pemerintah kota serang harus meningkatkan kualitas air karena berada pada kategori “**Tercemar Ringan**” untuk memenuhi kebutuhan air melalui optimalisasi perusahaan daerah air bersih (PDAB) disamping program-program peningkatan kualitas lingkungan



lainnya. Sedangkan pada sasaran strategis ke-2 pada misi 2 terkait peningkatan mitigasi dan penanggulangan bencana sudah mencapai 100% dengan penggunaan anggaran yang efektif 87,65%.

Pencapaian misi 3 (tiga) meningkatkan perekonomian daerah dan pemberdayaan masyarakat yang berdaya saing untuk mencapai tujuan daerah yaitu tercapainya pertumbuhan ekonomi daerah yang berkualitas dan inklusif berbasis potensi keunggulan lokal daerah dengan sasaran kinerja meningkatnya perekonomian daerah dan daya beli masyarakat, ada 6 indikator mencapai rerata 90,18% dengan realisasi anggaran 96,60%. Hal ini menunjukkan anggaran yang tersedia secara optimal dapat mencapai target indikator yang ditetapkan. Namun belum sepenuhnya karena masih ada target indikator yang belum tercapai yakni tingkat inflasi daerah, indeks daya beli, PDRB perkapita, angka kemiskinan, dan pengangguran terbuka. Ketidaktercapaian target ini dipengaruhi oleh kondisi pandemic Covid-19. Solusi yang diambil pemerintah Kota Serang adalah melakukan perubahan target kinerja untuk tahun berikutnya dengan melakukan perubahan RPJMD yang diarahkan pada peningkatan ekonomi. Hal ini diharapkan anggaran yang tersedia mampu mendongkrak peningkatan ekonomi sehingga target kinerja tahun 2020 yang menurun terjadi peningkatan kembali.

Pencapaian misi 4 (empat) Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang baik dengan tujuan terwujudnya tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih serta layanan public yang prima berbasis teknologi informasi yang ditunjukkan dengan indeks reformasi birokrasi mencakup 1 sasaran strategis dengan 4 indikator. Pada pencapaian indikator ini, kementerian PAN-RB, Kementerian Dalam Negeri, dan BPK belum menyampaikan hasil evaluasi sampai dengan saat ini yakni AKIP, LPPD dan LKPD. Pemerintah Kota Serang menyediakan anggaran untuk mendukung reformasi birokrasi dengan realisasi anggaran sebesar 92,56% dari anggaran yang tersedia. Kami berharap tahun 2020 hasil evaluasi mengalami peningkatan dari target yang ditetapkan. Untuk mencapai peningkatan tersebut dilakukan upaya sebagai berikut:

1. Peningkatan komitmen pimpinan;
2. Melakukan perubahan-perubahan kearah lebih baik secara terarah, sistematis dan terintegrasi;
3. Memperbaiki dan menindaklanjuti rekomendasi hasil evaluasi;
4. Penguatan kapasitas team reformasi birokrasi pada setiap OPD.

### ANALISA EFISIENSI PENGGUNAAN SUMBER DAYA

Bagian yang disajikan dalam tabel ini terkait dengan efisiensi anggaran untuk sasaran yang pencapaian kinerjanya mencapai atau lebih dari 100%. Terlihat mayoritas dari 10 sasaran menunjukkan pencapaian sama atau lebih dari 100% yaitu sebanyak 4 sasaran strategis. Banyaknya sasaran yang berhasil dicapai dengan sumber daya yang efisien menunjukkan bahwa efisiensi anggaran telah mencapai tingkat yang tinggi. Kondisi ini sejalan dengan prinsip pengelolaan anggaran publik dan prinsip pemerintahan yang baik, dimana salah satunya adalah pengelolaan sumber daya anggaran yang efisien dalam mencapai tujuan dan sasaran pembangunan.

**Tabel 3.33**  
**Tingkat Efisiensi Penggunaan Sumber Daya**

No.	Tujuan & Sasaran	Jumlah Indikator	% Rerata Capaian Kinerja	Persentase Realisasi Anggaran	Tingkat Efisiensi
<b>A</b>	<b>Misi 1 Memperkuat peradaban yang berbasis nilai-nilai kemanusiaan</b>				
<b>1</b>	<b>Tujuan Terwujudnya Sumber Daya Manusia yang Sehat, Cerdas dan Berbudaya</b>	<b>1</b>	<b>99,57</b>	<b>95,20</b>	<b>4,37</b>
a.	Sasaran meningkatnya derajat pendidikan masyarakat	2	101,04	96,10	4,94
b.	Sasaran meningkatnya derajat kesehatan masyarakat	1	99,95	90,05	9,9



No.	Tujuan & Sasaran	Jumlah Indikator	% Rerata Capaian Kinerja	Persentase Realisasi Anggaran	Tingkat Efisiensi
c.	Sasaran terkendalinya kuantitas, kualitas dan mobilitas pertumbuhan penduduk	1	60,23	93,84	-
<b>B</b>	<b>Misi 2 Meningkatkan sarana prasarana daerah yang berwawasan lingkungan</b>				
<b>1</b>	<b>Tujuan terpenuhinya infrastruktur daerah yang berorientasi pada peningkatan pembangunan wilayah</b>	<b>1</b>	<b>101,89</b>	<b>96,84</b>	<b>5,05</b>
a.	Sasaran meningkatnya ketersediaan dan kualitas infrastruktur wilayah	1	94,71	96,57	-
b.	Sasaran menurunnya luasan kawasan kumuh	1	30,77	97,60	-
c.	Sasaran menurunnya kemacetan lalu lintas	1	64	97,60	-
<b>2</b>	<b>Tujuan terwujudnya kualitas lingkungan hidup dalam menjamin pembangunan berkelanjutan</b>	<b>1</b>	<b>107,92</b>	<b>97,16</b>	<b>10,76</b>
a.	Sasaran meningkatnya kualitas pengelolaan lingkungan hidup	3	135,06	97,60	37,46
b.	Sasaran meningkatnya mitigasi dan penanggulangan bencana	1	100	87,65	12,37
<b>C</b>	<b>Misi 3 Meningkatkan perekonomian daerah dan pemberdayaan masyarakat yang berdaya saing</b>				
<b>1</b>	<b>Tujuan tercapainya pertumbuhan ekonomi daerah yang berkualitas dan inklusif berbasis potensi keunggulan lokal daerah</b>	<b>1</b>	<b>-19,51</b>	<b>96,67</b>	<b>-</b>



No.	Tujuan & Sasaran	Jumlah Indikator	% Rerata Capaian Kinerja	Persentase Realisasi Anggaran	Tingkat Efisiensi
a.	Sasaran meningkatnya perekonomian daerah dan daya beli masyarakat	6	90,18	96,67	-
<b>D</b>	<b>Misi 4 Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang baik</b>				
<b>1</b>	<b>Tujuan terwujudnya tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih serta layanan publik yang prima berbasis teknologi informasi</b>	<b>1</b>	<b>n/a</b>	<b>96,83</b>	<b>-</b>
a.	Sasaran meningkatnya kualitas dan akuntabilitas pelayanan publik dan penyelenggaraan pemerintah daerah	4	115,03 (% capaian IKM)	96,83	18,2

Secara umum dapat disimpulkan bahwa penggunaan anggaran pada tahun 2020 dapat dikatakan efisien terhadap pencapaian kinerja sasaran Pemerintah Kota Serang.

#### D. PERMASALAHAN DAN SOLUSI

Pada Misi 1 Sasaran meningkatnya derajat pendidikan masyarakat, permasalahan yang dihadapi Pemerintah Kota Serang diantaranya:

1. Belum optimalnya akses dan kualitas layanan pendidikan anak usia dini, pendidikan dasar dan pendidikan masyarakat;
2. Belum terpenuhinya sarana dan prasarana penunjang layanan pendidikan dasar;
3. Kualifikasi guru dan tenaga kependidikan belum memenuhi standar, sebagai gambaran rasio rata-rata jumlah guru SD terhadap jumlah murid SD per kelas sebesar 1:41 (standar 1:32);
4. Pelaksanaan Kegiatan Belajar mengajar tidak maksimal karena terdampak covid-19 yang mengakibatkan pelaksanaan KBM secara online dan



merubah mekanisme kelulusan dan pendaftaran siswa baru ditingkat SD dan SMP.

Dengan pelaksanaan proses belajar mengajar yang dibatasi dengan pelaksanaan KBM secara online, tidak menyurutkan upaya Dinas Pendidikan dan Kebudayaan untuk peningkatan tingkat pendidikan masyarakat Kota Serang. Beberapa upaya yang dilakukan Pemerintah Kota Serang melalui Dinas Pendidikan Kota Serang yaitu:

1. Dengan legalitas yang ada pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, perencanaan dikoordinasikan, kebijakan disusun, dan pelaksanaan kebijakan disinkronkan bersama instansi lain yang terkait dalam wujud semangat *good governance*;
2. Dengan aparatur/pegawai yang profesional dan bertanggung jawab akan mampu mewujudkan tujuan pendidikan nasional;
3. Dengan sistem informasi dan komunikasi yang ada, diselenggarakan pengendalian dan pengawasan pelaksanaan pembangunan pendidikan melalui peningkatan partisipasi masyarakat dalam memberikan kontrol sosial;
4. Konsisten dalam melaksanakan tugas dan fungsi aparatur/pegawai, meningkatkan koordinasi internal guna meningkatkan konsistensi dan memantapkan tugas dan fungsi Dinas Pendidikan dan Kebudayaan;
5. Meningkatkan peran serta *stakeholders* dalam melaksanakan pembangunan pendidikan;
6. Memperkuat kapasitas sasaran pembangunan pendidikan melalui kerjasama lokal, nasional, dan regional;
7. Melaksanakan koordinasi yang efektif dan efisien untuk mengoptimalkan partisipasi instansi terkait dan *stakeholders*;
8. Sistem informasi yang ada dapat diakses oleh lembaga-lembaga lain yang mendukung mutu pelaksanaan pembangunan pendidikan;
9. Hasil pengendalian dan pengawasan dapat dijadikan bahan penegakan hukum dan pemberantasan korupsi dilingkungan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Serang;



10. Memantapkan pelaksanaan tugas dan fungsi melalui kegiatan pengembangan SDM dan pembinaan secara intensif;
11. Menyelenggarakan pertemuan secara berkala dengan berbagai instansi teknis, *stakeholders*, dan dunia usaha / industri;
12. Optimalisasi dan merevitalisasi serta memetakan cagar budaya, kesenian dan situs yang dilegalkan menjadi warisan budaya nasional di Kota Serang;
13. Mengoptimalkan pembelajaran secara online.

Pada sasaran meningkatnya derajat kesehatan masyarakat, permasalahan yang dihadapi diantaranya:

1. Terjadinya perubahan pola kejadian kematian maternal dengan disertai penyakit penyerta.
2. Masih tingginya kematian neonates dengan asfiksia dan BBLR serta balita gizi buruk.
3. Ketersediaan RS belum memenuhi standar antara lain sarana dan prasarana yang belum lengkap.
4. Adanya tenaga/SDMK yang mutasi keluar OPD Dinas Kesehatan.
5. Tidak meratanya tenaga paramedic di Puskesmas.
6. Meningkatnya sebaran Covid-19 di Kota Serang.

Upaya yang dilakukan Pemerintah Kota Serang melalui Dinas Kesehatan Kota Serang yaitu:

1. ANC terpadu dengan peningkatan screening ibu hamil, pemeriksaan oleh dokter umum di Puskesmas setiap ibu hamil pertama kontak dengan tenaga kesehatan dan pemeriksaan oleh obgyn;
2. Inovasi program Aje Kendor (Awasi Jaga Evaluasi Kehamilan Resiko Tinggi), peningkatan surevileans kematian maternal dan perinatal;
3. Mengimplementasikan PMK;
4. Upaya pemenuhan tenaga medis dengan perekrutan SDM di sarana kesehatan pemerintah;
5. Upaya pemerataan tenaga paramedis di Puskesmas yang disesuaikan dengan kebutuhan;



6. Melaksanakan sosialisasi PHBS, penggunaan masker, melaksanakan pemeriksaan terhadap masyarakat yang terindikasi atau dimungkinkan kontak dengan pasien terkonfirmasi covid-19;
7. Melaksanakan update data covid-19 di Kota Serang.

Pada sasaran 3 Misi 1 Laju Pertumbuhan Penduduk (LPP) Masih Tinggi.

Upaya yang dilakukan DP3AKB Kota Serang Dalam Upaya Mengendalikan Penduduk dari Aspek Kelahiran Yakni :

- a. Pelayanan Keluarga Berencana dengan pendekatan kolaboratif Integratif Pelayanan KB Bergerak ( KOIN Perak );
- b. Sinergitas dengan Program Lain Melalui Penertiban ADMINDUK Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil.

Pada Misi 2 :meningkatnya sarana dan prasarana daerah yang berwawasan lingkungan, permasalahan yang dihadapi : Indeks kualitas mutu air dengan kategori **Tercemar Ringan**

Solusi mengatasi permasalahan tersebut melalui Dinas Lingkungan Hidup dan dinas lain yakni :

- a. Pengendalian pencemaran air;
- b. Pemeliharaan drainase / sungai dari sampah;
- c. Sosialisasi PHBS;
- d. Optimalisasi PDAB untuk memenuhi kebutuhan air bersih masyarakat.

Pada Misi 3 meningkatnya perekonomian daerah dan pemberdayaan masyarakat yang berdaya saing. Permasalahan yang dihadapi menuirunnya laju pertumbuhan ekonomi.

Solusi mengatasi permasalahan tersebut:

1. Peningkatan daya beli masyarakat melalui operasi pasar (Dinas Koperasi, UKM, Perindustrian dan Perdagangan);
2. Menurunkan kemiskinan dan pengangguran terbuka melalui program pada karya pada setiap program pengadaan barang dan jasa;
3. Pembinaan UMKM dan usaha Kreatif serta kegiatan pemberdayaan yang lain.



Pada Misi 4 Sasaran Meningkatkan kualitas dan akuntabilitas pelayanan publik dan penyelenggaraan pemerintahan daerah pada indikator Hasil Evaluasi AKIP masih belum terevaluasi namun tahun 2020 ditargetkan dapat mencapai penilaian B. Untuk selanjutnya sebagai Langkah perbaikan sekaligus guna mendukung pencapaian sasaran dimaksud Pemerintah Kota Serang akan berupaya menerapkan langkah-langkah strategis sebagai berikut:

1. Menyelenggarakan pembinaan secara berkesinambungan serta mendorong segenap Perangkat Daerah untuk melaksanakan peningkatan akuntabilitas kinerja;
2. Meningkatkan komitmen segenap elemen Pemerintah Kota Serang untuk mewujudkan Reformasi Birokrasi khususnya dalam hal pelayanan publik sekaligus meningkatkan akuntabilitas kinerja pemerintahan;
3. Pembinaan dan evaluasi oleh APIP dilaksanakan secara konsisten dan objektif;
4. Menyusun rencana aksi perbaikan untuk mencapai target yang ditetapkan.

Kebijakan ini perlu didukung dengan komitmen segenap elemen Pemerintah Kota Serang untuk mewujudkan reformasi birokrasi khususnya dalam hal akuntabilitas kinerja pemerintahan.



**BAB  
04**

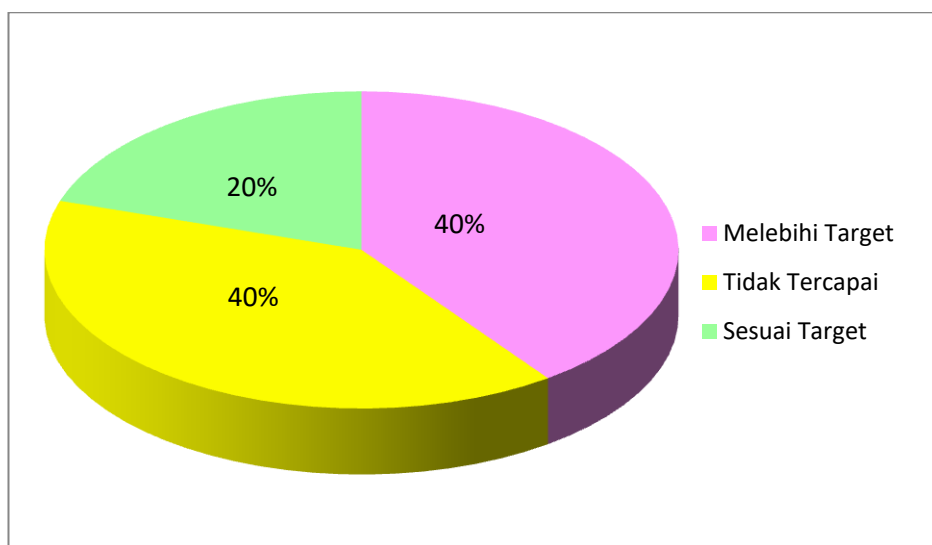
**PENUTUP**

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Pemerintah Kota Serang Tahun 2020 ini merupakan pertanggungjawaban tertulis atas penyelenggaraan pemerintah yang baik (Good Governance) Pemerintah Kota Serang Tahun 2020. Pembuatan LKjIP ini merupakan langkah dalam memenuhi Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP). Sebagai upaya untuk penyelenggaraan pemerintahan yang baik sebagaimana diharapkan oleh semua pihak.

LKjIP Pemerintah Kota Serang Tahun 2020 ini dapat menggambarkan kinerja Pemerintah Kota Serang dan evaluasi terhadap kinerja sasaran yang telah dicapai, juga dilaporkan hasil evaluasi dan analisis kinerja yang mencerminkan keberhasilan dan kegagalan.

Hasil pengukuran Tujuan Daerah pada 5 Indikator Kinerja Utama Kota Serang yang telah ditetapkan pada tahun 2020, sebagai berikut:

- ✓ 2 indikator atau 40% melebihi target dengan kategori sangat baik
- ✓ 2 indikator atau 40% tidak mencapai target kategori baik
- ✓ 1 indikator atau 20% belum ada nilai

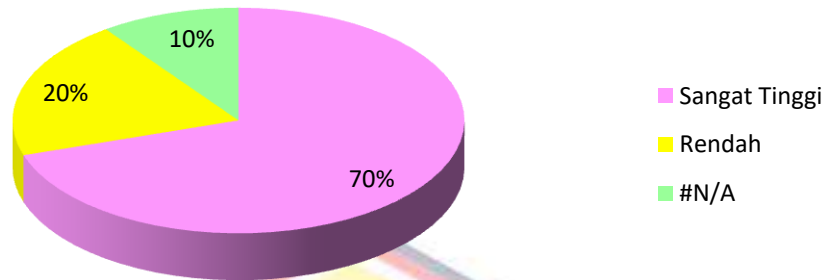




Pada tahun 2020 Pemerintah Kota Serang menetapkan sebanyak 10 (sepuluh) sasaran dengan 21 (dua puluh satu) indikator kinerja sesuai dengan Dokumen Perjanjian Kinerja Tahun 2020 yang ingin dicapai. Berdasarkan hasil pengukuran seluruh sasaran telah dapat direalisasikan dengan Sangat Baik dengan rata-rata capaian kinerja sasaran di atas 90%, sesuai target dan atau melebihi target. Secara rinci pencapaian sasaran dapat dijelaskan sebagai berikut:

- a. Sasaran 1 terdiri dari 2 indikator dengan nilai capaian 101,04%, melebihi target dengan interpretasi Sangat Tinggi
- b. Sasaran 2 terdiri dari 1 indikator dengan nilai capaian 99,95%, melebihi target dengan interpretasi Sangat Tinggi
- c. Sasaran 3 terdiri dari 1 indikator dengan nilai capaian 60,23%, tidak tercapai target dengan interpretasi Rendah
- d. Sasaran 4 terdiri dari 1 indikator dengan nilai capaian 94,71%, melebihi target dengan interpretasi Sangat Tinggi
- e. Sasaran 5 terdiri dari 1 indikator dengan nilai capaian 30,77%, tidak tercapai target dengan interpretasi Sangat rendah
- f. Sasaran 6 terdiri dari 1 indikator dengan nilai capaian 64,00%, tidak mencapai target dengan interpretasi rendah
- g. Sasaran 7 terdiri dari 3 indikator dengan nilai capaian 135,06%, tidak mencapai target dengan interpretasi Sangat Tinggi
- h. Sasaran 8 terdiri dari 1 indikator dengan nilai capaian 100%, mencapai target dengan interpretasi Sangat Tinggi
- i. Sasaran 9 terdiri dari 6 indikator dengan nilai capaian 90,18%, tidak mencapai target dengan interpretasi Sangat Tinggi
- j. Sasaran 10 terdiri dari 4 indikator dengan nilai capaian 115,03%, (1 indikator IKM) mencapai target dengan interpretasi Sangat Tinggi, 3 indikator belum ada hasil evaluasi ( n/a)

### Pencapaian Sasaran Target Strategis Kota Serang Tahun 2020



Dengan demikian pada tahun 2020 terdapat 1 (satu) indikator kinerja yang capaian kerjanya belum optimal dengan kategori cukup, sehingga perlu perhatian pada tahun-tahun berikutnya, indikator kinerja tersebut yaitu Laju Pertumbuhan Penduduk.

Laju Pertumbuhan Penduduk (LPP) sebagaimana yang direncanakan sebesar 1,06%, realisasinya LPP adalah sebesar 1,76% atau belum dapat mencapai target dengan capaian kinerja sebesar 60,23%, sehingga dampak yang muncul yaitu pemukiman yang semakin padat, kemacetan yang tinggi, persaingan dunia kerja, kerawanan social dan eksploitasi alam dan lingkungan. Untuk itu pada tahun-tahun mendatang program-program KB harus lebih dioptimalkan.

Selain itu dalam rangka meningkatkan nilai SAKIP Kota Serang, upaya yang dilakukan cukup efektif pada tahun mendatang adalah:

- a. Langkah memperkuat komitmen pimpinan
- b. Langkah penguatan soliditas tim fasilitasi SAKIP dan pendampingan dari Tim Kemenpan RB
- c. Langkah penguatan kapasitas dan kesungguhan kepala OPD
- d. Langkah membangun aplikasi e-Sakip

Sedangkan rekomendasi yang disampaikan oleh Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan reformasi Birokrasi dalam rangka perbaikan untuk tahun mendatang belum dapat kami sajikan karena sampai dengan saat ini penilaian atas SAKIP belum disampaikan kepada Pemerintah Kota Serang.



Dalam Tahun Anggaran 2020, untuk pencapaian indicator kinerja 5 (lima) tujuan daerah dan 21 (dua puluh satu) sasaran strategis pada RPJMD Kota Serang dianggarkan melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kota Serang Tahun Anggaran 2020 sebesar Rp.711.694.079.906 (unaudited) sedangkan realisasi anggaran mencapai Rp.685.553.559.569 atau dengan serapan mencapai 95,48% (data sebelum audit oleh BPK).

Akhirnya secara umum dapat disimpulkan bahwa pencapaian target terhadap beberapa indicator kinerja tahun pertama yang tercantum dalam RPJMD Kota Serang Tahun 2018-2023, dan khususnya untuk tahun 2020 yang juga dituangkan dalam Perjanjian Kinerja Kota Serang Perubahan Tahun 2020 dapat dipenuhi sesuai dengan harapan. Terhadap indikator kinerja yang capaiannya belum memenuhi target yang telah ditetapkan, kami sadari semata-mata karena kelemahan dan ketidaksempurnaan sebagai manusia, namun demikian segala kekurangan dan ketidaksempurnaan tersebut harus menjadi motivasi untuk memperbaiki lebih baik pada tahun-tahun mendatang.

Sebagaimana Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 05 Tahun 2021 Tentang Pelaporan Kinerja Pemerintah Daerah, pada angla 1 huruf a menegaskan bahwa Pemerintah daerah Kabupaten/Kota/Provinsi tidak menyusun laporan kinerja (LKj) tersendiri karena laporan kinerja disusun menjadi satu dengan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD). Selanjutnya pada angka 2 huruf c mengamanatkan bahwa laporan kinerja tahunan perangkat daerah disampaikan kepada Menteri PANRB bersamaan dengan penyampaian LPPD secara daring melalui [esr.menpan.go.id](http://esr.menpan.go.id) yang akan digunakan sebagai dasar evaluasi penerapan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP).

Atas dasar surat edaran tersebut, beberapa langkah/upaya yang akan kami lakukan antara lain :

- a. Memperkuat komitmen Perangkat Daerah dalam menyusun Laporan Kinerja secara tepat waktu.



- b. Memperkuat komitmen tentang validitas penyajian data yang tertuang dalam laporan kinerja Perangkat Daerah.
- c. Langkah penguatan tugas Tim Penyusun Laporan Kinerja dan melakukan mendampingan pada saat penyusunan Laporan Kinerja Tahunan Perangkat Daerah.
- d. Langkah penguatan kapasitas dan kesungguhan kepala Perangkat Daerah untuk memenuhi Perjanjian Kinerja.
- e. Penguatan Pegawai yang bertugas untuk mengumpulkan data, mengolah dan menganalisa data LKj.

Dengan tersusunnya Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Kota Serang ini, diharapkan dapat memberikan gambaran Kinerja Pemerintah Kota Serang kepada pihak-pihak terkait baik sebagai stakeholder ataupun pihak lain yang telah mengambil bagian dengan berpartisipasi aktif untuk membangun Kota Serang.

Serang, 30 Maret 2021

WALIKOTA SERANG

**H. SYAFRUDIN. S.Sos.,M.Si.**



Lampiran:

**Rencana dan Realisasi Kinerja dan Keuangan Kota Serang  
Tahun Anggaran 2020**

No.	Tujuan Daerah dan Sasaran Strategis	Indikator	Satuan	Kinerja			Keuangan			
				Target	Realisasi	%	Program	Pagu	Realisasi	%
A	Terwujudnya sumber daya manusia yang sehat, cerdas dan berbudaya	Indeks Pembangunan Manusia	Poin	72,47	72,16	99,57	Jumlah per Tujuan	224.991.685.348	214.193.370.237	95,20
1	Meningkatnya derajat pendidikan masyarakat	Rata-rata Lama Sekolah	Tahun	8,64	8,76	101,38	Program Pendidikan Anak Usia Dini, Nonformal dan Informal	6.772.131.458	6.326.846.850	93,42
							Program Pendidikan Sekolah Dasar	69.752.108.056	68.993.260.691	98,91
							Program Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	41.961.788.132	41.404.413.292	98,67
							Program Peningkatan Mutu Guru dan Tenaga Kependidikan	6.086.300.000	6.062.428.000	99,61
		Harapan Lama Sekolah	Tahun	12,69	12,78	100,70	Program Kepemudaan	156.360.000	152.410.000	97,47
							Program Keolahragaan	7.515.772.000	7.381.101.237	98,21
							Program Perpustakaan	1.603.738.750	1.591.978.000	99,27
							Program Kebudayaan	750.470.000	747.022.500	99,54
							Program Pengembangan Wawasan Kebangsaan	320.720.000	270.870.000	84,46
							Program Pendidikan Politik Masyarakat	428.910.000	392.560.000	91,53
							Jumlah per Sasaran	135.348.298.396	133.322.890.570	96,10
Rata-rata Capaian dari 2 indikator						101,04				

No.	Tujuan Daerah dan Sasaran Strategis	Indikator	Satuan	Kinerja			Keuangan			
				Target	Realisasi	%	Program	Pagu	Realisasi	%
2	Meningkatnya derajat Kesehatan masyarakat	Usia Harapan Hidup	Tahun	68,03	68,00	99,95	Program Kesehatan Masyarakat	5.187.544.207	3.998.647.151	77,08
							Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Menular dan Tidak Menular	3.186.135.186	2.593.922.235	81,41
							Program Pelayanan Kesehatan	8.553.855.049	7.760.006.810	90,72
							Program Sumber daya Kesehatan dan Promosi Kesehatan	52.490.865.600	47.065.871.541	89,66
							Program Peningkatan Pelayanan Kesehatan di RSUD Kota Serang	15.371.702.810	14.907.371.539	96,98
							Program Perlindungan Perempuan dan Anak	587.169.000	559.461.050	95,28
							Program Pemberdayaan Perempuan	453.430.400	408.281.800	90,04
							Rata-rata Capaian dari 1 indikator			
3	Terkendalinya kuantitas, kualitas dan mobilitas pertumbuhan penduduk	Laju Pertumbuhan Penduduk	%	1,06	1,76	60,23	Program Pengendalian Penduduk	2.115.057.700	1.980.710.800	93,65
							Program Pelayanan KB dan Ketahanan Keluarga	1.697.627.000	1.596.206.741	94,03
							Rata-rata Capaian dari 1 indikator			

No.	Tujuan Daerah dan Sasaran Strategis	Indikator	Satuan	Kinerja			Keuangan			
				Target	Realisasi	%	Program	Pagu	Realisasi	%
B	Terpenuhinya infrastruktur daerah yang berorientasi pada peningkatan pembangunan wilayah	Indeks Kepuasan Layanan Infrastruktur (IKLI) Daerah	Poin	60,70	61,85	101,89	Jumlah per Tujuan			
							123.853.512.159	119.933.754.888	96,84	
1	Meningkatnya ketersediaan dan kualitas infrastruktur wilayah	Tingkat Kemantapan Infrastruktur Wilayah	%	74	70,09	94,71	Program Pembangunan Jalan dan Jembatan	37.250.642.550	36.143.964.570	97,03
							Pengadaan sarana dan prasarana kebinamargaan	1.517.695.394	1.517.447.800	99,98
							Program Peningkatan Pembangunan gedung pemerintah dan Fasilitas Umum	10.818.715.900	10.130.156.850	93,64
							Program pembangunan saluran drainase/gorong-gorong	9.381.528.650	8.805.005.600	93,85
							Program pengembangan dan pengelolaan jaringan irigasi dan pengairan lainnya	1.922.933.831	1.915.002.000	99,59
							Program Pengendalian Banjir	844.724.800	830.642.300	98,33
							Program Rehabilitasi pemeliharaan jalan dan jembatan	8.340.000.000	8.264.337.000	99,09
							Program Pembinaan Jasa Kontruksi	3.650.000	3.650.000	100
							Program Komunikasi & Informatika	2.410.409.000	2.392.065.542	99,24
							Rata-rata Capaian dari 1 indikator			
							72.490.300.125	70.002.271.662	96,57	

No.	Tujuan Daerah dan Sasaran Strategis	Indikator	Satuan	Kinerja			Keuangan			
				Target	Realisasi	%	Program	Pagu	Realisasi	%
2	Menurunnya luas kawasan kumuh	Persentase Kawasan Kumuh	%	2,00	6,50	30,77	Program Pembangunan, Pemanfaatan dan Pengendalian Perumahan	14.037.470.764	13.838.781.222	98,58
							Program Pembangunan, Pemeliharaan dan Pengelolaan Permukiman	25.048.526.470	24.309.292.842	97,49
		Rata-rata Capaian dari 1 indikator						30,77	Jumlah per Sasaran	39.085.997.234
3	Menurunnya kemacetan lalu lintas	Persentase Potensi Titik Kemacetan	%	32	50	64	Program Pengendalian Operasional dan Rekayasa Lalu Lintas Angkutan Jalan (LLAJ)	4.972.199.400	4.726.671.000	95,06
							Program Angkutan Darat	24.350.000	13.200.000	54,21
							Program Perhubungan Laut	43.790.000	41.906.500	95,70
							Program Teknis Sarana dan Prasarana	7.236.875.400	7.001.631.662	96,75
		Rata-rata Capaian dari 1 indikator						64	Jumlah per Sasaran	12.277.214.800

No.	Tujuan Daerah dan Sasaran Strategis	Indikator	Satuan	Kinerja			Keuangan							
				Target	Realisasi	%	Program	Pagu	Realisasi	%				
C	Terwujudnya kualitas lingkungan hidup dalam menjamin pembangunan berkelanjutan	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	Poin	50,35	54,34	107,92	<table border="1"> <tr> <td>Jumlah per Tujuan</td> <td>35.431.885.371</td> <td>34.425.639.375</td> <td>97,16</td> </tr> </table>				Jumlah per Tujuan	35.431.885.371	34.425.639.375	97,16
Jumlah per Tujuan	35.431.885.371	34.425.639.375	97,16											
1	Meningkatnya kualitas pengelolaan lingkungan hidup	Indeks Kualitas Mutu Udara	Poin	51	72,46	142,08	Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Hidup	1.730.343.981	1.721.371.500	99,48				
		Indeks kualitas mutu air	Poin	67,50	43,33	155,78	Program Penataan dan Penaatan Perlindungan Pengelolaan Lingkungan Hidup	387.613.000	387.268.000	99,91				
		Indeks kualitas mutu tutupan lahan	Poin	37	39,71	107,32	Program Pengelolaan sampah dan B3	30.167.221.190	29.406.804.425	97,48				
							Program Penataan Ruang	541.080.000	515.053.450	95,19				
							Program fasilitasi administrasi pertanahan	1.041.162.200	1.023.962.000	98,35				
		Rata-rata Capaian dari 3 indikator			135,06	Jumlah per Sasaran	33.867.420.371	33.054.459.375	97,60					
2	Meningkatnya mitigasi dan penanggulangan bencana	Cakupan penanggulangan bencana	%	100	100	100	Program Pencegahan dan Kesiapsiagaan Bencana	598.500.000	423.866.000	70,82				
							Program Darurat Bencana	935.065.000	919.914.000	98,38				
							Program Pemulihan Pasca bencana	30.900.000	27.400.000	88,67				
		Rata-rata Capaian dari 1 indikator			100	Jumlah per Sasaran	1.564.465.000	1.371.180.000	87,65					



No.	Tujuan Daerah dan Sasaran Strategis	Indikator	Satuan	Kinerja			Keuangan							
				Target	Realisasi	%	Program	Pagu	Realisasi	%				
D	Tercapainya pertumbuhan ekonomi daerah yang berkualitas dan inklusif berbasis potensi keunggulan lokal daerah	Laju Pertumbuhan Ekonomi	Persen	6,61	-1,29	-19,51	<table border="1"> <tr> <td>Jumlah</td> <td>22.103.008.279</td> <td>21.365.991.650</td> <td>96,67</td> </tr> </table>				Jumlah	22.103.008.279	21.365.991.650	96,67
Jumlah	22.103.008.279	21.365.991.650	96,67											
1	Meningkatnya perekonomian daerah dan daya beli masyarakat	Tingkat inflasi daerah	%	3 – 5	1,91	63,67	Program Pembinaan dan Peningkatan Perekonomian Daerah	648.110.552	598.526.800	92,35				
							Kualitas Kelembagaan Koperasi	61.680.000	60.834.000	98,63				
							Program Pemberdayaan Dan Pengembangan Umkm	348.852.800	346.420.300	99,30				
							Program Perdagangan	989.530.000	963.963.400	97,42				
							Program Pengelolaan Pasar	2.432.944.308	2.378.374.900	97,76				
		Indeks daya beli	Poin	80.44	78,65	97,77	Program Pengembangan Industri	6.194.170.000	6.113.777.480	98,70				
							Program Peningkatan Produksi dan Produktivitas Pertanian	1.133.860.525	984.735.950	86,85				
							Program Peningkatan Produksi dan Bina usaha Peternakan	422.287.000	419.545.500	99,35				
		PDRB Per kapita	Juta (Rp)	46,50	45,17	97,14	Program Peningkatan Produksi dan Pemasaran Hasil Perkebunan	325.904.000	322.870.750	99,07				
							Program pengembangan Produksi dan Pemasaran hasil perikanan	385.432.900	361.452.100	93,78				
							Program Peningkatan Ketahanan Pangan	581.120.000	578.127.000	99,48				
					Program Promosi Pariwisata	768.715.000	739.792.000	96,24						

No.	Tujuan Daerah dan Sasaran Strategis	Indikator	Satuan	Kinerja			Keuangan			
				Target	Realisasi	%	Program	Pagu	Realisasi	%
		Indeks ketimpangan regional Williamson	Poin	0,53	0,48	110,42	Program Destinasi Pariwisata & Bina Usaha	965.828.500	891.360.500	92,29
							Program Peningkatan Daya Saing Penanaman Modal	615.235.500	562.643.000	91,45
							Program Peningkatan Pengendalian dan Pengawasan Penanaman modal	163.550.000	152.575.000	93,29
							Program Penanganan Fakir Miskin	739.950.000	732.954.000	99,05
							Program Perlindungan dan Jaminan Sosial	811.046.600	808.934.820	99,74
							Program Pemberdayaan Kelembagaan Kesejahteraan Sosial	513.915.000	509.301.000	99,10
		Angka Kemiskinan	%	5,16	6,06	85,14	Program Rehabilitasi Sosial	1.324.225.200	1.314.686.200	99,28
							Program Peningkatan Kualitas dan Produktivitas Tenaga Kerja	546.091.600	538.201.600	98,56
							Program Penempatan Tenaga Kerja dan Perluasan Kesempatan Kerja	254.997.000	252.378.600	98,97
							Program Pembinaan Hubungan Industrial dan Peningkatan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan	229.310.382	224.385.250	97,85
		Tingkat terbuka pengangguran	%	8,05	9,26	86,93	Program Penyelenggaraan Transmigrasi	199.167.412	195.771.500	98,29
							Program Pemberdayaan Masyarakat	1.447.048.000	1.314.380.000	90,83
							Rata-rata Capaian dari 6 indikator			

No.	Tujuan Daerah dan Sasaran Strategis	Indikator	Satuan	Kinerja			Keuangan			
				Target	Realisasi	%	Program	Pagu	Realisasi	%
E	Terwujudnya tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih serta layanan publik yang prima berbasis teknologi informasi	Indeks Reformasi Birokrasi Daerah	Poin	72,47	n/a	-	Jumlah	305.314.024.749	295.634.803.419	96,83
1	Meningkatnya kualitas dan akuntabilitas pelayanan publik dan penyelenggaraan pemerintah daerah	Indeks kepuasan masyarakat (IKM)	Poin	75,00	77,74	115,03	Program Penataan Daerah Otonomi Baru	88.463.863	68.316.000	77,22
		Nilai LPPD Kota	Kategori	Sangat Tinggi	n/a	-	Program Peningkatan dan Pembinaan Pemerintahan Umum	592.823.664	514.364.000	86,77
							Program Peningkatan dan Pembinaan Pemerintahan Kelurahan	641.932.204	601.359.000	93,68
		Hasil Evaluasi AKIP	Kategori	B	n/a	-	Program peningkatan pelayanan kedinasan kepala daerah/wakil kepala daerah	5.711.522.957	5.614.904.000	98,31
							Program Penataan Peraturan Perundang-Undangan	2.526.940.769	2.482.913.000	98,26
							Program pembinaan dan pengembangan aparatur	272.950.000	269.600.000	98,77
							Program Peningkatan Kelembagaan Perangkat Daerah	2.232.308.628	2.144.857.012	96,08
							Program Pengendalian Pembangunan	370.541.054	346.403.200	93,49
							Program Fasilitasi Keagamaan dan Kemasyarakatan	7.012.473.945	5.349.553.537	76,29
							Program Peningkatan Kerjasama Antar Pemerintah Daerah	885.600.815	414.991.392	46,86

No.	Tujuan Daerah dan Sasaran Strategis	Indikator	Satuan	Kinerja			Keuangan			
				Target	Realisasi	%	Program	Pagu	Realisasi	%
		Hasil Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD)	Kategori	WTP	n/a	-	Program Layanan E-Government	1.122.878.000	1.122.018.000	99,92
							Program Kerjasama Informasi dan Media Massa	2.231.260.800	2.219.406.000	99,47
							Program Pengembangan Data/Informasi/Statistik Daerah	497.100.000	494.950.000	99,57
							Program Pengelolaan Pengamanan Teknologi Informasi dan Persandian	114.710.000	113.570.000	99,01
							Program Pembinaan dan Pengembangan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah	44.308.600	44.308.600	100
							Program Penyediaan Data, Informasi dan Mitigasi Hukum Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah	255.240.000	249.220.000	97,64
							Program Pelayanan Pendaftaran Penduduk	157.294.000	148.361.000	94,32
							Program Pelayanan Pencatatan Sipil	150.000.000	150.000.000	100
							Program Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	485.706.803	477.232.500	98,26
							Program Pemanfaatan Data dan Inovasi Pelayanan Kependudukan	2.187.331.000	2.141.968.000	97,93
						Program Peningkatan Kualitas Sistem Informasi Investasi dan Perijinan yang Berdaya Saing dan Berkelanjutan	514.977.000	508.359.931	98,72	

No.	Tujuan Daerah dan Sasaran Strategis	Indikator	Satuan	Kinerja			Keuangan			
				Target	Realisasi	%	Program	Pagu	Realisasi	%
							Program Peningkatan Pelayanan Perijinan	373.692.500	277.060.500	74,14
							Program Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik	285.471.000	265.771.000	93,10
							Program Kearsipan	1.259.876.000	1.240.244.000	98,44
							Program peningkatan kapasitas lembaga perwakilan rakyat daerah	40.701.297.190	40.440.815.090	99,36
							Program pembinaan dan pengembangan aparatur	1.142.733.500	1.055.203.000	92,34
							Program Administrasi Kepegawaian	1.010.928.500	982.899.760	97,23
							Program Pendidikan dan Pelatihan	1.217.094.144	1.190.683.500	97,83
							Program peningkatan sistem pengawasan internal dan pengendalian pelaksanaan kebijakan KDH	4.328.607.970	3.862.353.970	89,23
							Program Perencanaan Infrastruktur dan Kewilayahan	1.559.445.000	1.550.013.500	99,40
							Program perencanaan pembangunan ekonomi	1.238.823.000	1.211.598.400	97,80
							Program perencanaan pembangunan daerah	2.745.637.400	2.688.769.544	97,93
							Program perencanaan sosial dan budaya	899.985.167	833.635.500	92,63



No.	Tujuan Daerah dan Sasaran Strategis	Indikator	Satuan	Kinerja			Keuangan			
				Target	Realisasi	%	Program	Pagu	Realisasi	%
							Program Penelitian, Pengembangan Kebijakan Strategis, Inovasi Daerah, dan IPTEK	763.225.000	701.977.500	91,98
							Program Penyusunan APBD	1.566.437.415	1.531.801.084	97,79
							Program Penatausahaan APBD	1.002.038.400	984.010.509	98,20
							Program Pengelolaan Barang Milik Daerah	1.334.760.000	1.246.248.816	87,39
							Program Akuntansi	991.243.000	954.381.230	96,28
							Program Pendapatan Pajak Daerah Non PBB dan BPHTP	1.205.811.500	1.127.510.500	93,51
							Program Pendapatan Pajak Daerah	1.816.179.250	1.618.615.241	89,12
							Program Ketentraman dan Ketertiban Umum	5.081.865.000	4.834.294.708	95,13
							Program penegakan produk hukum daerah	143.695.000	129.970.000	90,45
							Program peningkatan kesiagaan dan pencegahan bahaya kebakaran	2.446.174.000	2.260.883.353	92,43
							Program Penyelenggaraan Perlindungan Masyarakat dan Peningkatan Potensi Aparatur	259.647.000	235.297.000	90,62
							Program Pemerintahan Umum Kecamatan	1.546.490.814	1.516.925.000	98,09
							Program Pemberdayaan Masyarakat Kecamatan	1.715.381.000	1.590.890.124	92,74

No.	Tujuan Daerah dan Sasaran Strategis	Indikator	Satuan	Kinerja			Keuangan			
				Target	Realisasi	%	Program	Pagu	Realisasi	%
							Program Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan	27.787.591.650	27.625.164.211	99,42
							Program Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan (DAU-T)	3.993.444.273	3.766.479.681	94,32
							Program Penyediaan Sarana dan Prasarana Infrastruktur Kelurahan (DAU-T)	21.315.451.547	21.199.736.666	99,46
							Program Peningkatan Sarana dan Prasarana kelurahan	20.054.355.122	19.547.659.391	97,47
							Program Pelayanan dan Peningkatan Kapasitas Aparatur	103.505.178.926	100.553.609.966	97,15
							Program Pengelolaan dan Pelaporan Keuangan	2.143.140.416	2.084.025.105	97,24
							Program Peningkatan Perencanaan, Pengendalian dan Pelaporan Capaian Kinerja	9.063.807.805	8.865.596.855	97,81
							Program Pelayanan Administrasi Kelurahan	12.718.116.158	12.176.428.043	95,74
							<b>Jumlah per Sasaran</b>	<b>305.314.024.749</b>	<b>295.634.803.419</b>	<b>92,56</b>
							Rata-rata Capaian dari 4 indikator			115,03



## **PERUBAHAN PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2020**

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, yang bertanda tangan di bawah ini:


**Nama : H. SYAFRUDIN, S.Sos, M.Si**

**Jabatan : WALIKOTA SERANG**

berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan.

Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Serang, 23 November 2020

**WALIKOTA SERANG**  
  
**H. SYAFRUDIN, S.Sos., M.Si**

**PERUBAHAN PERJANJIAN KINERJA  
PEMERINTAH KOTA SERANG TAHUN 2020**

**MISI 1 : MENGUATKAN PERADABAN YANG BERBASIS NILAI-NILAI  
KEMANUSIAAN**

No.	Sasaran Strategis	Indikator kinerja	Satuan	Target
1	2	3	4	5
1.	Terwujudnya Sumber Daya Manusia yang Sehat, Cerdas dan Berbudaya	<b>Indeks Pembangunan Manusia</b>	<b>Poin</b>	<b>72,47</b>
	Meningkatnya derajat pendidikan masyarakat	Rata-rata Lama Sekolah	Tahun	8,64
		Harapan Lama Sekolah	Tahun	12,69
	Meningkatnya derajat Kesehatan masyarakat	Usia Harapan Hidup	Tahun	68,03
	Terkendalinya kuantitas, kualitas dan mobilitas pertumbuhan penduduk	Laju Pertumbuhan Penduduk	%	1,06

**MISI 2 : MENINGKATKAN SARANA PRASARANA DAERAH YANG  
BERWAWASAN LINGKUNGAN**

No.	Sasaran Strategis	Indikator kinerja	Satuan	Target
1	2	3	4	5
1.	Terpenuhinya infrastruktur daerah yang berorientasi pada peningkatan pembangunan wilayah	<b>Indeks Kepuasan Layanan Infrastruktur (IKLI) Daerah</b>	<b>Poin</b>	<b>60,70</b>
	Meningkatnya ketersediaan dan kualitas infrastruktur wilayah	Tingkat Kemantapan Infrastruktur Wilayah	%	74
	Menurunnya luasan kawasan kumuh	Persentase Kawasan Kumuh	%	2,00
	Menurunnya kemacetan lalu lintas	Persentase Potensi Titik Kemacetan	%	32

No.	Sasaran Strategis	Indikator kinerja	Satuan	Target
1	2	3	4	5
2.	Terwujudnya kualitas lingkungan hidup dalam menjamin pembangunan berkelanjutan	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	Poin	50,35
	Meningkatnya kualitas pengelolaan lingkungan hidup	Indeks Kualitas Mutu Udara	Poin	51
		Indeks kualitas mutu air	Poin	67,50
		Indeks kualitas mutu tutupan lahan	Poin	37
	Meningkatnya mitigasi dan penanggulangan bencana	Cakupan penanggulangan bencana	%	100

**MISI 3 : MENINGKATKAN PEREKONOMIAN DAERAH DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT YANG BERDAYA SAING**

No.	Sasaran Strategis	Indikator kinerja	Satuan	Target
1	2	3	4	5
1.	Tercapainya pertumbuhan ekonomi daerah yang berkualitas dan inklusif berbasis potensi keunggulan local daerah	Laju Pertumbuhan Ekonomi	%	6,61
	Meningkatnya perekonomian daerah dan daya beli masyarakat	Tingkat inflasi daerah	%	3-5
		Indeks daya beli	Poin	80,44
		PDRB Per kapita	Juta (Rp)	46,50
		Indeks ketimpangan regional Williamson	Poin	0,53
		Angka Kemiskinan	%	5,16
		Tingkat pengangguran terbuka	%	8,05



**MISI 4 : MENINGKATKAN TATA KELOLA PEMERINTAHAN YANG BAIK**

No.	Sasaran Strategis	Indikator kinerja	Satuan	Target
1	2	3	4	5
1.	Terwujudnya tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih serta layanan publik yang prima berbasis teknologi informasi	Indeks Reformasi Birokrasi Daerah	Poin	72,50
	Meningkatnya kualitas dan akuntabilitas pelayanan publik dan penyelenggaraan pemerintah daerah	Indeks kepuasan masyarakat (IKM)	Poin	75,00
		Nilai LPPD Kota	Kategori	Sangat tinggi
		Hasil Evaluasi AKIP	Kategori	B
		Hasil Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD)	Kategori	WTP

PROGRAM	ANGGARAN
1. Program Pelayanan dan Peningkatan Kapasitas Aparatur	Rp. 103.505.178.926
2. Program Pengelolaan dan Pelaporan Keuangan	Rp. 2.143.140.416
3. Program Peningkatan Perencanaan, Pengendalian dan Pelaporan Capaian Kinerja	Rp. 9.063.807.805
4. Program Pelayanan Administrasi Kelurahan	Rp. 12.718.116.158
5. Program Pendidikan Anak Usia Dini, Nonformal dan Informal	Rp. 6.772.131.458
6. Program Pendidikan Sekolah Dasar	Rp. 69.752.108.056
7. Program Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	Rp. 41.961.788.132
8. Program Peningkatan Mutu Guru dan Tenaga Kependidikan	Rp. 6.086.300.000
9. Program Kebudayaan	Rp. 750.470.000
10. Program Kesehatan Masyarakat	Rp. 5.187.544.207

<b>PROGRAM</b>	<b>ANGGARAN</b>
11. Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Menular dan Tidak Menular	Rp. 3.186.135.186
12. Program Pelayanan Kesehatan	Rp. 8.553.855.049
13. Program Sumber daya Kesehatan dan Promosi Kesehatan	Rp. 52.490.865.600
14. Program Peningkatan Pelayanan Kesehatan di RSUD Kota Serang	Rp. 15.371.702.810
15. Program Pembangunan Jalan dan Jembatan	Rp. 37.250.642.550
16. Program Rehabilitasi pemeliharaan jalan dan jembatan	Rp. 8.340.000.000
17. Program Pengadaan sarana dan prasarana kebinamargaan	Rp. 1.517.695.394
18. Program Peningkatan Pembangunan gedung pemerintah dan Fasilitas Umum	Rp. 10.818.715.900
19. Program Pembinaan Jasa Kontruksi	Rp. 3.650.000
20. Program Pembangunan saluran drainase/ gorong-gorong	Rp. 9.381.528.650
21. Program Pengembangan dan pengelolaan jaringan irigasi dan pengairan lainnya	Rp. 1.922.933.831
22. Program Pengendalian Banjir	Rp. 844.724.800
23. Program Penataan Ruang	Rp. 541.080.000
24. Program Fasilitasi Administrasi Pertanahan	Rp. 1.041.162.200
25. Program Pembangunan, Pemanfaatan dan Pengendalian Perumahan	Rp. 14.037.470.764
26. Program Pembangunan, Pemeliharaan dan Pengelolaan Permukiman	Rp. 25.048.526.470
27. Program Ketentraman dan Ketertiban Umum	Rp. 5.081.865.000
28. Program Penegakan produk hukum daerah	Rp. 143.695.000
29. Program Peningkatan kesiagaan dan pencegahan bahaya kebakaran	Rp. 2.446.174.000
30. Program Penyelenggaraan Perlindungan Masyarakat dan Peningkatan Potensi Aparatur	Rp. 259.647.000
31. Program Pencegahan dan Kesiapsiagaan Bencana	Rp. 598.500.000
32. Program Darurat Bencana	Rp. 935.065.000
33. Program Pemulihan Pasca bencana	Rp. 30.900.000
34. Program Penanganan Fakir Miskin	Rp. 739.950.000
35. Program Perlindungan dan Jaminan Sosial	Rp. 811.046.600

<b>PROGRAM</b>	<b>ANGGARAN</b>
36. Program Pemberdayaan Kelembagaan Kesejahteraan Sosial	Rp. 513.951.000
37. Program Rehabilitasi Sosial	Rp. 1.324.225.200
38. Program Peningkatan Kualitas dan Produktivitas Tenaga Kerja	Rp. 546.091.600
39. Program Penempatan Tenaga Kerja dan Perluasan Kesempatan Kerja	Rp. 254.997.000
40. Program Pembinaan Hubungan Industrial dan Peningkatan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan	Rp. 229.310.382
41. Program Penyelenggaraan Transmigrasi	Rp. 199.167.412
42. Program Perlindungan Perempuan dan Anak	Rp. 587.169.000
43. Program Pemberdayaan Perempuan	Rp. 453.430.400
44. Program Pemberdayaan Masyarakat	Rp. 1.447.048.000
45. Program Pengendalian Penduduk	Rp. 2.115.057.700
46. Program Pelayanan KB dan Ketahanan Keluarga	Rp. 1.697.627.000
47. Program Pengelolaan Sampah dan B3	Rp. 30.167.221.190
48. Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Hidup	Rp. 1.730.343.981
49. Program Penataan dan Penuaan Perlindungan Pengelolaan Lingkungan Hidup	Rp. 387.613.000
50. Program Pelayanan Pendaftaran Penduduk	Rp. 157.294.000
51. Program Pelayanan Pencatatan Sipil	Rp. 150.000.000
52. Program Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	Rp. 485.706.803
53. Program Pemanfaatan Data dan Inovasi Pelayanan Kependudukan	Rp. 2.187.331.000
54. Program Pengendalian Operasional dan Rekayasa Lalu Lintas Angkutan Jalan (LLAJ)	Rp. 4.972.199.400
55. Program Angkutan Darat	Rp. 24.350.000
56. Program Perhubungan Laut	Rp. 43.790.000
57. Program Teknis Sarana dan Prasarana	Rp. 7.236.875.400
58. Program Komunikasi & Informatika	Rp. 2.410.409.000
59. Program Layanan E-Government	Rp. 1.122.878.000
60. Program Kerjasama Informasi dan Media Massa	Rp. 2.231.260.800

<b>PROGRAM</b>	<b>ANGGARAN</b>
61. Program Pengembangan Data / Informasi / Statistik Daerah	Rp. 497.100.000
62. Program Pengelolaan Pengamanan Teknologi Informasi Dan Persandian	Rp. 114.710.000
63. Program Peningkatan Daya Saing Penanaman Modal	Rp. 615.235.500
64. Program Peningkatan Kualitas Sistem Informasi Investasi dan Perijinan yang Berdaya Saing dan Berkelanjutan	Rp. 514.977.000
65. Program Peningkatan Pengendalian dan Pengawasan Penanaman modal	Rp. 163.550.000
66. Program Peningkatan Pelayanan Perijinan	Rp. 373.692.500
67. Program Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik	Rp. 285.471.000
68. Program Perpustakaan	Rp. 1.603.738.750
69. Program Kearsipan	Rp. 1.259.876.000
70. Program Promosi Pariwisata	Rp. 768.715.000
71. Program Destinasi Pariwisata dan Bina Usaha	Rp. 965.828.500
72. Program Kepemudaan	Rp. 156.360.000
73. Program Keolahragaan	Rp. 7.515.772.000
74. Program Peningkatan Produksi dan Produktivitas Pertanian	Rp. 1.133.860.525
75. Program Peningkatan Produksi dan Bina usaha Peternakan	Rp. 422.287.000
76. Program Peningkatan Produksi dan Pemasaran Hasil Perkebunan	Rp. 325.904.000
77. Program Peningkatan Ketahanan Pangan	Rp. 581.120.000
78. Program Pengembangan Produksi dan Pemasaran Hasil Perikanan	Rp. 385.432.900
79. Program Perdagangan	Rp. 989.530.000
80. Program Pengelolaan Pasar	Rp. 2.432.944.308
81. Program Peningkatan Kualitas Kelembagaan Koperasi	Rp. 61.680.000
82. Program Pemberdayaan Dan Pengembangan UMKM	Rp. 348.852.800
83. Program Pengembangan Industri	Rp. 6.194.170.000
84. Program Perencanaan Infrastruktur dan Kewilayahan	Rp. 1.559.445.000
85. Program perencanaan pembangunan ekonomi	Rp. 1.238.823.000

<b>PROGRAM</b>	<b>ANGGARAN</b>
86. Program perencanaan pembangunan daerah	Rp. 2.745.637.400
87. Program perencanaan sosial dan budaya	Rp. 899.985.167
88. Program Penelitian, Pengembangan Kebijakan Strategis, Inovasi Daerah, dan IPTEK	Rp. 763.225.000
89. Program Penyusunan APBD	Rp. 1.566.437.415
90. Program Penatausahaan APBD	Rp. 1.002.038.400
91. Program Pengelolaan Barang Milik Daerah	Rp. 1.334.760.000
92. Program Akuntansi	Rp. 991.243.000
93. Program Pendapatan Pajak Daerah Non PBB dan BPHTP	Rp. 1.205.811.500
94. Program Pendapatan Pajak Daerah	Rp. 1.816.179.250
95. Program pembinaan dan pengembangan aparatur	Rp. 1.142.733.500
96. Program Administrasi Kepegawaian	Rp. 1.010.928.500
97. Program Pendidikan dan Pelatihan	Rp. 1.217.094.144
98. Program Pembinaan dan Pengembangan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah	Rp. 44.308.600
99. Program Penyediaan Data, Informasi dan Mitigasi Hukum Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah	Rp. 255.240.000
100. Program peningkatan kapasitas lembaga perwakilan rakyat daerah	Rp. 40.701.297.190
101. Program peningkatan sistem pengawasan internal dan pengendalian pelaksanaan kebijakan KDH	Rp. 4.328.607.970
102. Program Penataan Daerah Otonomi Baru	Rp. 88.463.863
103. Program Peningkatan dan Pembinaan Pemerintahan Umum	Rp. 592.823.664
104. Program Peningkatan dan Pembinaan Pemerintahan Kelurahan	Rp. 641.932.204
105. Program peningkatan pelayanan kedinasan kepala daerah/wakil kepala daerah	Rp. 5.711.522.957
106. Program Penataan Peraturan PerundangUndangan	Rp. 2.526.940.769
107. Program pembinaan dan pengembangan aparatur	Rp. 272.950.000
108. Program Peningkatan Kelembagaan Perangkat Daerah	Rp. 2.232.308.628
109. Program Pembinaan dan Peningkatan Perekonomian Daerah	Rp. 648.110.552



<b>PROGRAM</b>	<b>ANGGARAN</b>
110. Program Pengendalian Pembangunan	Rp. 370.541.054
111. Program Fasilitasi Keagamaan dan Kemasyarakatan	Rp. 7.012.473.945
112. Program Peningkatan Kerjasama Antar Pemerintah Daerah	Rp. 885.600.815
113. Program Pengembangan Wawasan Kebangsaan	Rp. 320.720.000
114. Program Pendidikan Politik Masyarakat	Rp. 428.910.000
115. Program Pemerintahan Umum Kecamatan	Rp. 1.546.490.814
116. Program Pemberdayaan Masyarakat Kecamatan	Rp. 1.715.381.000
117. Program Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan	Rp. 27.787.591.650
118. Program Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan (DAU-T)	Rp. 3.993.444.273
119. Program Penyediaan Sarana dan Prasarana Infrastruktur Kelurahan (DAUT)	Rp. 21.315.451.547
120. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Rp. 20.054.355.122
<b>JUMLAH</b>	<b>Rp. 711.694.079.906</b>



**WALIKOTA SERANG,**

**H. SYAFRUDIN, S.Sos, M.Si**



# PEMERINTAH KOTA SERANG INSPEKTORAT

Jl. Jendral Sudirman No. 5 Serang - Banten Telp. (0254) 207538 Fax. (0254) 207538

## PERNYATAAN TELAH DIREVIU

### LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH KOTA SERANG TAHUN ANGGARAN 2020

Kami telah mereviu Laporan Kinerja instansi Pemerintah Kota Serang untuk tahun anggaran 2020, sesuai pedoman reviu atas Laporan Kinerja. Substansi informasi yang dimuat dalam Laporan Kinerja menjadi tanggung jawab manajemen Pemerintah Kota Serang.

Reviu bertujuan untuk memberikan keyakinan terbatas laporan kinerja telah disajikan secara akurat, andal dan valid.

Berdasarkan reviu kami, tidak terdapat kondisi atau hal-hal yang menimbulkan perbedaan dalam meyakini keandalan informasi yang disajikan di dalam laporan kinerja ini.

Serang, 31 Maret 2021  
INSPEKTUR  
  
Drs. Komarudin, Ak, MM  
Pembina Utama Muda  
NIP. 19620303 199102 1 001